



Kementerian PPN/
Bappenas

METADATA

INDIKATOR PEMBANGUNAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

METADATA

INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

METADATA

INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2024

PENGARAH

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Afwandi
Bambang Triyono
Nuzula Anggeraini

KOORDINATOR PENYUSUN

Chairul Rijal

TIM PENYUSUN

Ladislau Ryanniro Tumanggor
Ultamas Eka Rahmawan

TIM PENDUKUNG TEKNIS

Yossi Anandia Putri
Sefty Fidanarsih
Ismail Yusuf
Aliza
Fakhrizal Dhimar Makrufi

EDITOR

Maya Novalia Pulungan
Fatkhul Laelah

TATA LETAK DAN DESAIN

Aris Kadarisman
Reza Andika Putra

KONTRIBUTOR

Penanggung Jawab Prioritas Nasional pada Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

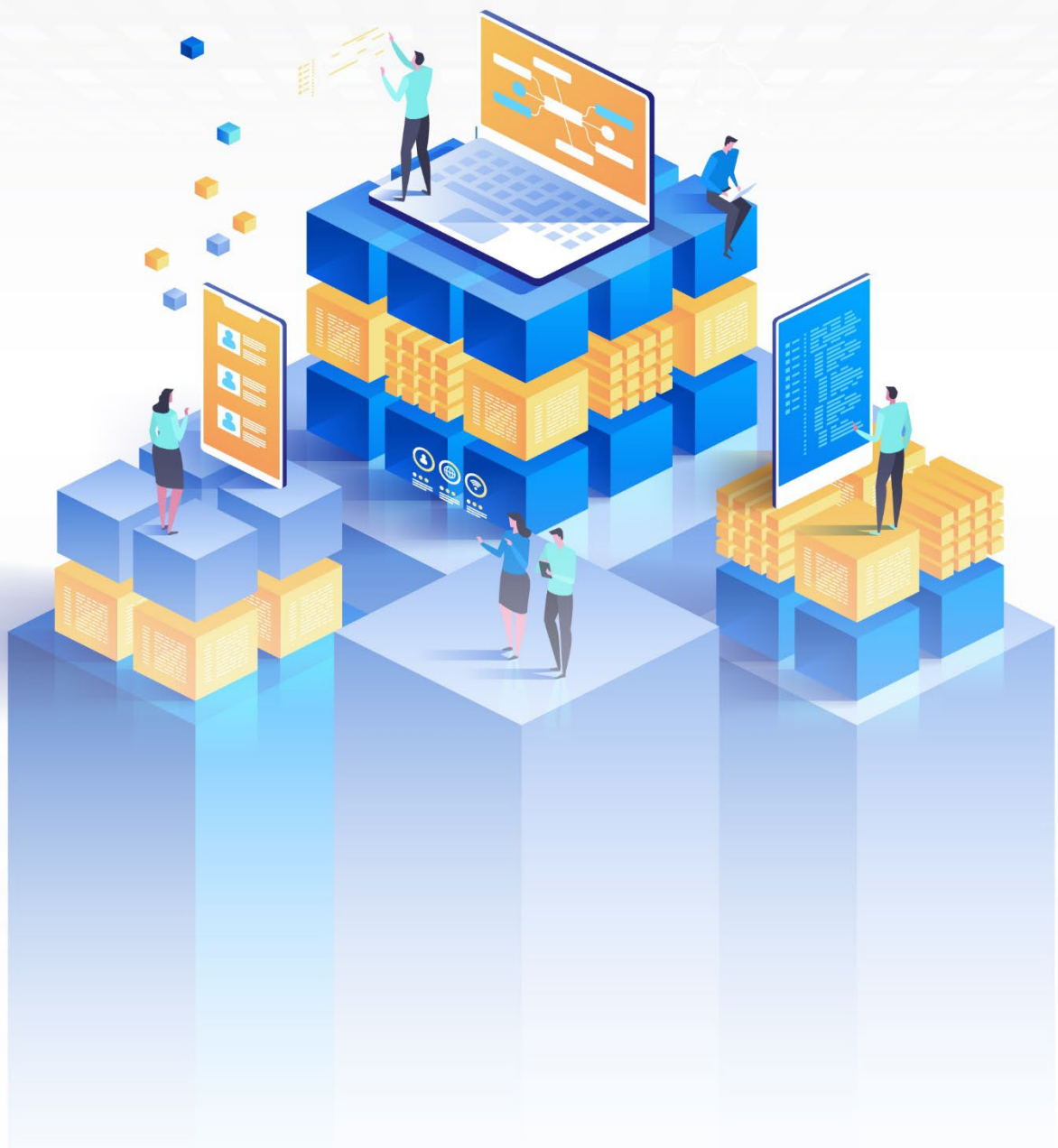
Sebagai upaya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan dokumen perencanaan tahunan. Dokumen dimaksud berisikan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta target dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, ditetapkan indikator pembangunan (dan targetnya) pada setiap PN, PP, KP, dan ProP.

Dalam menyusun buku metadata ini, kami berkoordinasi dengan unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Tersedianya metadata indikator pembangunan diharapkan mendukung penyusunan perencanaan yang relevan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian RKP Tahun 2024 yang efektif. Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 diharapkan juga menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* dalam memahami indikator RKP Tahun 2024 sebagai parameter pencapaian pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan, dan berpartisipasi dalam penyusunan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024. Kami menyadari bahwa beberapa bagian dari dokumen ini masih perlu dikembangkan. Masukan dan kritik membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dokumen serupa di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	2
LATAR BELAKANG	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	4
Tujuan.....	4
Ruang Lingkup.....	4
MANFAAT METADATA.....	4
METODE DAN SUMBER DATA.....	5
Metode	5
Sumber Data.....	5
METADATA SASARAN PEMBANGUNAN	8
Pertumbuhan Ekonomi	9
Tingkat Kemiskinan.....	10
Tingkat Pengangguran Terbuka.....	11
Rasio Gini	12
Indeks Pembangunan Manusia.....	13
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15
Nilai Tukar Petani (NTP)	16
Nilai Tukar Nelayan	18
METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.....	22
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional.....	23
Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	24
Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan	25
Rasio kewirausahaan nasional.....	26
Pertumbuhan PDB pertanian.....	27
Pertumbuhan PDB perikanan	28
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	29
Kontribusi PDB industri pengolahan.....	30
Nilai devisa pariwisata.....	30
Kontribusi PDB pariwisata	31
Penyediaan lapangan kerja per tahun	33

Pertumbuhan investasi (PMTB).....	34
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan.....	35
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa.....	36
Tingkat Inflasi Umum.....	37
Rasio perpajakan terhadap PDB.....	38
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja.....	39
Kapasitas terpasang pembangkit EBT.....	40
Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik.....	41
Produktivitas air (<i>water productivity</i>).....	42
Nilai Tukar Petani (NTP).....	43
Angka Kecukupan Energi (AKE).....	45
Angka Kecukupan Protein (AKP).....	46
<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).....	47
<i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES).....	48
Konservasi Kawasan Kelautan.....	50
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.....	51
Produksi perikanan.....	52
Produksi garam.....	52
Nilai tukar nelayan.....	53
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan.....	55
Pertumbuhan wirausaha.....	56
Kontribusi koperasi terhadap PDB.....	57
Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.....	58
Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas.....	59
Nilai tambah ekonomi kreatif.....	60
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan.....	61
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja.....	62
Jumlah tenaga kerja pariwisata.....	63
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif.....	64
Nilai realisasi PMA dan PMDN.....	65
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan.....	66
Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.....	67
Neraca perdagangan barang.....	68
Pertumbuhan ekspor nonmigas.....	69
Jumlah wisatawan mancanegara.....	70
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.....	71

Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	72
Tingkat inflasi pangan bergejolak.....	73
Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	74
Rasio Uang Beredar M2/PDB.....	75
Skor <i>Logistic Performance Index</i>	76
Peringkat <i>Travel And Tourism Development Index</i>	77
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration</i>).....	78
Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	79
Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat.....	80
Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas.....	81
METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	84
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI.....	85
IPM KTI.....	86
Persentase penduduk miskin KTI	87
Laju pertumbuhan PDRB KBI	88
IPM KBI.....	89
Persentase penduduk miskin KBI.....	90
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera.....	91
IPM Provinsi di Wilayah Sumatera	92
Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	93
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali.....	94
IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	95
Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	96
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara	97
IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara.....	98
Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara.....	99
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	100
IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan.....	101
Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan.....	102
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi	103
IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi.....	104
Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi.....	105
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku.....	106
IPM Provinsi di Wilayah Maluku	107
Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	108

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua.....	109
IPM Provinsi di Wilayah Papua	110
Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	111
METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 3	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	114
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>).....	115
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	116
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial.....	117
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	118
Tingkat kemiskinan ekstrem.....	119
Angka Kematian Ibu (AKI).....	120
Angka Kematian Bayi (AKB)	122
Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23	124
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	125
Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	127
Insidensi <i>Tuberculosis</i>	128
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.....	130
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta	131
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	132
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	133
Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	134
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	135
Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	136
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.....	137
Harapan lama sekolah	138
Indeks Perlindungan Anak (IPA).....	139
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	141
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	142
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.....	143
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas.....	144
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	146
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 200</i>	147
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 300</i>	148
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 500</i>	149
Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	150
Peringkat pada Olympic Games	150

Peringkat pada Paralympic Games	151
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	152
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	153
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	154
Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun.....	155
Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	156
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	157
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas.....	158
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia.....	159
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif.....	160
Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal.....	161
Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja informal.....	162
Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	163
Persentase persalinan di fasyankes.....	164
Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR)	165
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>).....	166
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	167
Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC Treatment Coverage</i>).....	169
Insidensi HIV.....	170
Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	171
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.....	172
Jumlah kabupaten/kota sehat	173
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	173
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	174
Persentase rumah sakit terakreditasi	175
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	176
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	177

Persentase obat memenuhi syarat	178
Persentase makanan memenuhi syarat.....	179
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat.....	180
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi	181
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca	182
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika	183
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains	184
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	185
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi	186
Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/ sederajat	187
Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/ sederajat	188
Tingkat penyelesaian Pendidikan: SMA/SMK/MA/ sederajat	189
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	190
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT).....	191
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	192
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.....	193
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	194
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	195
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	196
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.....	197
Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir.....	198
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	199
Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	200
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha..	201
Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah	202
Jumlah lulusan pelatihan vokasi	203
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	204

Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	205
Jumlah prototipe dari perguruan tinggi	206
Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	207
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	208
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	208
Jumlah paten <i>granted</i> (domestik)	209
Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	210
Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	211
Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	212
Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi	213
Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	214
Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	214
Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	215
Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	216
Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	216
Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	217
METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 4	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	220
Indeks Capaian Revolusi Mental	221
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	224
Indeks Pembangunan Kebudayaan	225
Indeks Pembangunan Masyarakat	228
Indeks Kerukunan Umat Beragama	232
Indeks Pembangunan Keluarga	234
Median Usia Kawin Pertama Perempuan	235
Nilai Budaya Literasi	237
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	238
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	239
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	240

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	242
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu.....	243
Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa.....	245
Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	246
Nilai Dimensi Persatuan Indonesia	247
Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	248
Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	249
Indeks Kerentanan Keluarga	250
Indeks Karakter Remaja.....	251
Nilai Dimensi Warisan Budaya.....	252
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	253
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya.....	254
Nilai Dimensi Toleransi.....	255
Nilai Dimensi Kesetaraan.....	256
Nilai Dimensi Kerja Sama	257
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	258

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	262
Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau.....	263
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	264
Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif).....	264
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku.....	265
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau.....	266
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>).....	267
Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2.....	268
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara	268
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	269
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	270
Rasio elektrifikasi	271
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik.....	272
Penurunan emisi GRK sektor energi	273
Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).....	274
Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB.....	275

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita.....	276
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	277
Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan.....	278
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%).....	279
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman.....	280
Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%).....	281
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	282
Persentase PDAM dengan kinerja sehat	283
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.....	284
Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	285
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	286
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	287
Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	288
Volume tampungan air per kapita	289
Persentase luas sawah beririgasi.....	290
Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi.....	291
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota.....	292
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi.....	293
Panjang jalan baru yang terbangun.....	294
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	295
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar.....	296
Jumlah rute subsidi tol laut.....	297
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif)	298
Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	299
Jumlah rute jembatan udara	300
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ <i>flyover/underpass</i> (kumulatif) (kota).....	301
Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan.....	302
Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	303

Jumlah produksi tenaga listrik	304
Penurunan emisi CO ₂ pembangkit.....	305
Jumlah pengguna listrik	306
Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	307
Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif	308
Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK	309
Persentase pengguna internet	310
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	311

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.....	313
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	315
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	316
Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).....	317
Persentase penurunan intensitas emisi GRK.....	318
Indeks Kualitas Air (IKA)	319
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	321
Indeks Kualitas Udara (IKU)	322
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	323
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana.....	325
Persentase Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	326
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	327
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi	328
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan.....	329
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah	331
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU	332
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan.....	333

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	336
Indeks Demokrasi Indonesia	337
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.....	338
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.....	339
Indeks Pembangunan Hukum	340
Indeks Pelayanan Publik Nasional	341

Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.....	343
IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	344
IDI Aspek Kebebasan.....	345
IDI Aspek Kesetaraan	346
Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik.....	347
Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral	348
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	349
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri.....	350
Indeks Perilaku Anti Korupsi.....	351
Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga.....	352
Indeks Pelayanan Publik Provinsi.....	354
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota	356
Indeks Kekuatan Militer	358
Indeks Terorisme Global.....	359
Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya.....	360
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	361
PENUTUP.....	365

BADAN PERENCANAAN PE

BAPPENAS





MBANGUNAN NASIONAL

PENDAHULUAN



METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan metadata indikator pembangunan, tujuan dan ruang lingkup, metode dan sumber data yang digunakan, serta manfaat dari metadata indikator pembangunan.

LATAR BELAKANG

Indikator Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan unsur kunci dalam mengukur arah dan kemajuan pembangunan suatu negara. Pada RKP Tahun 2024, terhitung lebih dari 2.000 indikator. Jumlah ini berangkat dari tema RKP Tahun 2024, yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP). Dengan jumlah indikator yang mencapai ribuan, memahami dan mengevaluasi indikator RKP adalah tugas yang monumental. Dalam konteks inilah, metadata sebagai data dari data menjadi esensial. Untuk itu, keharusan menyeragamkan pemahaman indikator diperlukan guna mendukung pelaksanaan evaluasi RKP serta menjadi fondasi bagi pembangunan yang efektif dan efisien.

Dalam lingkup yang lebih luas, metadata tidak hanya menjadi bagian integral dalam evaluasi kebijakan pembangunan nasional, tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Terkhusus pada tingkat Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), dampak kebijakan pembangunan ini harus dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Pengorganisasian metadata di tingkat ini harus menggambarkan dengan jelas dampak dan efektivitas kebijakan pembangunan tersebut.

Metadata, pada dasarnya, adalah data yang memberikan informasi tentang data lainnya. Dalam konteks evaluasi penyusunan RKP, metadata adalah alat yang penting untuk memahami lebih dalam indikator-indikator RKP. Metadata akan berfungsi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari indikator, seperti definisi, rumus, satuan, metode penghitungan, serta elemen-elemen lain yang dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para evaluator dan pemangku kebijakan.

Penting untuk memahami bahwa metadata tidak hanya bermanfaat dalam konteks evaluasi *ex post* (setelah pelaksanaan pembangunan), tetapi juga dalam evaluasi *ex ante* (sebelum pembangunan). Dengan metadata yang tersusun dengan baik, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga akan memiliki alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Metadata yang jelas dan komprehensif akan membantu dalam menyusun panduan bagi perencana dan pelaksana prioritas pembangunan.

Pembangunan metadata yang efektif juga harus mempertimbangkan standar-standar internasional yang relevan. Dengan merujuk pada praktik terbaik dan standar yang diakui secara global, metadata yang disusun memenuhi persyaratan tingkat internasional sehingga memungkinkan perbandingan dan evaluasi yang lebih baik dengan negara-negara lain.

Pengembangan metadata juga memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, akademisi, dan pemangku kebijakan. Sinergi di antara semua pihak yang terlibat akan memastikan bahwa metadata yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan evaluasi pembangunan nasional.

Dalam rangka untuk mencapai pengembangan metadata yang efektif, perlu adanya kerangka kerja yang jelas dan standar yang diikuti. Metadata indikator RKP harus disusun dengan sistematis, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan memperhitungkan tujuan pengguna akhir, yaitu para evaluator dan pemangku kebijakan.

Tidak hanya itu, transparansi dalam penggunaan metadata juga penting. Metadata harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, upaya evaluasi pembangunan akan menjadi lebih demokratis dan terbuka, yang dapat membantu untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam menghadapi kompleksitas proses evaluasi pembangunan nasional, penggunaan metadata yang tepat akan memberikan manfaat besar dalam memahami indikator-indikator RKP yang ada. Melalui pemahaman yang lebih dalam, para pemangku kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, sementara para evaluator dapat melakukan tugas mereka dengan lebih efektif. Akhirnya, pembangunan Indonesia dapat bergerak maju ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Metadata indikator pembangunan disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 untuk memberikan deskripsi dan gambaran pengelompokan data indikator pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2024. Selain itu, metadata menjadi instrumen penting sebagai informasi indikator dan acuan dalam menentukan indikator RKP tahun berikutnya. Terakhir, metadata pembangunan berfungsi secara signifikan dalam mendukung evaluasi pembangunan yang lebih akurat dan berkualitas.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup metadata indikator pembangunan disusun berdasarkan indikator pada sasaran pembangunan dan indikator di tingkat PN dan PP pada RKP Tahun 2024.

MANFAAT METADATA

Metadata memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas indikator dalam RKP Tahun 2024 guna mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pencapaian rencana pembangunan.

METODE DAN SUMBER DATA

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan metadata indikator pembangunan, yakni:

1. Informasi eksisting metadata indikator yang termuat pada RKP Tahun 2023 dan dilanjutkan pada RKP Tahun 2024.
2. Pencarian, pengolahan, dan pendefinisian informasi berdasarkan dokumen, literatur publik, dan laman *website* Instansi Pemerintahan dan/atau BPS.
3. Konfirmasi dan penyempurnaan oleh penanggung jawab PN RKP.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan metadata indikator pembangunan adalah dokumen dan literatur publik yang dapat diakses secara daring, seperti Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, serta Publikasi Statistik, seperti Publikasi BPS. Selanjutnya, data yang tersedia juga dikonfirmasi dan disempurnakan oleh penanggung jawab PN RKP, serta didukung oleh reviu oleh BPS.

INDIKATOR SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN



Pertumbuhan Ekonomi



Tingkat Kemiskinan



Tingkat Pengangguran
Terbuka



Rasio Gini



Indeks Pembangunan
Manusia



Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca



Nilai Tukar Petani



Nilai Tukar Nelayan

SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN





**METADATA INDIKATOR
PEMBANGUNAN**

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Sasaran Utama Pembangunan

**Indikator :****Pertumbuhan Ekonomi**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase perubahan nilai produksi barang dan jasa yang dihitung berdasarkan PDB atas dasar harga konstan.

Interpretasi

Menunjukkan nilai *output* barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan indikator pembangunan lain seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, serta nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada level yang tinggi, melainkan juga diarahkan untuk inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas dan menurunkan ketimpangan. Semakin tinggi nilai indikator pertumbuhan ekonomi, maka menunjukkan semakin baik perekonomian suatu negara.

Metode/Rumus Penghitungan

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)
 PDB_t : Produk domestik bruto *periode* t
 PDB_{t-1} : Produk domestik bruto satu periode sebelumnya satu periode sebelumnya (berdasarkan harga konstan)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA0Izl=/pertumbuhan-ekonomi--triwulan-iii-2023.html>.

Tahun Data Tersedia : 2010-2023.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Tingkat Kemiskinan

Institusi Penghasil :

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Interpretasi

1. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia
2. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Keterangan:

P_0 : Persentase penduduk miskin

Z : Garis kemiskinan

Y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : y_i/z

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Berita resmi statistik;
2. Rencana Kerja Pemerintah.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: Tahunan.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran atau Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya.



Indikator :

Tingkat Pengangguran Terbuka

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Interpretasi

Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$TPT = \frac{PP}{AK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Badan Pusat Statistik).

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016. (https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang-en/index.html);
2. Badan Pusat Statistik. (<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>).

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran (Februari dan Agustus) atau Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Rasio Gini

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran.

Interpretasi

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Metode/Rumus Penghitungan

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

- GR : *Gini Ratio*/Rasio Gini
 f_i : Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i
 Y_i : Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data : Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data:

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>.

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Dua kali dalam setahun.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Pembangunan Manusia

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia yang terdiri dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

Keterangan:

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Manusia.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/id>

Tahun Data: 2010 – 2023.

Level Estimasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan adalah nilai penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi di titik tahun tertentu yang terjadi dengan melakukan kegiatan pembangunan rendah karbon.

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* untuk periode yang sama.

Indikator ini mengacu terhadap metadata indikator Prioritas Nasional 6 dengan nomenklatur (persentase penurunan emisi GRK).

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK baik tahunan maupun kumulatif menunjukkan capaian yang semakin baik sebagai indikasi komitmen dan keberhasilan dalam mengurangi jejak karbon yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Secara umum, penghitungan nilai persentase penurunan emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai emisi sendiri didapat dari Data Aktivitas dikalikan dengan Faktor Emisi.

$$E = DA \times FE$$

Keterangan:

E : Emisi GRK (ton)
 DA : Data Aktivitas (Tj)
 FE : Faktor Emisi (ton/Tj)

Catatan:

- *Activity unit* (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya penanaman pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 13,99 ton C/ha.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi : Potensi Penurunan Emisi GRK.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Tukar Petani (NTP)

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat perkembangan harga komoditas/produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik.

Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas/produk pertanian.

NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.

Interpretasi

1. $NTP > 100$: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
2. $NTP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
3. $NTP < 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

Metode/Rumus Penghitungan

$$NTP = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

- NTP : Nilai Tukar Petani
I_t : Indeks harga yang diterima petani
I_b : Indeks harga yang dibayar petani

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi

1. Statistik Nilai Tukar Petani 2022
2. Berita Resmi Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/publication/2023/04/10/976011cd754095dec0ba5ef8/statistik-nilai-tukar-petani-2022.html>
2. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1996>.

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b). Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Secara konseptual, NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

Indeks Harga yang diterima nelayan (I_t) dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan nelayan. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap.

Indeks yang dibayar nelayan (I_b), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap.

Interpretasi

1. $NTN > 100$: Nelayan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;
2. $NTN = 100$: Nelayan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;
3. $NTN < 100$: Nelayan subsektor perikanan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Metode/Rumus Penghitungan

Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

$$NTN = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

- NTN : Nilai Tukar Nelayan
 I_t : Indeks harga yang diterima nelayan
 I_b : Indeks harga yang dibayar nelayan

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi: Tabel Statistik NTN (Nilai Tukar Nelayan) Menurut Subsektor (2018=100).

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcxMyMy/ntn--nilai-tukar-nelayan--menurut-subsektor--2018-100-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan**

**JUMLAH
INDIKATOR PN**

17

**JUMLAH
INDIKATOR PP**

40



PRIORITAS NASIONAL 1



METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan



SASARAN 1: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.



Indikator :

Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Definisi

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer.

Interpretasi

Porsi Energi Baru Terbarukan dihitung sebagai ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dalam menerapkan energi terbarukan dalam mewujudkan energi bersih dan sehat untuk lingkungan berkelanjutan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$BET = \frac{PET}{PEP} \times 100\%$$

Keterangan:

BET : Bauran Energi Terbarukan
 PET : Total Pasokan Energi Terbarukan
 PEP : Total Pasokan Energi Primer

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi: Handbook Of Energy & Economic Statistics Of Indonesia (HEESI) 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.esdm.go.id/en/publication/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia-heesi>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Institusi Penghasil: Badan Ketahanan Pangan

Definisi

Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH ideal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk.

Interpretasi

Skor PPH maksimal adalah 100 yang menunjukkan pola konsumsi ideal penduduk. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Metode/Rumus Penghitungan

Skor PPH dihitung berdasarkan komposisi konsumsi pangan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018, yaitu 2.100 kkal/kap/hari. AKE di tingkat konsumsi adalah 2.150 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2018). Bobot kelompok pangan digunakan untuk perhitungan skor PPH. Skor maksimal diolah oleh Gizi Masyarakat - IPB (GMSK-IPB) dan Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, 2004. Skor PPH diperoleh dari perkalian % Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan bobot, dibandingkan dengan skor maksimal. Skor PPH jika melebihi skor maksimal, skor PPH yang digunakan adalah skor maksimal.

No	Kelompok Pangan	Bobot	Skor Maksimal
1	Padi-padian	0,5	25
2	Umbi-umbian	0,5	2,5
3	Pangan hewani	2	24
4	Minyak dan lemak	0,5	5
5	Buah/biji berminyak	0,5	1
6	Kacang-kacangan	2	10
7	Gula	0,5	2,5
8	Sayur dan buah	5	30
9	Lain-lain	0	0
	Jumlah		100

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Direktori Situasi Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan

Institusi Penghasil: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Definisi

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pengelolaan WPPNRI berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Pengelolaan dan pemanfaatan WPPNRI dilakukan melalui perhitungan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan di WPPNRI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemanfaatan WPP secara berkelanjutan termasuk menjaga populasi ikan, menjaga ekosistem laut, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan.

Indikator Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara Berkelanjutan sangat penting dalam upaya menjaga sumber daya perikanan global, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan mendukung mata pencaharian nelayan serta sektor perikanan yang berkelanjutan.

Interpretasi

Jumlah WPP yang dikelola dan menghasilkan pendataan estimasi sumber daya ikan yang lebih akurat.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dilakukan pendataan estimasi Sumber Daya Ikan (SDI) yang ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta dilakukan penataan pengelolaan/pemanfaatannya.

Ukuran/Satuan: Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Statistik Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/3434>
2. <https://statistik.kkp.go.id/>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Minimal dilakukan secara berkala setiap 5 tahun.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



SASARAN 2: Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian



Indikator :

Rasio kewirausahaan nasional

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik (diolah oleh Dit. Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas)

Definisi

Perhitungan rasio kewirausahaan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

Interpretasi

Rasio kewirausahaan nasional yang tinggi dianggap sebagai tanda positif yang menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja Indonesia yang menjadi wirausaha. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat menarik minat para angkatan kerja untuk menjadi wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Metode/Rumus Penghitungan

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berusaha Sendiri Dibantu Buruh Tetap/Jumlah Angkatan Kerja.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Pertumbuhan PDB pertanian**

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Pertanian

Definisi

Indikator Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengukur perubahan nilai PDB sektor pertanian suatu negara dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pertanian pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian.

Pertumbuhan PDB sektor pertanian adalah indikator penting dalam menganalisis kinerja sektor pertanian suatu negara. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana sektor pertanian telah tumbuh atau menyusut dalam periode waktu tertentu, yang dapat memengaruhi ekonomi dan ketahanan pangan negara tersebut.

Interpretasi

Pertumbuhan positif menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, sementara jika pertumbuhannya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor pertanian dalam periode waktu tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$PDB = \frac{C + I + G + (X - M)}{100}$$

$$\Delta PDB = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PDB	: Produk Domestik Bruto
C	: Konsumsi Rumah Tangga
I	: Total Investasi
G	: Total Pengeluaran Pemerintah
X-M	: Selisih Ekspor dan Impor
ΔPDB	: Pertumbuhan PDB Pertanian
PDB_t	: PDB harga konstan tahun ini
PDB_{t-1}	: PDB harga konstan tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Berita Resmi Statistik;
2. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/id/id/pressrelease/2023/11/06/2000>
2. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=16>.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya

**Indikator :****Pertumbuhan PDB perikanan**

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan mengukur perubahan nilai PDB sektor perikanan suatu negara dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB perikanan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor perikanan.

Interpretasi

Jika hasilnya positif, itu menunjukkan pertumbuhan sektor perikanan, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor perikanan dalam periode waktu tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{PDB} = \frac{C + I + G + (X - M)}{100}$$

Keterangan:

- PDB : Produk Domestik Bruto
- C : Konsumsi Rumah Tangga
- I : Total Investasi
- G : Total Pengeluaran Pemerintah
- X-M : Selisih Ekspor dan Impor

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Berita Resmi Statistik 5 Februari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf);
2. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf.

Tahun Data Tersedia : -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Pertumbuhan PDB industri pengolahan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

PDB industri pengolahan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB industri dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t terhadap nilai tambah industri pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Interpretasi

Jika hasilnya positif, itu menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor industri pengolahan dalam periode waktu tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur (Pengolahan)} = \frac{(\text{NTSIM}_t - \text{NTSIM}_{t-1})}{\text{NTSIM}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

NTSIM_t : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t

NTSIM_{t-1} : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi

1. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Judul Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/indicator/9/1216/1/laju-pertumbuhan-pdb-industri-manufaktur.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Kontribusi PDB industri pengolahan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan.

Interpretasi

Hasil dari rumus ini akan memberikan kontribusi PDB industri pengolahan sebagai persentase dari PDB total. Ini menunjukkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap ekonomi negara tersebut dalam bentuk persentase.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Kontribusi PDB Industri Manufaktur (Pengolahan)} = \frac{(\text{NTSIM}_t)}{\text{PDB}_t} \times 100\%$$

Keterangan:

NTSIM_t : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t

PDB_t : Nilai PDB nasional pada periode sama

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/-seri-2010--distribusi-pdb-triwulanan-seri-2010-atas-dasar-harga-berlaku--persen-.html>

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Nilai devisa pariwisata**

Institusi Penghasil: Bank Indonesia

Definisi

Jumlah (nilai) devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup, namun tidak terbatas pada penerimaan dari jasa perjalanan (*travel*) dan jasa transportasi penumpang (*passenger transport*).

Interpretasi:

Nilai devisa pariwisata yang merupakan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata negara tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

$$PDJP = KW_n \times RPW_n$$

Keterangan:

PDJP : Nilai penerimaan devisa jasa perjalanan (miliar US\$)

KW_n : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut negara asal dan tujuan kunjungan (orang)

RPW_n : Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan menurut negara asal dan tujuan kunjungan (US\$)

Ukuran/Satuan: Miliar US\$.

Judul Publikasi/Sumber Data:

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx#headingFour>

Tahun Data Tersedia: 2022-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Kontribusi PDB pariwisata

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: (a) dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku) dan (b) dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 ke periode t.

Interpretasi:

Hasil dari rumus ini akan memberikan kontribusi PDB pariwisata sebagai persentase dari PDB total. Ini menunjukkan sejauh mana sektor pariwisata berkontribusi terhadap ekonomi negara tersebut dalam bentuk persentase.

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus 1:

$$TDGDP = \frac{(C_{\text{winus}} + E_{\text{wisnas}} + E_{\text{pemerintah}} + I_{\text{pariwisata}} + NX_{\text{perjalanan}})}{PDB} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$LPTDGDGP = \frac{(TDGDP_t - TDGDP_{t-1})}{TDGDP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- TDGDP : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (*tourism direct gross domestic product*) (%)
- LTDGDGP : Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (%)
- TDGDP_t : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-t (%)
- TDGDP_{t-1} : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode tahun sebelumnya (%)
- PDB : PDB pada periode sebelumnya (%)
- C_{winus} : Nilai konsumsi wisatawan nusantara (rupiah)
- E_{wisnas} : Nilai pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk *pre* dan *post trip*) (rupiah)
- E_{pemerintah} : Nilai pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (rupiah)
- I_{pariwisata} : Nilai investasi pariwisata (rupiah)
- NX_{perjalanan} : Nilai ekspor *netto* jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) (rupiah)

Ukuran/Satuan: persen (%).**Judul Publikasi/Sumber Data**

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/IMTE4OCMy/proporsi-kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb--persen-.html>

Tahun Data Tersedia: 2017.**Level Estimasi:** Nasional.**Frekuensi Pengumpulan:** Tahunan.**Apakah Indikator Dapat Diakses Umum:** Ya

**Indikator :****Penyediaan lapangan kerja per tahun**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Penyediaan lapangan kerja per tahun merupakan jumlah tambahan lapangan kerja yang tercipta setiap tahun. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi dan dapat menggambarkan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Interpretasi:

Memberikan jumlah pekerja netto yang diperoleh oleh organisasi atau sektor selama periode waktu tersebut. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan dalam penyediaan lapangan kerja, sementara nilai negatif menunjukkan pengurangan lapangan kerja.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun} = PB_t - PB_{t-1}$$

Keterangan:

PB_t : Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun t (juta orang)

PB_{t-1} : Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun sebelumnya t-1 (juta orang)

t : Tahun pengukuran

Ukuran/Satuan: Juta orang.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016;
2. Survei Angkatan Kerja Nasional/Keadaan Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.html
2. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Pertumbuhan investasi (PMTB)**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah

Interpretasi:

Pertumbuhan investasi periode t dibanding periode t-1 adalah sebesar y_t persen. Indikator pertumbuhan PMTB mengukur seberapa besar investasi berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah.

Metode/Rumus Penghitungan

$$Y_t = \frac{(PMTB_t - PMTB_{t-1})}{PMTB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y_t : Pertumbuhan Investasi (PMTB)
 $PMTB_t$: Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun ke t
 $PMTB_{t-1}$: Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun ke t-1 (sebelumnya)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Neraca Ekonomi Tabel Statistik dan Ringkasan Metadata Statistik – Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=531>
2. <https://www.bps.go.id/id/publication>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Pertumbuhan ekspor industri pengolahan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Pertumbuhan ekspor industri pengolahan dapat diperoleh dengan mengurangi nilai ekspor industri pengolahan pada tahun ke-t terhadap nilai ekspor industri pengolahan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai ekspor industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Interpretasi:

Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor industri pengolahan periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor industri pengolahan periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan} = \frac{(\text{NEIP}_t - \text{NEIP}_{t-1})}{\text{NEIP}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

NEIP_t : Nilai Ekspor Industri Pengolahan pada tahun ke-t

NEIP_{t-1} : Nilai Ekspor Industri Pengolahan pada tahun ke t-1 (sebelumnya)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Tautan Publikasi/Sumber Data : <https://www.bps.go.id/id/pressrelease>.

Tahun Data Tersedia: 2023

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya

**Indikator :****Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (non-residen). Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan ekspor barang dan jasa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada suatu periode. Penghitungan estimasi ekspor barang dan jasa ADHK diperoleh dengan metode deflasi, yaitu membagi ekspor Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan indeks harga (deflator) yang bersesuaian. Deflator ekspor impor barang adalah Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) ekspor dan impor menurut HS 2 digit, sedangkan deflator ekspor impor jasa adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) domestik dan internasional.

Interpretasi:

Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Penghitungan

$$Y_t = \frac{(X_t - X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t : Ekspor barang dan jasa ADHK tahun ke t

X_{t-1} : Ekspor barang dan jasa ADHK tahun ke t-1 (sebelumnya)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Tabel Statistik, [Seri 2010] 4. Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/IMTA4Izl=I-seri-2010--4--laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran--persen-.html>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Tingkat Inflasi Umum**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Tingkat inflasi umum mengukur perubahan rata-rata harga konsumen secara keseluruhan dalam ekonomi suatu negara. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju Inflasi digunakan untuk menghitung:

1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*).
2. Penyesuaian Nilai Kontrak (*project escalation*).
3. Penentuan Target Inflasi (*inflation targetting*).

Tingkat inflasi umum adalah salah satu metrik kunci dalam ekonomi yang membantu dalam memahami perubahan daya beli mata uang, stabilitas harga, dan dampaknya terhadap konsumen.

Interpretasi:

1. $INF_n < 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga deflasi.
2. $INF_n = 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) sama dengan waktu (bulan atau tahun) (n-1)
3. $INF_n > 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga inflasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat Inflasi Umum (%) = $[(\text{Indeks Harga Konsumen Tahun Sekarang} - \text{Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya}) / \text{Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya}] \times 100$

Dalam rumus ini:

Indeks Harga Konsumen Tahun Sekarang adalah nilai indeks harga konsumen pada periode waktu yang ditentukan (misalnya, bulan atau tahun ini).

Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya adalah nilai indeks harga konsumen pada periode waktu sebelumnya (misalnya, bulan atau tahun sebelumnya).

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: -

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/indicator/31/1/1/inflasi-umum-.html>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Rasio perpajakan terhadap PDB

Institusi Penghasil: Kementerian Keuangan

Definisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto nominal. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Komponen penerimaan perpajakan di Indonesia mencakup penerimaan pajak pemerintah pusat dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Interpretasi:

Menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak berkontribusi terhadap PDB. Semakin besar rasio ini, semakin besar kontribusi pajak terhadap perekonomian negara.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Rasio Perpajakan terhadap PDB} = \frac{\text{TPDN}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5Bkunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja (BPS). Indikator ini bertujuan untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di suatu wilayah.

Interpretasi:

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang positif menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Semakin besar angka laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan di wilayah dalam periode tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan:

$$\text{Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja} = \frac{\text{Pertumbuhan PDB Riil}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi:

Kompilasi Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data:

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1161/sdgs_8/1

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

SASARAN 1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)



Indikator :

Kapasitas terpasang pembangkit EBT

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Definisi

Indikator Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah penting dalam menilai kontribusi energi terbarukan dalam pasokan energi total suatu wilayah atau negara. Hal ini mencerminkan seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dihasilkan dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan. Data kapasitas terpasang ini juga digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan.

Interpretasi:

Mencerminkan seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dihasilkan dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan

Metode/Rumus Penghitungan

Kumulatif kapasitas pembangkit masing-masing Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) meliputi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Ukuran/Satuan: Gigawatt (GW)

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja, Kementerian ESDM.

Tautan Publikasi/Sumber Data:

<https://www.esdm.go.id/id/publikasillaporan-kinerja>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Definisi

Indikator Pemanfaatan *Biofuel* untuk Domestik mengukur sejauh mana *biofuel* (bahan bakar yang diproduksi dari bahan organik, seperti bioetanol atau biodiesel) digunakan dalam konsumsi domestik suatu negara.

Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomassa (materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan). Utamanya jenis *biofuel* yang umum digunakan yaitu biodiesel dan bioetanol. Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik didefinisikan sebagai konsumsi domestik atas pemakaian jenis *biofuel* tersebut (B20, B30, B40).

Pemanfaatan *biofuel* adalah indikator penting dalam mengukur keberlanjutan energi dan upaya negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Interpretasi:

Data volume pemanfaatan *biofuel* menunjukkan seberapa besar penggunaan *biofuel* dalam konsumsi energi domestik. Peningkatan volume pemanfaatan *biofuel* akan sejalan dengan penurunan penggunaan bahan bakar fosil yang menunjukkan peningkatan penggunaan energi bersih di dalam negeri.

Ukuran/Satuan: Juta kilo liter.

Metode/Rumus Penghitungan

Besarnya volume pemanfaatan *biofuel* untuk domestik dihitung berdasarkan realisasi volume *biofuel* yang digunakan di dalam negeri.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 2: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN 1: Meningkatkan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi



Indikator :

Produktivitas air (*water productivity*)

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Indikator produktivitas air mengukur sejauh mana sumber daya air digunakan efisien dalam menghasilkan hasil pertanian atau hasil produksi lainnya. Indikator produktivitas air sangat relevan dalam konteks pertanian dan produksi pangan karena air adalah aspek penting dalam pertanian. Penggunaan air yang efisien dapat membantu meningkatkan produksi pangan dan meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya air dan lingkungan.

Interpretasi:

Hasil dari rumus ini akan memberikan tingkat produktivitas air, yang mencerminkan sejauh mana air digunakan dengan efisien untuk menghasilkan hasil produksi. Semakin tinggi nilai produktivitas air, semakin efisien penggunaan sumber daya air dalam proses produksi.

Metode/Rumus Penghitungan**

$$\text{Produktivitas Air} = \frac{\text{Jumlah panen (kg)}}{\text{Jumlah debit irigasi (m}^3\text{)}}$$

**Sampai saat ini perhitungan produktivitas air di Indonesia belum ada data dan laporan resmi *ter-update*. Data yang ada hanya berupa produktivitas air di daerah irigasi tertentu (*case study*) dan belum dapat merepresentasikan produktivitas air secara nasional. Sumber data untuk perhitungan tersebut tidak bisa merepresentasikan produktivitas air nasional.

Ukuran/Satuan: kg/m³.

Judul Publikasi/Sumber Data: -

Tautan Publikasi/Sumber Data: - Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: -

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: -



PROGRAM PRIORITAS 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

SASARAN 1: Meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan



Indikator :

Nilai Tukar Petani (NTP)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat perkembangan harga komoditas/produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik. Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas/produk pertanian.

NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.

Interpretasi:

1. $NTP > 100$: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
2. $NTP = 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
3. $NTP < 100$: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

Metode/Rumus Penghitungan

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan:

NTP : Nilai Tukar Petani

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Statistik Nilai Tukar Petani 2022;
2. Berita Resmi Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/publication/2023/04/10/976011cd754095dec0ba5ef8/statistik-nilai-tukar-petani-2022.html>
2. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/01/1996>

Tahun Data Tersedia: 2019.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Angka Kecukupan Energi (AKE)

Institusi Penghasil: Badan Pangan Nasional

Definisi

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah angka kecukupan gizi yang menunjukkan kebutuhan rata-rata energi yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

Di Indonesia, Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi ini mencakup estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia. Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2100 kilokalori per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Interpretasi:

Angka Kecukupan Energi (AKE) merupakan angka minimum yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan sehari. Semakin tinggi nilai AKE, maka semakin baik konsumsi energi penduduk yang dipenuhi setiap hari.

Metode/Rumus Penghitungan

Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energi setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energi setiap jenis pangan tersebut. Penghitungan konsumsi energi menggunakan standar Angka Kecukupan Energi adalah 2.100 kkal/kapita/hari menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018.

Ukuran/Satuan: Kkal/kapita/hari.

Judul Publikasi/Sumber Data: Direktori Situasi Konsumsi Pangan Nasional 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Angka Kecukupan Protein (AKP)

Institusi Penghasil: Badan Pangan Nasional

Definisi

Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata protein yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

Di Indonesia, Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Interpretasi:

Angka Kecukupan Protein (AKP) merupakan angka minimum yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan sehari. Semakin tinggi nilai AKP, maka semakin baik konsumsi protein penduduk yang dipenuhi setiap hari.

Metode/Rumus Penghitungan

Total konsumsi protein penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi protein setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi protein masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan protein setiap jenis pangan tersebut.

Penghitungan konsumsi protein menggunakan standar Angka Kecukupan Protein adalah 57 gram/kapita/hari menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018.

Ukuran/Satuan: Gram/kapita/hari.

Judul Publikasi/Sumber Data: Direktori Situasi Konsumsi Pangan Nasional 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Terakhir: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Prevalence of Undernourishment (PoU)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, di mana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Interpretasi:

PoU mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Metode/Rumus Penghitungan

Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 empat parameter yaitu (1) *Dietary Energy Consumption/DEC*, (2) *Coefficient of Variation/CV*, dan (3) *Skewness* yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) *Minimum Dietary Energy Requirement/MDER* yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Pada umumnya distribusi konsumsi energi dari suatu populasi dapat dianalisis secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisis berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; indeks massa tubuh dan *weight gain* menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi FAO/WHO/UNU *joint expert consultation*.

$$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$$

Keterangan:

- PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.
- MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kilo kalori (kkal) (*Minimum Dietary Energy Requirement*).
- f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik;
2. Dashboard SDGs Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.
2. <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) berdasarkan skala referensi global. Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman.

Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrem merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisis prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antarnegara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler.

Interpretasi:

FIES menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Semakin tinggi nilai FIES mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah.

Metode/Rumus Penghitungan

Data pada tingkat individu atau rumah tangga dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner skala pengalaman kerawanan pangan melalui 8 pertanyaan modul FIES. Data dapat dianalisis menggunakan Rasch Model. Terdapat tiga kategori FIES: (a) tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan; (b) rawan pangan sedang atau parah; dan (c) rawan pangan parah.

Rumus 1:

$$FI_{mod+sev} = \sum_i p_{imod+sev} \times w_i$$

Rumus 2:

$$FI_{sev} = \sum_i p_{isev} \times w_i$$

Keterangan:

- $FI_{mod+sev}$: Prevalensi rawan pangan sedang atau parah.
- FI_{sev} : Rawan pangan parah.
- w_i : Berat badan
- i : Individu

Estimasi probabilitas rawan pangan sedang atau parah adalah $p_{mod+sev}$ dan probabilitas rawan pangan parah adalah p_{sev} , di mana $0 < p_{sev} < p_{mod+sev} < 1$. Probabilitas tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan diperoleh $p_{fs} = 1 - p_{mod+sev}$.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik;
2. Dashboard SDGs Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.
2. <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya



PROGRAM PRIORITAS 4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

SASARAN 1: Meningkatkan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan



Indikator :

Konservasi Kawasan Kelautan

Institusi Penghasil: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Definisi

Luas kumulatif Kawasan Konservasi Kelautan terdiri dari Kawasan Konservasi Nasional (KKN), kawasan konservasi yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, dan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau dicadangkan oleh Kepala Daerah.

Interpretasi:

Peningkatan luas konservasi kawasan kelautan mengindikasikan peningkatan wilayah laut yang berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati laut yang berada di wilayah tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah luas konservasi kawasan kelautan eksisting ditambah dengan penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur melalui beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Ukuran/Satuan: Juta ha.

Judul Publikasi/Sumber Data

Sistem Database Konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/capaian>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**

Institusi Penghasil: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Definisi

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah Total Hasil Tangkapan laut (di luar tuna, tongkol dan cacalang) dalam satu tahun (THTIT) terhadap jumlah potensi sumber daya ikan (*maximum sustainable yield* - MSY) dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah jumlah tangkapan sebesar 80 % dari jumlah potensi sumber daya ikan (*maximum sustainable yield* - MSY) yang diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan (KEPMEN 19/2022).

Interpretasi:

Jumlah tangkapan berada kurang berada pada rentang < 80% dari MSY berada pada batas biologis aman

Metode/Rumus Penghitungan

Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu (THTIT) dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (*maximum sustainable yield* -MSY) dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen dan dinyatakan dengan satuan persen (%).

Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

$$= \frac{\text{THTIT}}{\text{MSY}} \times 100\%$$

Keterangan:

THTIT : Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan dalam Periode Waktu Tertentu.

MSY : *Maximum Sustainable Yield*/jumlah potensi sumber daya ikan.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *statistik.kkp.go.id*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Produksi perikanan

Institusi Penghasil: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Definisi

Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya.

Interpretasi:

Semakin tinggi produksi perikanan menunjukkan kinerja dan capaian positif sektor perikanan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah volume produksi perikanan setiap tahun, terdiri dari perikanan hasil tangkapan, perikanan hasil budi daya, dan rumput laut.

Satuan: Juta ton.

Judul Publikasi/Sumber Data: Statistik Kelautan dan Perikanan (Statistik KKP)

Tautan Publikasi/Sumber Data: statistik.kkp.go.id

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Produksi garam

Institusi Penghasil: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Definisi

Produksi garam adalah garam yang dihasilkan oleh petambak garam rakyat serta perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil garam (PT Garam). Garam merupakan bahan penting dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, industri kimia, pengawetan makanan, dan banyak penggunaan lainnya.

Interpretasi:

1. Peningkatan produksi garam menunjukkan produktivitas lahan garam, kinerja petambak garam serta kinerja perusahaan penghasil garam yang positif.

2. Penurunan produksi garam mengindikasikan masalah dalam kegiatan produksi garam yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan petambak garam serta penurunan kinerja perusahaan penghasil garam.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah volume produksi garam setiap tahun.

Ukuran/Satuan: Juta ton.

Judul Publikasi/Sumber Data: Statistik KKP.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *statistik.kkp.go.id*

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Nilai tukar nelayan (NTN)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b). Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Secara konseptual, NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.

Indeks Harga yang diterima nelayan (I_t) dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan nelayan. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap.

Indeks yang dibayar nelayan (I_b), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap.

Interpretasi:

1. $NTN > 100$: Nelayan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar;
2. $NTN = 100$: Nelayan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar;

3. NTN < 100 : Nelayan subsektor perikanan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Metode/Rumus Penghitungan

Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

$$NTN = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

NTN : Nilai Tukar Nelayan

I_t : Indeks harga yang diterima nelayan

I_b : Indeks harga yang dibayar nelayan

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Badan Pusat Statistik;
2. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcxMyMy/ntn--nilai-tukar-nelayan--menurut-subsektor--2018-100-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

SASARAN 1: Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi



Indikator :

Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan

Institusi Penghasil: Bank Indonesia

Definisi

Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan mengukur sejauh mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari perbankan dalam suatu wilayah atau negara.

Interpretasi:

Rasio yang tinggi umumnya dianggap sebagai tanda positif, menunjukkan dukungan kuat terhadap UMKM, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi keuangan. Rasio yang rendah dapat memicu kebijakan perbaikan dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan.

Metode/Rumus Penghitungan

Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (%) = $(\text{Total Kredit UMKM} / \text{Total Kredit Perbankan}) \times 100$

Dalam rumus ini:

Total Kredit UMKM adalah jumlah total kredit yang diberikan kepada UMKM oleh lembaga perbankan dalam suatu wilayah atau negara.

Total Kredit Perbankan adalah jumlah total kredit yang diberikan oleh seluruh sektor perbankan dalam wilayah atau negara yang sama.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI).

Tautan Publikasi/Sumber Data:

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan (data Bank Indonesia).

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Pertumbuhan wirausaha

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik (diolah oleh Dit. Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas)

Definisi

Pertumbuhan wirausaha digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan jumlah orang berwirausaha. Pertumbuhan wirausaha dihitung berdasarkan perubahan jumlah orang berwirausaha antarperiode tahunan (wirausaha = penduduk usia di atas 15 tahun yang berusaha sendiri dan dibantu buruh tetap).

Interpretasi:

Persentase pertumbuhan wirausaha yang tinggi dianggap sebagai tanda positif yang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang menjadi wirausaha meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat menarik minat para angkatan kerja untuk menjadi wirausaha.

Metode/Rumus Penghitungan

Pertumbuhan wirausaha

$$= \frac{\text{Jumlah wirausaha tahun } n - \text{jumlah wirausaha tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wirausaha tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0lkeadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Kontribusi koperasi terhadap PDB

Institusi Penghasil: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Definisi

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor koperasi.

Interpretasi:

Persentase kontribusi koperasi terhadap PDB yang tinggi menunjukkan signifikansi kontribusi koperasi terhadap PDB Indonesia. Sementara itu, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya optimalisasi peran koperasi dalam memberi manfaat bagi masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

PDB yang disumbangkan oleh koperasi dan UKM dibagi total PDB.

$$\text{Kontribusi koperasi terhadap PDB} = \frac{\text{PDB yang disumbangkan oleh koperasi}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tautan Publikasi/Sumber Data: https://ppid.kemenkopukm.go.id/?page_id=6358

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi



SASARAN 1: Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi



Indikator :

Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

PDB industri pengolahan nonmigas pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan.

Interpretasi:

Jika hasilnya positif, maka menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan pertumbuhan industri pengolahan dalam periode waktu tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Pertumbuhan PDB industri nonmigas dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun ke-t terhadap nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan PDB industri nonmigas =

$$\frac{\text{Nilai tambah industri pengolahan nonmigas tahun } t - \text{nilai tambah industri pengolahan nonmigas } (t-1)}{\text{Nilai tambah industri pengolahan nonmigas } (t-1)} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja 2021, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://metrokota.bps.go.id/indicator/52/40/1/laju-pertumbuhan-menurut-lapangan-usaha.html>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan nonmigas.

Interpretasi:

Jika hasilnya positif, maka menunjukkan kontribusi industri pengolahan nonmigas, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan kontribusi industri pengolahan dalam periode waktu tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas dilakukan dengan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas dibagi nilai PDB nasional dikalikan 100 persen.

$$\text{Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas} = \frac{\text{nilai tambah industri pengolahan nonmigas}}{\text{nilai PDB nasional}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja 2021, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://metrokota.bps.go.id/indicator/52/40/1/laju-pertumbuhan-menurut-lapangan-usaha.html>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Nilai tambah ekonomi kreatif**

Institusi Penghasil: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Definisi

Nilai tambah ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Fashion; (6) Film, Animasi, Video; (7) Fotografi dan Periklanan; (8) Kriya; (9) Kuliner; (10) Musik; (11) Aplikasi; (12) Pengembangan Permainan; (13) Penerbitan; (14) Periklanan; (15) TV dan Radio; (16) Seni Pertunjukan; dan (17) Seni Rupa.

Indikator ini membantu untuk mengukur dan memahami kontribusi ekonomi kreatif dalam menciptakan nilai tambah dalam perekonomian suatu negara atau wilayah. Hal ini berguna dalam menilai dampak ekonomi dari sektor kreatif, seperti seni, desain, hiburan, dan inovasi, serta dalam merencanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Interpretasi:

Mengukur kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap nilai tambah ekonomi secara keseluruhan.

Metode/Rumus Penghitungan

Total nilai yang bersumber dari 17 subsektor ekonomi kreatif.

Ukuran/Satuan: Triliun rupiah.

Judul Publikasi/Sumber Data

Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://tasransel.kememparekraf.go.id/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2023-2024/show>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah tenaga kerja industri pengolahan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Tenaga kerja di sektor industri pengolahan menggambarkan kemampuan sektor industri pengolahan untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan.

Interpretasi:

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan.

Metode/Rumus Penghitungan

$PB_{\text{industri pengolahan}} = \text{Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang)}$.

Ukuran/Satuan: Juta orang.

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2INDQ4Izl=ljumlah-tenaga-kerja-menurut-2-digit-kbli--orang-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kontribusi tenaga kerja di sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja menunjukkan peran sektor industri pengolahan kepada keseluruhan lapangan kerja.

Interpretasi:

Perubahan dalam kontribusi tenaga kerja di sektor industri dapat mencerminkan pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan sektor industri, dan tingkat industrialisasi suatu negara. Analisis lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami implikasi dari perubahan dalam kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\%PB_{\text{industri_pengolahan}} = \frac{PB_{\text{industri_pengolahan}}}{PB} \times 100\%$$

Keterangan:

$\%PB_{\text{industri_pengolahan}}$: Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja (%)

$PB_{\text{industri_pengolahan}}$: Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang)

PB : Jumlah penduduk yang bekerja (juta orang)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/INDQ4Izl=Jumlah-tenaga-kerja-menurut-2-digit-kbli--orang-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah tenaga kerja pariwisata**

Institusi Penghasil: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Definisi

Tenaga kerja di sektor pariwisata menggambarkan kemampuan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata. Sektor pariwisata terdiri dari subsektor jasa restoran; jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan; jasa angkutan udara; dan jasa perhotelan.

Interpretasi: Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata

Metode/Rumus Penghitungan

$$PB_{\text{pariwisata}} = \text{Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata (juta orang)}$$

Ukuran/Satuan: Juta orang.

Judul Publikasi/Sumber Data: Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemenparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/statistik-tenaga-kerja-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2018-2021>.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif**

Institusi Penghasil: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Definisi

Tenaga kerja di sektor pariwisata menggambarkan kemampuan sektor ekonomi kreatif untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif terdiri dari subsektor pengembang permainan; kriya; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fesyen; kuliner; film, animasi dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; arsitektur; periklanan; seni pertunjukan; penertiban; dan aplikasi.

Interpretasi: jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif

Metode/Rumus Penghitungan

$PB_{\text{ekonomi_kreatif}}$ = Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang)

Judul Publikasi/Sumber Data

Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Ukuran/Satuan: Juta orang.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://tasransel.kememparekraf.go.id/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2023-2024/show>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Nilai realisasi PMA dan PMDN**

Institusi Penghasil: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Definisi

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Interpretasi:

Nilai realisasi PMA dan PMDN adalah indikator penting dalam mengukur aliran modal ke dalam perekonomian suatu negara. Peningkatan nilai investasi dari kedua kelompok tersebut dapat menunjukkan minat investor asing dan dalam negeri dalam memperluas kegiatan usaha mereka di negara tersebut. Ini juga dapat memberikan informasi tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Analisis lebih lanjut biasanya diperlukan untuk memahami dampak dari perubahan nilai investasi ini terhadap ekonomi dan sektor-sektor tertentu

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai realisasi PMA dan PMDN dihitung dari PMA dikalikan (Kurs) ditambah dengan PMDN.

$$\text{Nilai realisasi PMA dan PMDN} = \text{PMA} \times (\text{kurs}^*) + \text{PMDN}$$

*)Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ukuran/Satuan: Triliun rupiah.

Judul Publikasi/Sumber Data

NSWI (National Single Window for Investment), Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Laporan Perkembangan Realisasi Investasi, dan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
2. <https://www.bkpm.go.id/en/infopress-release>
3. <https://ppid.bkpm.go.id>

Tahun Data Tersedia: 2019 dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan**

Institusi Penghasil: Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

Definisi

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. PMA dan PMDN Industri Pengolahan adalah total PMA PMDN pada 12 sektor industri berdasarkan 23 sektor ekonomi (dalam rilis data BPS) atau sama dengan PMA PMDN sektor sekunder (istilah yang digunakan dalam rilis Kementerian Investasi/BKPM).

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Interpretasi:

Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana industri pengolahan dalam suatu negara menarik minat investasi, baik dari investor asing (PMA) maupun investor dalam negeri (PMDN). Peningkatan nilai realisasi investasi ini dapat mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan sektor industri pengolahan, yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami dampak dari perubahan dalam nilai realisasi ini terhadap perekonomian dan industri pengolahan.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan dihitung dari PMA 12 sektor industri dikalikan (Kurs) ditambah dengan total PMDN 12 sektor industri.

$$\begin{aligned} &\text{Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan} \\ &= \text{PMA 12 sektor industri} \times (\text{kurs}) + \text{total PMDN 12 sektor industri} \end{aligned}$$

*Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari Kementerian Investasi/BKPM.

Ukuran/Satuan: Triliun rupiah.

Judul Publikasi/Sumber Data

NSWI (National Single Window for Investment), Kementerian Investasi/BKPM, Laporan Perkembangan Realisasi Investasi, dan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
2. <https://www.bkpm.go.id/en/infopress-release>
3. <https://lppid.bkpm.go.id>

Tahun Data Tersedia: 2019 dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :**

Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Pertanian

Definisi

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan sub dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada komponen penyusun PDB.

Interpretasi:

Pertumbuhan positif menunjukkan pertumbuhan subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian sementara jika pertumbuhannya negatif, itu menunjukkan penurunan subsektor tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Penghitungan

Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dihitung dari perbandingan antar periode (Q to Q dan Y on Y) PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian atas dasar harga konstan.

$$\Delta PDB = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100$$

Keterangan

ΔPDB : Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian

PDB_t : PDB harga konstan tahun ini

PDB_{t-1} : PDB harga konstan tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Berita Resmi Statistik
2. Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2000>
2. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=16>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan dan Tahunan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 7: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

SASARAN 1: Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)



Indikator :

Neraca perdagangan barang

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Neraca perdagangan barang adalah selisih antara nilai ekspor barang dan impor barang suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu.

Interpretasi:

Angka positif menunjukkan terjadinya surplus, atau nilai ekspor yang lebih besar daripada nilai impor, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya defisit, atau nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor.

Metode/Rumus Penghitungan

Neraca Perdagangan = Ekspor - Impor

Ukuran/Satuan: Miliar US\$.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja, Kementerian Perdagangan, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease>

Tahun Data Tersedia: 2002-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.

**Indikator :****Pertumbuhan ekspor nonmigas**

Unit Kerja Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Indikator Pertumbuhan Ekspor Nonmigas adalah penting dalam menganalisis sektor ekspor nonmigas suatu negara, mengukur pertumbuhan ekonomi, dan mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan. Metadata membantu pengguna data untuk memahami definisi dan konteks di balik indikator ini.

Interpretasi:

Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor nonmigas dalam periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor nonmigas dalam periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Metode/Rumus Penghitungan

$$Y_t = \frac{XNM_t - XNM_{t-1}}{XNM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y_t : Pertumbuhan ekspor nonmigas
 XNM_t : Nilai ekspor nonmigas tahun ke t
 XNM_{t-1} : Nilai ekspor nonmigas tahun ke t-1

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/lid/pressrelease>

Tahun Data Tersedia: 2002-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan:

Bulanan (Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik), tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah wisatawan mancanegara**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Jumlah kunjungan dari wisatawan yang berasal dari mancanegara atau luar wilayah daerah kekuasaan Indonesia. Mengukur preferensi wisatawan dari berbagai kebangsaan terhadap obyek wisata di Indonesia sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perbaikan kebijakan pariwisata dan kemajuan pariwisata di Indonesia. Menjadi dasar bagi pengukuran penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Interpretasi:

Semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia digambarkan melalui bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah orang/wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Ukuran/Satuan: Juta kunjungan.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMY/kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan--kunjungan-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan (Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah kunjungan wisatawan nusantara**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Jumlah kunjungan dari wisatawan yang berasal dari dalam negeri atau dalam wilayah daerah kekuasaan Indonesia, bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja serta secara sukarela kurang dari 6 bulan.

Interpretasi:

Semakin meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara digambarkan melalui bertambahnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah orang/atau wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata.

Ukuran/Satuan: Juta perjalanan.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2IMjIwMSMy/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-provinsi-tujuan--perjalanan-.html>

Tahun Data Tersedia: 2022-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya

**Indikator :****Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi**

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi adalah selisih ekspor produk industri berteknologi tinggi dalam periode waktu tertentu dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk industri berteknologi tinggi diidentifikasi dengan menggunakan klasifikasi teknologi berdasarkan kode SITC rev.3 yang disusun oleh Lall (2000) dan dipublikasikan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Interpretasi:

Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi dapat menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan dalam sektor industri yang berfokus pada inovasi dan teknologi tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekspor dalam sektor ini dapat mengindikasikan daya saing global dan kemampuan untuk memasarkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$Y_t = \frac{XHT_t - XHT_{t-1}}{XHT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Y_t : Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi.

XHT_t : Nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi tahun ke t.

XHT_{t-1} : Nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi tahun ke t-1.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Nilai Ekspor berdasarkan Kode HS 8 Digit, Kementerian Perdagangan;
2. Nilai Ekspor berdasarkan Kode HS 8 Digit, Trademap.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf
2. <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan (lag 2-3 bulan), tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Tingkat inflasi pangan bergejolak

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator tingkat inflasi pangan yang bergejolak adalah data yang mengukur fluktuasi atau perubahan harga bahan makanan dalam sebuah periode tertentu. Tingkat inflasi pangan yang bergejolak bisa mencerminkan ketidakstabilan harga bahan makanan yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat inflasi pangan yang bergejolak meliputi:

1. **Produksi Pangan:** Gangguan dalam produksi bahan makanan seperti cuaca ekstrem, hama, penyakit tanaman, atau gangguan dalam rantai pasokan dapat memengaruhi ketersediaan bahan makanan dan menyebabkan fluktuasi harga.
2. **Permintaan Konsumen:** Perubahan dalam preferensi konsumen atau perubahan dalam tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tertentu juga dapat mempengaruhi harga pangan.
3. **Biaya Produksi:** Naiknya biaya produksi, seperti harga bahan baku, tenaga kerja, atau biaya transportasi, dapat mengakibatkan kenaikan harga produk pangan.
4. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah terkait dengan impor, ekspor, atau regulasi harga pangan dapat memengaruhi stabilitas harga.
5. **Fluktuasi Mata Uang:** Nilai tukar mata uang nasional dapat mempengaruhi harga bahan makanan yang diperdagangkan internasional.
6. **Pasar Dunia:** Harga pangan juga dapat dipengaruhi oleh peristiwa global, seperti kelaparan atau kekurangan pasokan makanan di berbagai negara.

Untuk mengukur tingkat inflasi pangan yang bergejolak, pemerintah dan lembaga ekonomi biasanya menggunakan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index/CPI*) yang mencakup komponen-komponen harga pangan. Data ini digunakan untuk memantau perubahan harga pangan dari waktu ke waktu dan membantu merencanakan kebijakan ekonomi yang sesuai. Inflasi pangan yang tinggi dan bergejolak dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga penting untuk memantau dan mengelolanya dengan cermat.

Interpretasi:

Ketidakstabilan Harga Pangan: Jika tingkat inflasi pangan bergejolak, itu dapat mengindikasikan ketidakstabilan dalam harga pangan. Ketidakstabilan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan cuaca, gangguan dalam rantai pasokan, atau faktor-faktor geopolitik. Hal ini dapat berdampak pada konsumen dan produsen, karena sulit untuk merencanakan anggaran, investasi, atau keputusan bisnis yang solid ketika harga pangan sangat bergejolak.

Dampak pada Ketahanan Pangan: Tingkat inflasi pangan yang bergejolak dapat mengancam ketahanan pangan. Ketika harga pangan naik secara tiba-tiba atau fluktuatif, kelompok-kelompok yang rentan seperti keluarga miskin dan petani kecil mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Pengaruh Inflasi Umum: Tingkat inflasi pangan yang tinggi dan berkejang juga dapat berkontribusi pada inflasi umum dalam perekonomian. Jika harga pangan terus-menerus naik, ini dapat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan, yang kemudian dapat memengaruhi kebijakan moneter dan fiskal serta daya beli masyarakat.

Dampak pada Kebijakan Pemerintah: Pemerintah mungkin harus merespons tingkat inflasi pangan yang berkejang dengan langkah-langkah kebijakan, seperti intervensi dalam pasokan pangan, subsidi pangan, atau kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Kesempatan dan Risiko Investasi: Bagi investor, tingkat inflasi pangan yang berkejang bisa menjadi peluang atau risiko. Investor dalam sektor pertanian atau komoditas pangan mungkin melihat potensi keuntungan dari fluktuasi harga, sementara investor lain mungkin melihat risiko volatilitas yang tinggi.

Metode Perhitungan:

Tingkat Inflasi Pangan = $((\text{Harga Pangan Sekarang} - \text{Harga Pangan Tahun Lalu}) / \text{Harga Pangan Tahun Lalu}) \times 100$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data: bps.go.id

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Bulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 8: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

SASARAN 1: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi



Indikator :

Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kontribusi sektor jasa keuangan yang merupakan komponen penyusun PDB.

Interpretasi:

Hasil dari perhitungan ini akan memberikan Anda persentase kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDB suatu negara. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana sektor jasa keuangan mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDB, yang dapat menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian negara tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai persentase kontribusi PDB yang bersumber dari sektor jasa keuangan.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html>.

Tahun Data Tersedia: 2010-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Rasio Uang Beredar M2/PDB

Institusi Penghasil:

1. Bank Indonesia
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Rasio M2 (uang beredar) terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah indikator yang mengukur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dibandingkan dengan total *output* ekonomi (PDB). Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana jumlah uang yang beredar relatif terhadap ukuran ekonomi.

Rasio M2/PDB adalah indikator penting yang digunakan dalam analisis ekonomi dan moneter untuk mengukur likuiditas ekonomi.

Interpretasi:

Tingkat rasio yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa jumlah uang beredar relatif besar dibandingkan dengan ukuran ekonomi, yang dapat berpotensi menyebabkan inflasi. Sebaliknya, tingkat rasio yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya likuiditas dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Rasio Uang Beredar M2/PDB} = \frac{\text{Nilai proporsi M2}}{\text{Nilai PDB}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Sumber Publikasi:

1. Bank Indonesia
2. BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-NOVEMBER-2023.aspx>
2. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/seri-2010--pdb-seri-2010--milyar-rupiah-.html>

Tahun Data Tersedia

M2: 1985-2023;

PDB: 2010-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: M2: Bulanan, PDB: Triwulanan .

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Skor Logistic Performance Index

Institusi Penghasil: Bank Dunia

Definisi

Skor *Logistic Performance Index* (LPI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja logistik suatu negara atau wilayah. Indeks ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan serta kemudahan dalam berdagang.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan LPI dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup beberapa atau semua dari hal berikut:

1. Keandalan rantai pasokan.
2. Kualitas infrastruktur logistik.
3. Kemudahan perlintasan perbatasan.
4. Kemampuan pelacakan dan visibilitas pengiriman.
5. Waktu yang diperlukan untuk impor dan ekspor.
6. Efisiensi bea cukai dan prosedur impor-ekspor.
7. Kualitas layanan logistik.
8. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
9. Kemudahan pembiayaan dan akses ke layanan finansial.

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai LPI, semakin baik kinerja logistik suatu negara. Indeks ini sering digunakan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan bisnis dalam evaluasi dan perencanaan rantai pasokan.

Metode/Rumus Penghitungan:

Skor LPI yang didapatkan berdasarkan data Bank Dunia.

Ukuran/Satuan: Tanpa Satuan.

Judul Publikasi/Sumber Data: *Full LPI Dataset*, The World Bank.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://lpi.worldbank.org>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Dua sampai Tiga Tahun Sekali.

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum: Ya.



Indikator :

Peringkat *Travel And Tourism Development Index*

Institusi Penghasil: World Economic Forum

Definisi

*Travel and Tourism Competitiveness Index (TTDI) atau dulu dikenal dengan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang terdapat pada Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) setiap 2 tahun sekali, memberikan gambaran posisi Indonesia di pasar global terkait daya saing kepariwataannya. Indeks ini dikeluarkan oleh WEF, yang di dalamnya terdapat indikator-indikator kebijakan suatu negara yang memungkinkan pengembangan berkelanjutan dari sektor perjalanan (*travel*) dan pariwisata, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pengembangan dan daya saing suatu negara. TTCI menyediakan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 subindeks yang membentuk nilai TTCI. Subindeks pertama yaitu *enabling environment*, subindeks kedua yaitu *travel and tourism policy and enabling conditions*, subindeks ketiga yaitu *infrastructure*, dan subindeks keempat yaitu *natural and cultural resources*.*

Interpretasi:

Skor TTDI keseluruhan berkisar dari 1 hingga 7 di mana 1 = terburuk dan 7 = terbaik, skor yang didapatkan mendekati 7 mendapatkan penilaian terbaik dan begitupun sebaliknya. Skor tersebut diurutkan berdasarkan peringkat, semakin tinggi peringkat semakin baik begitupun sebaliknya.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai peringkat yang didapatkan dari World Economic Forum (WEF) setiap 2 tahun sekali.

Ukuran/Satuan: Peringkat.

Judul Publikasi/Sumber Data: World Economic Forum

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Dua tahun sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration*)****Institusi Penghasil:** Kementerian Keuangan**Definisi**

Indikator ini mengukur progres pencapaian penyelesaian *core tax* yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dengan mengacu pada progres penyelesaian rangkaian aktivitas pembangunan *core tax* dari tahun 2021-2024. Rumusan ini telah memperhatikan metode baru pembangunan *core tax* di mana pembangunan *core tax* tidak lagi dilaksanakan per modul, namun per tahapan.

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai indikator, semakin tinggi progres pencapaian penyelesaian *core tax*.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode/Rumus Penghitungan yang digunakan yaitu (total bobot penyelesaian aktivitas tahun 20xx dibagi dengan total bobot seluruh aktivitas tahun 2021- 2024) x 100%.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2023.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara**

Institusi Penghasil: Kementerian Keuangan

Definisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan *mandatory* dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 yang menetapkan target berupa penurunan atas *yield* surat berharga negara (SBN) pemerintah. Pada tahun 2021, ditetapkan target IKU adalah sebesar 7,29% (lebih rendah 0,01% dari *baseline* tahun 2019 sebesar 7,3% dan lebih rendah 0,82% dari target *yield* tahun 2020 sebesar 8,11%).

Tenor SBN yang menjadi objek pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Surat Utang Negara (SUN): 5, 10, 15 dan 20 tahun
- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): 2, 4, 13 dan 25 tahun

Realisasi WAY diukur dari hasil penerbitan dengan metode lelang selama satu tahun.

Interpretasi:

Yield Surat Berharga Negara (SBN) domestik Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan profil serupa di Asia Tenggara maupun di kelompok *Emerging Markets* (EMs) lainnya. Apabila *Yield* SBN terlalu tinggi, akan berimplikasi pada sejumlah kondisi, termasuk diantaranya menambah beban pembayaran bunga pemerintah sebagai penerbit SBN. *Yield* SBN yang menurun akan memberikan efisiensi anggaran bagi pemerintah terutama dapat mengurangi beban pembayaran bunga.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Imbal hasil (yield) surat berharga negara} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi WAY SBN}}{\text{Target WAY SBN}} \right) \right] \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2020.pdf>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat**

Institusi Penghasil: Kementerian Keuangan

Definisi

Mengukur rasio TKD berbasis kinerja tahun berjalan yang diukur berdasarkan realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja atas 5 (lima) jenis dana, yaitu:

1. DAK Fisik; 2. DAK Non Fisik; 3. DBH CHT; 4. DID; dan 5. Dana Desa

Interpretasi:

Semakin tinggi nilai indikator Rasio TKD yang berbasis kinerja, menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat =

$$\left[\frac{\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKD}} \times \text{bobot } 50\% \right]$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemenkeu.go.id/medial18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2023.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas****Institusi Penghasil:**

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Definisi

Mengukur jumlah publikasi/laporan tahunan terkait statistik bidang ekonomi dan sosial:

1. *Database* atau publikasi statistik wisatawan nusantara;
2. *Database* atau publikasi statistik wisatawan mancanegara;
3. *Database* atau publikasi *tourism satellite account*;
4. *Database* atau publikasi statistik ekonomi kreatif;
5. *Database* atau publikasi statistik *e-commerce*;
6. *Database* atau publikasi statistik tanaman pangan;
7. *Database* atau publikasi statistik tanaman pangan dengan KSA;
8. *Database* atau publikasi sensus pertanian (2022-2024);
9. *Database* atau publikasi Level Estimasi PMTB (2023-2024);
10. *Database* atau publikasi Sensus Ekonomi 2026 (2024)*.

*Publikasi/Laporan/Database dikumpulkan secara periodik

Interpretasi:

Publikasi/Laporan statistik yang diterbitkan, akan memberikan informasi kepada pengguna terkait kumpulan dataset statistik bidang ekonomi dan sosial. Semakin konsisten jumlah publikasi/laporan statistik yang diterbitkan, maka menunjukkan database statistik tersebut tersedia secara berkelanjutan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah publikasi tahunan beserta *data set* yang dipublikasikan oleh BPS dan atau Kemenparekraf/Baparekraf.

Ukuran/Satuan: *Database*.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/publication.html>
2. <https://kemenparekraf.go.id/publikasi-statistik-ekonomi-kreatif> dan <https://kemenparekraf.go.id/statistik-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>

Tahun Data Tersedia: 2020-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Mengembangkan Wilayah
Untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan**

**JUMLAH
INDIKATOR PN**

6

**JUMLAH
INDIKATOR PP**

21



PRIORITAS NASIONAL 2





**METADATA INDIKATOR
PEMBANGUNAN**

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan



SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)



Indikator :

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Kawasan Timur Indonesia (Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB KTI tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB KTI tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan: persen (%)/tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum : Ya.



Indikator :

IPM KTI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di KTI dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS. 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin KTI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Penduduk miskin KTI adalah penduduk KTI yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Persentase penduduk miskin KTI} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin KTI}}{\text{Jumlah penduduk KTI}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan : Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 semester 1 (Maret).

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)



Indikator :

Laju pertumbuhan PDRB KBI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Jawa-Bali) dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB KBI tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB KBI tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%)/tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIjHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM KBI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di KBI dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

- IPM

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan : Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022, BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin KBI

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin KBI adalah penduduk KBI yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Persentase penduduk miskin KBI} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin KBI}}{\text{Jumlah penduduk KBI}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/IMTKyZl=lpersentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester 1 (Maret).

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**PROGRAM PRIORITAS 1: Pembangunan Wilayah Sumatera**

SASARAN 1: Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera

**Indikator :**

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Sumatera dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Sumatera tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Sumatera tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkIMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM Provinsi di Wilayah Sumatera

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Sumatera adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Sumatera dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

- IPM

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan : Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Sumatera adalah penduduk Wilayah Sumatera yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase Penduduk Miskin Wilayah Sumatera

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Sumatera}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Sumatera}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**PROGRAM PRIORITAS 2: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali**

SASARAN 1: Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali

**Indikator :**

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Jawa-Bali dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Jawa-Bali tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Jawa-Bali tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkJMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Jawa-Bali adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Jawa-Bali dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali adalah penduduk Wilayah Jawa-Bali yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa Bali

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Jawa Bali}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Jawa Bali}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/IMTkylzl=lpersentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**PROGRAM PRIORITAS 3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara**

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara

**Indikator :**

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Nusa Tenggara dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Nusa Tenggara tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Nusa Tenggara tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Nusa Tenggara adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Nusa Tenggara dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara adalah penduduk Wilayah Nusa Tenggara yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran..

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Nusa Tenggara}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/IMTKyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester I (Maret).

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan



Indikator :

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Kalimantan dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Kalimantan tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Kalimantan tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Kalimantan adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Kalimantan dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Kalimantan adalah penduduk Wilayah Kalimantan yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Kalimantan}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Kalimantan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester I (Maret).

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 5: Pembangunan Wilayah Sulawesi

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi



Indikator :

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Sulawesi dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Sulawesi tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Sulawesi tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi**

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Sulawesi adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Sulawesi dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan: Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Sulawesi adalah penduduk Wilayah Sulawesi yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran..

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Sulawesi}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Sulawesi}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester I (Maret).

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 6: Pembangunan Wilayah Maluku

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku



Indikator :

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Sulawesi dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Maluku tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Maluku tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

IPM Provinsi di Wilayah Maluku

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Maluku adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Maluku dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Ukuran/Satuan : Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Maluku adalah penduduk Wilayah Papua yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Maluku}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Maluku}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester I (Maret).

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 7: Pembangunan Wilayah Papua

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua



Indikator :

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Papua dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Interpretasi

Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Papua tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Papua tahun sebelumnya

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSeIJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****IPM Provinsi di Wilayah Papua**

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Papua adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Papua dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru.

Interpretasi

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Metode/Rumus Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Ukuran/Satuan : Nilai min-maks.

Judul Publikasi/Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia 2022. BPS 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2023 Semester I (Maret).

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase penduduk miskin Wilayah Papua

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Papua adalah penduduk Wilayah Papua yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Papua} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Papua}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Papua}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ukuran/Satuan : persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi : Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Semester.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

Menciptakan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

JUMLAH
INDIKATOR PN

32

JUMLAH
INDIKATOR PP

69



PRIORITAS NASIONAL 3





METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 3

Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing



SASARAN 1: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan



Indikator :

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

- Institusi Penghasil :**
1. Badan Pusat Statistik (BPS)
 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Definisi

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).

Interpretasi

TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR yang berada di bawah angka 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

Keterangan:

$ASFR_i$: ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke -i

i : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Ukuran/Satuan: Rata-rata kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, Publikasi 2018.
2. Hasil long form Sensus Penduduk 2020, tahun publikasi 2023.
3. Laporan perhitungan indikator kinerja utama BKKBN 2022, Sumber data pendataan keluarga 2022, tahun publikasi 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=sdki-2017-wus-wanita-usia-subur>
2. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/30/2039/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
3. https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=indikator_kinerja_utama_bkkbn2022

Tahun Data Tersedia :

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI): 1991, 1994, 1997, 2002/03, 2007, 2012, 2017

Sensus Penduduk: 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020

Survei Penduduk Antar Sensus (Supas): 1985, 1995, 2005, 2015

Pendataan keluarga (PK)/Updating PK: 2020, 2021, 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Sensus Penduduk (SP) dan SUPAS : 10 tahun sekali

SDKI: Lima tahun sekali

Pendataan keluarga dan updating pendataan keluarga: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Institusi Penghasil : Kementerian Dalam Negeri

Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Jumlah Penduduk pada seluruh usia.

Interpretasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Persentase cakupan kepemilikan NIK menunjukkan jumlah penduduk yang telah sah tercatat dan terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Indikator ini juga mengukur kemampuan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki NIK dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%.

$$\text{Persentase cakupan NIK} = \frac{\text{jumlah penduduk yang memiliki NIK}}{\text{jumlah penduduk seluruh usia}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Portal Sistem Informasi Geografis Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia/Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2019-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**SASARAN 2: Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk****Indikator :**

Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial

Institusi Penghasil :

1. BPJS Kesehatan
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program jaminan sosial.

Interpretasi

Program Jaminan Sosial memberikan perlindungan kepada masyarakat yang aktif mengiur terhadap risiko yang mungkin timbul, salah satunya yaitu risiko kesehatan. Semakin besar cakupan kepesertaan Jaminan Sosial menunjukkan semakin tinggi perlindungan Jaminan Sosial bagi masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100.

$$\text{Proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial} = \frac{\text{jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan.
- (2) Proyeksi penduduk Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

- 1) <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/informasi-publik-diumumkan-secara-berkala?tab=laporan-keuangan>
- 2) <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Tahun Data: 2016-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah

Institusi Penghasil : Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Rumah tangga miskin adalah mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Sedangkan rumah tangga rentan adalah mereka sudah di atas garis kemiskinan namun pendapatannya masih berada di bawah 40%. Bantuan sosial pemerintah rumah tangga miskin dan rentan bersumber pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Interpretasi

(1) Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan mendapatkan yang setidaknya 1 jenis bantuan sosial pemerintah dibagi dengan total rumah tangga miskin dan rentan (40% rumah tangga terbawah) dikalikan 100 persen.

(2) Semakin tinggi proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial menunjukkan efektivitas distribusi bantuan pemerintah dalam menjangkau target sasarannya. Indikator ini penting untuk menilai dampak kebijakan pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin dan rentan serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis bantuan sosial pemerintah dibagi dengan total rumah tangga miskin dan rentan (40% rumah tangga terbawah) dikalikan 100 persen.

Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah =

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis bantuan sosial pemerintah}}{\text{total rumah tangga miskin dan rentan (40\% rumah tangga terbawah)}} \times 100$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tautan Publikasi/Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tahun Data Tersedia: Tahunan. (terakhir 2023).

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Tingkat kemiskinan ekstrem

Institusi Penghasil :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Bank Dunia
3. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Untuk mengukurnya, penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang konsumsinya per hari tidak melebihi ukuran PPP (*Purchasing Power Parity*) dengan cut-off yang disepakati (1,90 PPP atau 2,15 PPP). Pada tahun 2022, 1,90 PPP setara dengan Rp 11.633,2/hari/orang. Standar miskin ekstrem ini digunakan untuk membandingkan target SDGs Goal 1 antar negara. Pada tahun 2022, dengan 2,15 USD PPP kemiskinan ekstrem Indonesia sudah mencapai 2,5%.

Interpretasi

1. Persentase penduduk miskin ekstrem merupakan banyaknya penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan internasional yang diukur dengan Purchasing Power Parity (PPP) yang dapat diperbandingkan antar negara
2. Tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi mengindikasikan tantangan besar dalam mencapai target SDGs Tujuan 1

Metode/Rumus Penghitungan

Proporsi penduduk miskin ekstrem =

jumlah penduduk yang pengeluarannya di bawah 2,15 USD PPP / jumlah penduduk x 100 persen

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Bank Dunia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=ID>

Tahun Data Tersedia: Tahunan. (terakhir 2023).

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 3: Terpenuhiya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan



Indikator :

Angka Kematian Ibu (AKI)

Institusi Penghasil : Badan Pusat Statistik

Definisi

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Interpretasi

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Indikator bersifat negatif.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Keterangan

- AKI : Angka Kematian Ibu (AKI)
- JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu
- JLH : Jumlah kelahiran

Ukuran/Satuan

Per 100.000 kelahiran hidup.

Judul Publikasi/Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://sirusa.bps.go.id/sirusalindex.php/indikator/80>
- (2) <https://sirusa.bps.go.id/sirusalindex.php/indikator/1962>
- (3) https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3/1

Tahun Data Tersedia

2017, 2010, 2015, 2020

Level Estimasi

1. Nasional dan regional/pulau;
2. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggunakan “jumlah kasus kematian ibu”.

Frekuensi Pengumpulan

1. Sensus Penduduk (SP): 10 tahun sekali;
2. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Angka Kematian Bayi (AKB)**

- Institusi Penghasil :**
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- 70 sangat tinggi,
- 40-70 tinggi,
- 20-39 sedang,
- dan <20 rendah.

Interpretasi

Angka kematian bayi adalah suatu indikator yang mengukur jumlah kematian bayi (anak yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun) dalam suatu populasi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tersebut. Angka ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan dan kualitas perawatan kesehatan ibu dan bayi dalam suatu negara atau wilayah.

Angka kematian bayi adalah salah satu indikator penting dalam bidang kesehatan dan pembangunan manusia. Tingkat yang rendah dari angka kematian bayi biasanya menunjukkan bahwa sistem perawatan kesehatan bayi dan ibu berfungsi baik, akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik tersedia, serta faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian bayi (seperti penyakit menular, malnutrisi, dan kondisi lingkungan yang buruk) dikelola dengan baik.

Peningkatan angka kematian bayi dapat menjadi tanda adanya masalah serius dalam sistem perawatan kesehatan atau kondisi sosial-ekonomi suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, mengurangi angka kematian bayi merupakan tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan ibu.

Metode/Rumus Penghitungan

Cara perhitungan (1)

(1) Metode langsung: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.

$$AKB = \frac{JK < 1th}{JLH} \times 1.000$$

Keterangan

- AKB : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
 JK<1th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu
 JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

(2) Metode tidak langsung: menggunakan model *life table*.

Ukuran/Satuan

Per 1.000 kelahiran hidup.

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://archive.org/details/LaporanSDKI2017/page/n1/mode/2up>

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Regional/pulau;
3. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran);
5. Pendidikan terakhir ibu.

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23**

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi satu dosis imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak.

Interpretasi

Imunisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Pemberian imunisasi juga dapat membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Semakin tinggi cakupan menggambarkan semakin banyak sasaran bayi yang mendapat perlindungan dan kemungkinan akan semakin baik terbentuknya *herd immunity*.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan =

$$\frac{\text{Jumlah bayi umur 12-23 yang mendapat IDL di satu wilayah tertentu selama satu periode}}{\text{Jumlah bayi umur 12-23 bulan yang ada di wilayah dan periode yang sama}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan

Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, Laporan elektronik (ASIK)

Tautan Publikasi/Sumber Data

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Institusi Penghasil : Kementerian Kesehatan

Definisi

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

- a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0
- b. Pendek: *Zscore* ≥ -3,0 s/d *Zscore* < -2,0

Interpretasi

Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:

1. Kekurangan Gizi: *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *stunting*.
4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi *stunting*. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting*.

Metode/Rumus Penghitungan

Cara perhitungan (1)

(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{PAB(5)P } stunting = \frac{\text{JAB(5)P } stunting}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*)
- JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(5)SP \textit{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \textit{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$$

Keterangan

PAB(5) SP *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (*stunting*)

JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

$$\text{Prevalensi } \textit{stunting} = PAB(5) P + PAB(5) SP$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- (2) Studi Status Gizi Balita Indonesia Terintegrasi Susenas 2019
- (3) Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, Tahun publikasi 2020, 2019
- (4) Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>
- (2) <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/event8-02.pdf>
- (3) http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- (4) <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfd088080f2521ff0b4374f.pdf>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur: 0-2 tahun dan 0-4 tahun;
5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan, dan Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita**

Institusi Penghasil : Kementerian Kesehatan

Definisi

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- a. sangat kurus: $Z \text{ score} < -3,0$
- b. kurus: $Z \text{ score} \geq -3,0 \text{ s/d } Z \text{ score} < -2,0$.

Interpretasi

Semakin tinggi prevalensi menandakan bahwa semakin banyak balita yang mengalami masalah gizi secara akut dan kronis. Menjadi penanda bahwa lebih banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhan gizinya dan lebih lanjutnya dapat mengalami gangguan tumbuh kembang. Selain itu, *wasting* juga dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih tinggi pada balita apabila tidak dapat ditangani dengan baik secara cepat. Prevalensi yang tinggi dapat menandakan upaya perbaikan gizi yang belum sepenuhnya optimal, termasuk dalam mendeteksi masalah gizi.

Metode/Rumus Penghitungan

Cara perhitungan kurus/*wasting* (1)

(1) Jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

$$\text{PAB(5)K } \textit{wasting} = \frac{\text{JAB(5)K } \textit{wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) K *wasting* : Prevalensi anak balita yang menderita kurus (*wasting*)
- JAB(5) K *wasting* : Jumlah anak balita yang menderita kurus (*wasting*) pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan sangat kurus/*wasting* (2)

(2) Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dalam satuan persen (%).

$$\text{PAB(5)SK } \textit{wasting} = \frac{\text{JAB(5)SK } \textit{wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) SK *wasting* : Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (*wasting*)

JAB(5) SK *wasting* : Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus (*wasting*) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

$Wasting\ total = PAB(5)\ K\ wasting + PAB(5)\ SK\ wasting$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- (2) Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes, 2018
- (3) Survei Status Gizi Indonesia, 2022

Tautan Publikasi/Sumber Data

- 1) <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>
- 2) http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- 3) <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccdf088080f2521ff0b4374f.pdf>

Tahun Data Tersedia: 2022

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur: 0-2 tahun dan 0-4 tahun;
5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Insidensi Tuberculosis

Institusi Penghasil : Kementerian Kesehatan

Definisi

Tuberculosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologi (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. Insidensi Tuberculosis (ITB) adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.

Interpretasi

Insidensi TBC memberikan gambaran beban penyakit TB dan memberi informasi seberapa banyak jumlah kasus TB baru yang muncul pada setiap tahunnya. Angka insidensi menggambarkan jumlah kasus di populasi, tidak hanya kasus TB yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat (kemiskinan, pendapatan, akses ke layanan kesehatan, gaya hidup, sanitasi lingkungan). Semakin tinggi angka insidensi menunjukkan:

1. Penemuan kasus di populasi yang semakin baik
2. Angka keberhasilan pengobatan rendah yang menyebabkan penyebaran TB di masyarakat masih tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama kemudian dikali 100.000.

$$ITB = \frac{JKTB}{JP} \times 100.000$$

Keterangan

- ITB : Insidensi Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
 JKTB : Jumlah kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu
 JAB(5) : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Ukuran/Satuan: Per 100.000 penduduk.

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Global TB Report, WHO
- (2) Profil Kesehatan Indonesia, 2022

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022>
- (2) <https://www.kemkes.go.id/id/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur: balita dan dewasa.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria****Institusi Penghasil :** Kementerian Kesehatan**Definisi**

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada *vector* malaria di wilayah tersebut sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Interpretasi

Semakin banyak kab/kota yang mencapai eliminasi malaria menunjukkan semakin banyak kab/kota yang mencapai API < 1/100 penduduk, serta menunjukkan adanya penemuan kasus yang lebih banyak di masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satuan tahun.

Ukuran/Satuan: Kabupaten/Kota

Judul Publikasi/Sumber Data

Profil Kesehatan Indonesia 2022, Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta****Institusi Penghasil :** Kementerian Kesehatan**Definisi**

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. Eliminasi kusta berarti angka prevalensi <1/ 10.000 penduduk.

Interpretasi

Jumlah kab/kota yang eliminasi di tahun lalu belum tentu sama dengan tahun berikutnya karena dihitung berdasarkan angka prevalensi kab/kota tersebut pada tahun berjalan. Semakin sedikit jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi menunjukkan bahwa masih adanya kasus tersembunyi di masyarakat yang kemudian ditemukan dan menjadi kasus terdaftar dalam pengobatan, masih banyaknya kasus yang tidak menyelesaikan pengobatan tepat waktu, adanya kesulitan akses ke fasyankes untuk pengobatan, dan perburukan penyakit akibat reaksi kusta.

Metode/Rumus Penghitungan

Eliminasi Kusta dihitung melalui Prevalensi Kusta. Prevalensi kusta adalah jumlah penderita kusta PB dan MB terdaftar atau yang mendapatkan pengobatan pada saat tertentu per 10.000 penduduk.

$$\frac{\text{Jumlah kasus kusta terdaftar pada suatu saat tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada tahun yang sama}} \times 10.000$$

Ukuran/Satuan: Kabupaten/Kota.**Judul Publikasi/Sumber Data**

Profil Kesehatan Indonesia 2022, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/lindonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.**Level Estimasi:** Nasional.**Frekuensi Pengumpulan:** Tahunan.**Apakah Indikator dapat diakses umum:** Ya.

**Indikator :****Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun**

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27 .

Interpretasi

Semakin rendah prevalensi obesitas menunjukkan capaian yang semakin baik. Menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun akan memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka kematian akibat PTM.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk ≥ 18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥ 27 , dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Prevalensi penduduk >18 tahun obesitas =

$$PO_{bes} = \frac{JP_{\geq 18y} O_{bes}}{JP_{\geq 18}} \times 100\%$$

Keterangan

- PO_{bes} : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
- $JP_{\geq 18y} O_{bes}$: Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥ 27 pada waktu tertentu.
- $JP_{\geq 18}$: Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun pada periode waktu yang sama

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2019.

Tautan Publikasi/Sumber Data

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf

Tahun Data Tersedia: 2018.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur.

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun****Institusi Penghasil:** Kementerian Kesehatan**Definisi**

Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang.

Interpretasi

Semakin rendah nilai persentase merokok pada penduduk <18 tahun menunjukkan capaian yang semakin baik. Menurunnya persentase merokok pada penduduk <18 tahun akan memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka kematian akibat PTM.

Metode/Rumus Penghitungan

$$PM10 - 18 = \frac{JP10 - 18yM}{JP10 - 18} \times 100\%$$

Keterangan

- PM10 – 18 : Persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun
- JP10 – 18yM : Jumlah penduduk umur 10 – 18 tahun yang merokok pada waktu tertentu
- JP10 – 18 : Jumlah penduduk umur 10 – 18 tahun pada periode waktu yang sama

Ukuran/Satuan

Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2019.

Tautan Publikasi/Sumber Data

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf

Tahun Data Tersedia: 2018.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur.

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca**

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek membaca peserta didik usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Interpretasi

Rata-rata nilai PISA Indonesia dibandingkan dengan rata-rata nilai PISA dari negara OECD pada aspek membaca. Target pencapaian nilai PISA Indonesia untuk aspek membaca diharapkan setara dengan negara-negara OECD.

Metode/Rumus Penghitungan

Setiap tiga tahun, peserta didik berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: OECD, PISA.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia

2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika**

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek membaca peserta didik usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Interpretasi

Rata-rata nilai PISA Indonesia dibandingkan dengan rata-rata nilai PISA dari negara OECD pada aspek matematika. Target pencapaian nilai PISA Indonesia untuk aspek matematika diharapkan setara dengan negara-negara OECD.

Metode/Rumus Penghitungan

Setiap tiga tahun, peserta didik berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data : OECD, PISA

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia

2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

**Indikator :****Nilai rata-rata hasil PISA: Sains**

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Nilai rata-rata hasil PISA: Sains merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek membaca peserta didik usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Interpretasi

Rata-rata nilai PISA Indonesia dibandingkan dengan rata-rata nilai PISA dari negara OECD pada aspek sains. Target pencapaian nilai PISA Indonesia untuk aspek sains diharapkan setara dengan negara-negara OECD.

Metode/Rumus Penghitungan

Setiap tiga tahun, peserta didik berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: OECD, PISA.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia

2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Interpretasi

Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.

Metode/Rumus Penghitungan

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
- b. SD/Sederajat = 6 tahun;
- c. SMP/Sederajat = 9 tahun;
- d. SM/Sederajat = 12 tahun;
- e. D1/D2 = 14 tahun;
- f. D3 = 15 tahun;
- g. D4 = 16 tahun;
- h. S1 = 17 tahun;
- i. Profesi = 18 tahun;
- j. S2 = 19 tahun;
- k. S3 = 22 tahun.

Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:

- a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1;
- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Rumus:

$$RLS_{15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$

Keterangan:

- P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
- x_i = Lama sekolah penduduk ke- i

Ukuran/Satuan: Tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data

Publikasi Statistik Pendidikan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id>

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Level Estimasi

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Harapan lama sekolah

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Interpretasi

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.

Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode/Rumus Penghitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi pesantren

- E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = jumlah penduduk usia i pada tahun t
 i = usia (7,8, ... , n)

Ukuran/Satuan: Tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id>

Tahun Data Tersedia: 2010-2023.

Level Estimasi

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 4: Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda



Indikator :

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Institusi Penghasil: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Definisi

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan kluster dalam Konvensi Hak Anak.

Interpretasi

Indeks perlindungan anak menunjukkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai kluster pada Konvensi Hak Anak yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Nilai IPA berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IPA maka menunjukkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks kluster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks kluster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator dalam kluster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot kluster dengan indeks kluster.

- Nilai indeks kluster IPA

$$\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Indeks K_j : nilai indeks kluster ke-j
- SX_{ji} : nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi
- N_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j

- Nilai IPA

$$IPA = \sum_{j=1}^S (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

Keterangan:

- IPA : Indeks Perlindungan Anak
- W_j : Bobot kluster ke-j

Ukuran/Satuan: Tanpa satuan

Judul Publikasi/Sumber Data

Indeks Perlindungan Anak Tahun / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3x8MTY3fHxJUEEsSVBIQSxJUEtB>

Tahun Data Tersedia

2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Level Estimasi

- Nasional dan Provinsi (2018 dan 2019),
- Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (2020, 2021, dan 2022).

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

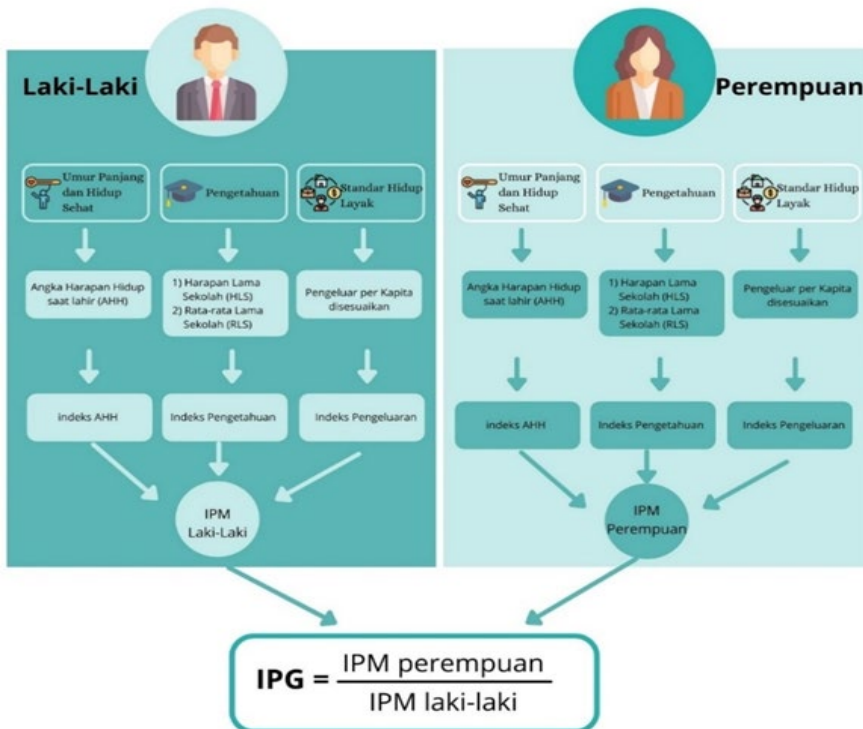
Definisi

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Interpretasi

Nilai IPG yang semakin mendekati 100 menunjukkan capaian pembangunan manusia yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan, dan sebaliknya.

Metode/Rumus Penghitungan



Ukuran/Satuan: Nilai (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Indeks Pembangunan Gender / Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI%253D/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

Tahun Data Tersedia: 2010-2022.

Level Estimasi

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**

Institusi Penghasil: Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan validasi oleh Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah (1) domain pendidikan, (2) domain kesehatan dan kesejahteraan, (3) domain lapangan dan kesempatan kerja, (4) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (5) domain gender dan diskriminasi.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan capaian yang semakin baik

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan IPP dilakukan melalui tahapan:

1. Menetapkan nilai skor/nilai subindeks setiap indikator (nilai transformasi indikator)

$$1) \quad \text{Skor indikator}_{ji} = \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

$$2) \quad \text{Skor indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

2. Menghitung nilai indeks domain

$$\text{Indeks Domain}_{ji} = \frac{\text{skor } X1 + \text{skor } X2 + \dots + \text{skor } Xn}{n} \times 10$$

3. Menghitung nilai IPP

$$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain } 1 + \text{Indeks Domain } 2 + \dots + \text{Indeks Domain } 5}{5}$$

Keterangan:

n : jumlah indikator setiap domain

Ukuran/Satuan: Indeks.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas KOR, Susenas MSBP dan Sakernas.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20KPAPO/Indeks_Pembangunan_Pemuda_2021.pdf

Tahun Data Tersedia

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (publikasi dua tahunan).

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Aset produktif merupakan aset yang dimiliki rumah tangga miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk kegiatan yang mendukung ekonomi produktif dan atau aset yang memiliki nilai tambah (value added). Aset yang dimaksud adalah kepemilikan rumah milik sendiri yang disertai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan aset lainnya seperti kepemilikan aset emas (min10 gr), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan tanah/lahan.

Interpretasi

- (1) Kepemilikan aset seperti rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), emas, kendaraan, dan tanah merupakan indikator kesejahteraan ekonomi. Semakin banyak rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset ini, semakin baik kondisi ekonomi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki kebutuhan dasar, tetapi juga aset yang dapat membantu dalam situasi keuangan yang sulit atau sebagai investasi jangka panjang.
- (2) Aset seperti rumah dan tanah memberikan stabilitas dan keamanan jangka panjang bagi rumah tangga. Ini mengurangi kerentanan terhadap krisis ekonomi atau sosial.
- (3) Aset seperti rumah dan tanah memberikan stabilitas dan keamanan jangka panjang bagi rumah tangga. Ini mengurangi kerentanan terhadap krisis ekonomi atau sosial.

Metode/Rumus Penghitungan

Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki rumah milik sendiri dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan aset lain seperti kepemilikan aset emas (min 10 gr), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan tanah/lahan.

$$\text{Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga di bawah 40\% yang dapat memperoleh aset produktif}}{\text{Total rumah tangga 40\% terbawah}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan

Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tautan Publikasi/Sumber Data

Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tahun Data Tersedia: Tahunan.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpula: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

**SASARAN 6: Meningkatnya produktivitas dan daya saing****Indikator :**

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas

Institusi Penghasil:

1. International Labour Organization (ILO)
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dapat menggambarkan kualitas persediaan tenaga kerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas lapangan kerja yang dapat dimasukinya dan semakin tinggi nilai tambah ekonomi yang dihasilkannya. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dengan jumlah total angkatan kerja dikalikan 100 persen. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pendidikan menengah ke atas didasarkan pada pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah) pada tingkat sekolah menengah atas umum/kejuruan dan perguruan tinggi (diploma dan sarjana).

Interpretasi

Indikator ini menggambarkan kualitas persediaan tenaga kerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik kualitas lapangan kerja yang dapat dimasukinya dan semakin tinggi nilai tambah ekonomi yang dihasilkannya. Tenaga kerja dengan kualifikasi lulusan minimum dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau setingkat dikategorikan sebagai tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke atas. Semakin besar nilai persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, maka angkatan kerja dengan yang berpendidikan menengah ke atas semakin dominan dari seluruh total angkatan kerja yang ada.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\%PAK_{\text{pendidikan menengah ke atas}} = \left(\frac{\sum_{i=4}^7 PAK_i}{\sum_{i=0}^7 PAK_i} \right) \times 100\%; i = 0,1,2,3, \dots, 7$$

Keterangan:

- PAK_i : Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi i (juta orang)
- i = 0 : Tidak/belum pernah sekolah
- i = 1 : Tidak/belum tamat SD
- i = 2 : Sekolah Dasar
- i = 3 : Sekolah Menengah Pertama
- i = 4 : Sekolah Menengah Atas (Umum)
- i = 5 : Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)
- i = 6 : Diploma I/II/III/Akademi
- i = 7 : Universitas

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi**

- Institusi Penghasil:**
1. International Labour Organization (ILO)
 2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dan tinggi. Tenaga kerja berkeahlian tinggi (*skilled labor*) adalah tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Tenaga kerja berkeahlian menengah (*semi-skilled labor*) adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah pekerja dalam jabatan: (1) tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis; (2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; (3) tenaga tata usaha dan yang sejenis; (4) tenaga usaha penjualan; dan (5) tenaga usaha jasa dengan jumlah total pekerja dikali 100%.

Interpretasi

Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dari keseluruhan total pekerja. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sehingga dapat menghasilkan produktivitas tinggi dan produk yang bernilai tambah tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\%PB_{\text{keahlian menengah ke atas}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 PB_i}{\sum_{i=1}^8 PB_i} \right) \times 100\%; i = 1, 2, 3, \dots, 8$$

Keterangan:

- PB_i : Jumlah penduduk yang bekerja dengan jabatan (juta orang)
- $i = 1$: Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
- $i = 2$: Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
- $i = 3$: Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
- $i = 4$: Tenaga Usaha Penjualan
- $i = 5$: Tenaga Usaha Jasa
- $i = 6$: Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- $i = 7$: Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar
- $i = 8$: Lainnya

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 200*

Institusi Penghasil: QS Quacquarelli Symonds

Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat di atas 200 (1-200). Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat, maka semakin tinggi reputasi pendidikan tinggi Indonesia di Tingkat internasional yang diukur melalui QS World University Rankings.

Metode/Rumus Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Adapun pengukuran tahun 2024 menambahkan 3 indikator/metrik baru, yaitu: (a) *Sustainability*; (b) *Employment Outcomes*; dan (c) *International Research Network*. Kesebelas indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Ukuran/Satuan: PT.

Judul Publikasi/Sumber Data

QS World University Rankings 2024: Top global universities oleh QS Quacquarelli Symonds

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum:Ya.

**Indikator :**

Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 300*

Institusi Penghasil: QS Quacquarelli Symonds

Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat 201-300. Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat, maka semakin tinggi reputasi pendidikan tinggi Indonesia di Tingkat internasional yang diukur melalui QS World University Rankings.

Metode/Rumus Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Adapun pengukuran tahun 2024 menambahkan 3 indikator/metrik baru, yaitu: (a) *Sustainability*; (b) *Employment Outcomes*; dan (c) *International Research Network*. Kesebelas indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Ukuran/Satuan: PT.

Judul Publikasi/Sumber Data

QS World University Rankings 2024: Top global universities oleh QS Quacquarelli Symonds

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan:Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 500*

Institusi Penghasil: QS Quacquarelli Symonds

Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat 301-500. Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat, maka semakin tinggi reputasi pendidikan tinggi Indonesia di Tingkat internasional yang diukur melalui QS World University Rankings.

Metode/Rumus Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Adapun pengukuran tahun 2024 menambahkan 3 indikator/metrik baru, yaitu: (a) *Sustainability*; (b) *Employment Outcomes*; dan (c) *International Research Network*. Kesebelas indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Ukuran/Satuan: PT.

Judul Publikasi/Sumber Data

QS World University Rankings 2024: Top global universities oleh QS Quacquarelli Symonds

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Peringkat *Global Innovation Index***

Institusi Penghasil: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Definisi

Global Innovation Index (GII) merupakan peringkat tahunan kinerja ekosistem inovasi di seluruh dunia dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan inovasi serta kesenjangan tertentu dalam metrik inovasi. Untuk mendapatkan gambaran inovasi selengkap mungkin indeks ini menggunakan sekitar 80 indikator, termasuk lingkungan, politik, pendidikan, infrastruktur, dan penciptaan pengetahuan dari setiap sektor ekonomi.

Interpretasi:

Peringkat *Global Innovation Index* (GII) semakin tinggi menunjukkan performa aktivitas riset dan inovasi Indonesia secara internasional.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai GII didapatkan dengan meratakan-ratakan dari skor dari dua sub indeks, yaitu *Innovation Input Sub-Index* dan *Innovation Output Sub-Index*.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Global Innovation Index.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.globalinnovationindex.org/Home>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Peringkat pada Olympic Games**

Institusi Penghasil : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Peringkat Indonesia pada ajang Olympic Games Paris 2024

Interpretasi:

-

Metode/Rumus Penghitungan

Urutan peringkat berdasarkan jumlah perolehan medali mulai dari medali emas, perak dan perunggu dari negara atau tim peserta ajang Olympic Games Paris 2024

Ukuran/Satuan: Peringkat

Judul Publikasi/Sumber Data: Internasional Olympic Committee (IOC).

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://olympics.com/>

Tahun Data Tersedia: 2024

Level Estimasi: Internasional.

Frekuensi Pengumpulan: Empat tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Peringkat pada Paralympic Games

Institusi Penghasil : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Peringkat Indonesia pada ajang Paralympic Games Paris 2024

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Urutan peringkat berdasarkan jumlah perolehan medali mulai dari medali emas, perak dan perunggu dari negara atau tim peserta ajang Paralympic Games Paris 2024

Ukuran/Satuan: Peringkat

Judul Publikasi/Sumber Data: Internasional Paralympic Committee (IPC).

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.paralympic.org/>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Internasional.

Frekuensi Pengumpulan: Empat tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya



PROGRAM PRIORITAS 1: Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

SASARAN 1: Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.



Indikator :

Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

Institusi Penghasil: Kementerian Sosial

Definisi

Indikator ini menyatakan persentase daerah (kabupaten/kota) di Indonesia yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan. Layanan terpadu penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang meliputi 9 (sembilan) program sektor yakni:

- Kesehatan, seperti Program Indonesia Sehat;
- Pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar;
- Sosial dan Ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan;
- Pangan, seperti Program Sembako;
- Energi, antara lain subsidi listrik, subsidi gas;
- Pertanian, seperti subsidi pupuk;
- Perikanan, antara lain asuransi bagi budi daya ikan;
- Perumahan, seperti rumah tinggal layak huni (rutilahu); dan
- Administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, KTP, dan seterusnya.

Interpretasi

- (1) Indikator ini mengukur sejauh mana kabupaten atau kota di Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. SLRT ini mencakup berbagai program sektoral yang bertujuan mengatasi berbagai aspek kemiskinan, dari kesehatan hingga administrasi kependudukan.
- (2) Indikator ini salah satunya mengindikasikan seberapa luas cakupan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak daerah yang aktif terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini mencerminkan komitmen dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan secara holistik.

Metode/Rumus Penghitungan

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Penetapan lokasi melalui peraturan menteri sosial.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Kementerian Sosial.

Tahun Data Tersedia: Tahunan (Terakhir 2023).

Level Estimasi: Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Indikator ini menyatakan persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan. Sistem yang dimaksud dalam konteks ini adalah sistem SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu), yaitu perangkat untuk melakukan diagnosis secara mandiri untuk memperoleh solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Interpretasi

- (1) Indikator ini mengukur seberapa luas penggunaan sistem SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu) di berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia (provinsi, kabupaten, dan kota) dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. SEPAKAT merupakan alat yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang berdasarkan data dan analisis data mendalam terkait dengan isu kemiskinan.
- (2) Persentase tinggi dalam penggunaan sistem ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah proaktif dan sistematis dalam mengatasi masalah kemiskinan, dengan pendekatan yang berbasis bukti dan terukur. Ini mencerminkan kualitas tata kelola pemerintah daerah dan komitmen mereka terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang efisien dan efektif.

Metode/Rumus Penghitungan

Kabupaten/kota yang telah memanfaatkan SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu), yaitu perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi/Sumber Data: *sepatat.bappenas.go.id*

Tahun Data Tersedia: Tahunan. (terakhir 2023).

Level Estimasi: Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

Institusi Penghasil: Kementerian Sosial

Definisi

Indikator ini menyatakan persentase daerah (kabupaten/kota) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan. Data terpadu yang dimaksud yaitu data masyarakat yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS meliputi profil/data dasar warga yang nantinya digunakan sebagai dasar penetapan penerima program bantuan sosial.

Interpretasi

- (1) Indikator ini mengukur seberapa banyak kabupaten atau kota di Indonesia yang secara aktif memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data yang mencakup profil dan data dasar warga, yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial.
- (2) Memperbarui DTKS memastikan bahwa bantuan sosial mencapai warga yang benar-benar memerlukannya, menghindari duplikasi atau penyalahgunaan dana. Selain itu, data terkini membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif untuk program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Persentase tinggi daerah yang melakukan pemutakhiran data DTKS menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola informasi sosial ekonomi. Ini juga mencerminkan kesiapan daerah dalam merespons tantangan sosial secara dinamis dan efektif.

Metode/Rumus Penghitungan

Kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Kementerian Sosial.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://siks.kemensos.go.id/>

Tahun Data Tersedia: Tahunan. (terakhir 2023).

Level Estimasi : Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun

Institusi Penghasil: Kementerian Dalam Negeri

Definisi

Indikator yang mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun. Perbandingan antara banyaknya anak 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak 0-17 tahun, dinyatakan dengan persentase.

Interpretasi

Akta kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun menunjukkan kepemilikan dokumen yang menjadi bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Indikator ini juga mengukur kemampuan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindex)

Metode/Rumus Penghitungan

Metode/Rumus Penghitungan yang digunakan adalah:

$$P\ AKK = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran;
- b. JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran;
- c. JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Portal Sistem Informasi Geografis Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia/Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Indikator ini menyatakan persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan. Pendampingan pembangunan diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Interpretasi

- b. Penerapan standar nasional menjamin bahwa pendamping pembangunan memiliki kualifikasi yang seragam dan kompeten dalam mendukung proyek pembangunan.
- c. Dengan memiliki pendamping yang berkualifikasi, pelaksanaan program pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan rencana.
- d. Pendamping yang berkualitas dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat di berbagai wilayah sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.
- e. Adopsi standar yang sama oleh berbagai kementerian dan lembaga membantu dalam menciptakan sinergi dan keseragaman dalam pendekatan pembangunan.

Metode/Rumus Penghitungan

Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data:

<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/2486>

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: -

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 2: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

SASARAN 1: Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan



Indikator :

Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Institusi Penghasil:

1. BPJS Kesehatan
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Interpretasi

Program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat. Semakin meningkatnya cakupan kepesertaan JKN semakin tinggi perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko kesehatan.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.

$$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan
- (2) Proyeksi penduduk Indonesia

Tautan Publikasi/Sumber Data

- 1) <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/informasi-publik-diumumkan-secara-berkala?tab=laporan-keuangan>
- 2) <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Tahun Data Tersedia: 2016-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas**

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *(perlu menjelaskan maksud indikator terhadap penduduk penyandang disabilitas)*

Interpretasi

- Indikator ini mengukur prevalensi kemiskinan di antara penduduk penyandang disabilitas. Disabilitas di sini mencakup keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Indikator ini penting karena menyoroti seberapa efektif sistem sosial dan ekonomi dalam mengintegrasikan dan mendukung orang-orang dengan disabilitas.
- Tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan penyandang disabilitas dapat menunjukkan beberapa masalah: Keterbatasan Akses ke Pekerjaan, Hambatan dalam Akses Pendidikan dan Pelatihan, Kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, Keterbatasan Akses terhadap Layanan Kesehatan, maupun Keterbatasan dalam Partisipasi Sosial dan Ekonomi.
- Indikator menunjukkan pada pentingnya menciptakan kebijakan dan lingkungan yang inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat dengan kesamaan hak, termasuk kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total penduduk penyandang disabilitas dikalikan 100 persen.

Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Total penduduk penyandang disabilitas}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tautan Publikasi/Sumber Data: Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tahun Data Tersedia : Setiap Tahun (terakhir 2023).

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia**

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Definisi

Lanjut usia merupakan penduduk yang memiliki usia 60 tahun atau lebih.

Interpretasi

- Indikator ini mengukur prevalensi kemiskinan di antara penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih. Tingkat kemiskinan pada kelompok usia ini memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan dukungan sosial yang tersedia bagi populasi lanjut usia.
- Tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan lanjut usia dapat menunjukkan beberapa masalah: Pendapatan dan Tabungan yang Terbatas, Kebutuhan Kesehatan dan Biaya Perawatan, Keterbatasan dalam Akses ke Layanan Sosial dan Perawatan, serta terbatasnya Sistem Pensiun dan Jaminan Sosial bagi lanjut usia.
- Indikator ini menekankan perlunya kebijakan dan program yang efektif untuk mendukung lanjut usia, termasuk jaminan sosial yang memadai, akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, dan dukungan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang layak di usia tua.

Metode/Rumus Penghitungan

Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang usianya 60 tahun ke atas (≥ 60 tahun).

Metode perhitungannya adalah jumlah penduduk lanjut usia yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total penduduk lanjut usia dikalikan 100 persen.

Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Total penduduk}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tautan Publikasi/Sumber Data: Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tahun Data Tersedia

Setiap tahun (terakhir 2023).

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif**

- Institusi Penghasil:**
1. Kementerian PPN/Bappenas
 2. BPK RI
 3. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota)

Definisi

Indikator diambil berdasar hasil Peraturan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip inklusif (seperti ramah disabilitas). (*prinsip inklusif yang dimaksud perlu dijelaskan*)

Interpretasi

- a. Indikator ini mengukur jumlah pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) yang telah menerapkan peraturan daerah yang mempromosikan prinsip inklusif. Prinsip inklusif di sini merujuk pada pembuatan kebijakan dan lingkungan yang memperhatikan dan mendukung kebutuhan semua anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
- b. Prinsip inklusif bisa mencakup, tetapi tidak terbatas pada, aspek-aspek berikut ini aksesibilitas fisik, layanan publik yang inklusif, pendidikan inklusif, kebijakan tenaga kerja inklusif, serta partisipasi sosial.
- c. Persentase tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keragaman dalam masyarakat. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa semua warga, terlepas dari kemampuan atau kondisi mereka, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan layanan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Peraturan Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang terbit dimulai tahun 2019 yang menerapkan prinsip inklusif (sudah mengakomodasi ramah disabilitas).

Persentase dihitung dari jumlah Peraturan Daerah yang terbit dari tahun 2019 dibagi total provinsi dan kabupaten/kota (34 + 514) kemudian dikali 100 persen.

Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif =

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang terbit dari tahun 2019}}{\text{Total provinsi dan kabupaten/kota (34+514)}} \times 100\%$$

**masukan BPS: persentase daerah yang menerapkan prinsip inklusi = jumlah daerah yang menerbitkan peraturan / jumlah provinsi + kabupaten/kota*

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. BPK RI
2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal

Institusi Penghasil:

1. BPJS Ketenagakerjaan
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Cakupan peserta pekerja formal merupakan setiap pekerja formal (pekerja penerima upah dan pekerja jasa konstruksi) yang memiliki paling tidak program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dihitung dari basis kepesertaan semesta pekerja formal. Definisi pekerja formal pada perhitungan adalah segmen peserta Pekerja Penerima Upah dan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan sedangkan semesta pekerja formal adalah proporsi dari jumlah penduduk Indonesia yang ditetapkan sebagai target yang memenuhi syarat yang ditetapkan dari status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja.

Interpretasi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor formal terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Penahapan kepesertaan wajib didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Semakin tinggi cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal menunjukkan semakin tinggi perlindungan terhadap risiko pekerja sektor formal.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah semesta pekerja formal dikali 100%.

Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Formal =

$$\frac{\text{Jumlah peserta PPU} + \text{jumlah peserta Jasa Konstruksi}}{\text{jumlah semesta pekerja formal}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Survei Angkatan Kerja Nasional

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html>
- (2) <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2016-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja informal

Institusi Penghasil:

1. BPJS Ketenagakerjaan
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Cakupan peserta pekerja informal merupakan setiap pekerja informal (pekerja bukan penerima upah) yang memiliki paling tidak program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dihitung dari basis kepesertaan semesta pekerja informal. Definisi pekerja informal pada perhitungan adalah segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP) BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan semesta pekerja informal adalah proporsi dari jumlah penduduk Indonesia yang ditetapkan sebagai target yang memenuhi syarat yang ditetapkan dari status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja.

Interpretasi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Penahapan kepesertaan wajib didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Semakin tinggi cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal menunjukkan semakin tinggi perlindungan terhadap risiko pekerja sektor informal.

Metode/Rumus Perhitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP) BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah semesta pekerja informal dikali seratus.

Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal =

$$\frac{\text{Jumlah peserta PBP}}{\text{Jumlah semesta pekerja informal}} \times 100 \%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Laporan pengelolaan program dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Survei Angkatan Kerja Nasional

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html>
- (2) <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/07/a64afccf38fbf6deb81a5dc0lkeadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>

Tahun Data Tersedia: 2016-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Institusi Penghasil : Kementerian Sosial

Definisi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan perlindungan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu pada program jaminan sosial oleh Pemerintah. Bantuan iuran pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada pekerja miskin dan tidak mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Interpretasi

PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko pekerjaan, seperti kecelakaan kerja dan kematian, bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Semakin tinggi cakupan tersebut menunjukkan semakin tinggi perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu.

Metode/Rumus Penghitungan

Cakupan PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekerja miskin dan tidak mampu yang dibayarkan oleh Pemerintah.

Ukuran/Satuan: Juta Pekerja.

Judul Publikasi/Sumber Data

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 3: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

SASARAN 1: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah



Indikator :

Persentase persalinan di fasyankes

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Kesehatan

Definisi

Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti: rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktik swasta/praktik dokter, dan puskesmas/pustu/polindes.

Interpretasi

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JPM15 - 49} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

- (1) Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- (2) Riskesdas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan
- (3) Survei Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

- (1) <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>
- (2) http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf

Tahun Data Tersedia: 2018, 2020.

Level Estimasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)
4. Pendidikan terakhir ibu.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)

Institusi Penghasil: 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS.

Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Interpretasi

Indikator mCPR menggambarkan tingkat penggunaan kontrasepsi modern dari pasangan usia subur (PUS). Semakin tinggi nilai mCPR menunjukkan demand masyarakat terhadap kontrasepsi yang semakin tinggi yang diharapkan dapat mengurangi kehamilan yang beresiko.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode/Rumus Penghitungan yang digunakan adalah:

$$mCPR = \frac{\text{Jumlah PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Keterangan:

mCPRi : Angka prevalensi PUS yang sedang menggunakan metode KB modern

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan perhitungan indikator kinerja utama BKKBN 2022, Sumber data pendataan keluarga 2022, tahun publikasi 2023
2. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia WUS, 2017

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=indikator_kinerja_utama_bkkbn2022
2. <https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=sdki-2017-wus-wanita-usia-subur>

Tahun Data Tersedia :

1. SDKI : 1991, 1994, 1997, 2002/03, 2007, 2012, 2017
2. Pendataan keluarga/Updating PK: 2020, 2021, 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

SDKI: Lima tahun sekali.

PK/Updating PK: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

- Institusi Penghasil:**
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

Interpretasi

Unmet need KB menunjukkan tingkat kepesertaan ber-KB yang tidak terpenuhi yang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal diantaranya keterbatasan pelayanan keluarga berencana, rendahnya pengetahuan, dan faktor-faktor lain. Unmet need diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mCPR, penurunan TFR dan penurunan AKI yang disebabkan kehamilan yang beresiko. Semakin rendah unmet need semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$Unmet\ Need\ KB_i = \frac{JPURi\ unmet\ need}{JPURi} \times 100\%$$

Keterangan:

- Unmet need* KBi : Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhi.
- JPURi *unmet need* : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.
- JPURi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan perhitungan indikator kinerja utama BKKBN 2022, Sumber data pendataan keluarga 2022, tahun publikasi 2023
2. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia WUS, 2017

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=indikator_kinerja_utama_bkkbn2022
2. <https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmpro=sdki-2017-wus-wanita-usia-subur>

Tahun Data Tersedia :

1. SDKI: 1991, 1994, 1997, 2002/03, 2007, 2012, 2017
2. Pendataan keluarga/Updating PK: 2020, 2021, 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

SDKI: Lima tahun sekali.

PK/Updating PK: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)

- Institusi Penghasil:**
1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
 2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

Interpretasi

Indikator ASFR 15-19 tahun menunjukkan kelahiran di usia remaja. Kelahiran di usia remaja beresiko menyebabkan kematian ibu dan bayi. Semakin rendah ASFR 15-19 tahun semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$ASFR_{15-19} = \frac{JK_{15-19}}{JP_{15-19}} \times 1.000$$

Keterangan:

- ASFR₁₅₋₁₉ : *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)/Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun;
 JK₁₅₋₁₉ : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu;
 JP₁₅₋₁₉ : Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode waktu yang sama.

Ukuran/Satuan

Per 1.000 perempuan di kelompok umur 15-19.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017, Publikasi 2018
2. Hasil *long form* Sensus Penduduk 2020, tahun publikasi 2023
3. Laporan perhitungan indikator kinerja utama BKKBN 2022, Sumber data pendataan keluarga 2022, tahun publikasi 2023

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmprom=sdk-2017-wus-wanita-usia-subur>
2. <https://www.bps.go.id/lid/pressrelease/2023/01/30/2039/hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>
3. https://cis.bkkbn.go.id/latbang/?wpdmprom=indikator_kinerja_utama_bkkbn2022

Tahun Data Tersedia :

SDKI: 1991, 1994, 1997, 2002/03, 2007, 2012, 2017

Sensus Penduduk: 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020

Supas: 1985, 1995, 2005, 2015

Pendataan keluarga/*Updating* PK: 2020, 2021, 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

SP dan SUPAS : 10 tahun sekali,

SDKI: Lima tahun sekali,

Pendataan keluarga dan *updating* pendataan keluarga: Tahunan..

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama. *Treatment Coverage* menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program.

Interpretasi

Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (*TBC Treatment Coverage*) merupakan indikator yang sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran layanan Penemuan dan pengobatan pasien TBC dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mencegah terjadinya kebal obat. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TBC yang ditemukan dan mendapat layanan pengobatan yang dilaporkan ke program. Indikator ini juga memberikan gambaran upaya dalam menemukan pasien TBC melalui serangkaian kegiatan penjarangan terduga TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi dan tipe pasien dan dilanjutkan pengobatan sampai sembuh sehingga tidak menular penyakit TBC ke orang lain.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC =

$$\frac{\text{Jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu}}{\text{Perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Sistem Informasi TB (SITB), Kementerian Kesehatan.

Profil Kesehatan Indonesia, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://tbindonesia.or.id/pustaka-tbc/dashboard-tb/>
2. <https://www.kemkes.go.id/lid/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia : 2022.

Level Estimasi: Provinsi, dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Insidensi HIV**Institusi Penghasil:** Kementerian Kesehatan**Definisi**

Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun selama periode waktu tertentu. Angka ini menggambarkan jumlah infeksi baru yang terjadi di populasi, baik pada orang yang menyadarinya, maupun yang tidak menyadarinya dan tidak hanya yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program.

Interpretasi

Semakin tinggi insidensi HIV menunjukkan :

1. Rendahnya kepatuhan ODHIV minum obat secara rutin
2. Penularan yang masih tinggi

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang terkena dan belum terinfeksi HIV (jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun).

$$\text{Insidensi HIV} = \frac{\text{Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun}}$$

Ukuran/Satuan

Per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.

Judul Publikasi/Sumber Data

Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Buku_RAN_AIDS_2024_REV_12_1_21.pdf

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Triwulanan, Tahunan, dan Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Indikator ini penting untuk menilai kualitas tatalaksana penderita dan kepatuhan penderita kusta dalam minum obat. Penyelesaian Pengobatan Kusta Tepat Waktu disebut juga *Relapse From Treatment* (RFT). RFT dapat dinyatakan setelah dosis dipenuhi tanpa diperlukan pemeriksaan laboratorium.

Interpretasi

Indikator menunjukkan kepatuhan pengobatan penderita kusta. Penyelesaian pengobatan kusta tepat waktu penting untuk mengurangi kecacatan. Monitoring secara semi aktif survey (SAS) selama pengobatan ataupun pasca pengobatan dilakukan untuk memastikan kasus kusta diobati sampai sembuh serta guna menghindari terjadinya cacat selama pengobatan ataupun pasca pengobatan.

Metode/Rumus Penghitungan

Terdapat dua perhitungan RFT yang meliputi

(1) RFT Penderita MB*

Jumlah penderita kusta MB dari periode *kohort* satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan).

$$\frac{\text{Jumlah kasus baru MB yang menyelesaikan 12 dosis dalam 12-18 bulan}}{\text{Jumlah seluruh kasus baru MB yang memulai MDT pada periode kohort tahun yang sama}} \times 100\%$$

(2) RFT Penderita PB*

Jumlah kasus baru PB dari periode *kohort* satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan).

$$\frac{\text{Jumlah kasus baru PB yang menyelesaikan 12 dosis dalam 12-18 bulan}}{\text{Jumlah seluruh kasus baru PB yang memulai MDT pada periode kohort tahun yang sama}} \times 100\%$$

*perlu dijelaskan akronim dari MB dan PB

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Profil Kesehatan Indonesia, 2022, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/lindonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi

Berdasarkan wilayah: Nasional, provinsi; berdasarkan tipe pengobatan: PB, MB.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada *vector* malaria di wilayah tersebut sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Interpretasi

Semakin banyak kab/kota yang mencapai eliminasi malaria menunjukkan semakin banyak kab/kota yang mencapai $API < 1/100$ penduduk, adanya penemuan kasus yang lebih banyak di masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satuan tahun.

Ukuran/Satuan: Kabupaten/Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data

Profil Kesehatan Indonesia, 2022, Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/lid/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah kabupaten/kota sehat

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah Kabupaten/kota yang melaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman, sarana dan prasarana umum, masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan, kawasan pendidikan dan kawasan pasar, memiliki SK Tim Pembina KKS, memiliki SK forum dan rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi.

Interpretasi

Kabupaten/Kota Sehat adalah kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, sehat untuk dihuni, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemda. Penyelenggaraan KKS dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemkab/Pemkot untuk mewujudkan KKS.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah yang menerapkan tatanan kabupaten/kota sehat.

Ukuran/Satuan: Kabupaten/Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data: Profil Kesehatan Indonesia, 2022, Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Institusi Penghasil: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI

Definisi

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Interpretasi

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok.

Ukuran/Satuan: Kabupaten/Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data : Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data:

<https://www.kemkes.go.id/lid/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi:-

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Persentase puskesmas dan klinik pratama yang memenuhi standar akreditasi.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan primer semakin baik

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah puskesmas dan klinik pratama terakreditasi pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dan klinik pratama dikalikan dengan 100%.

Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi =

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas dan klinik pertama terakreditasi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas dan klinik pertama}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Profil Kesehatan Indonesia 2022, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/lid/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase rumah sakit terakreditasi**

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit semakin baik dan lebih mampu untuk menangani beberapa jenis pelayanan kesehatan

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah kumulatif rumah sakit yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan x 100%.

Persentase rumah sakit terakreditasi =

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif rumah sakit yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Profil Kesehatan Indonesia 2022, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/indonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar**

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai standar yaitu dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

Interpretasi

Persentase Puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar yang tinggi mencerminkan:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: persentase puskesmas yang memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan primer (*primary care* dan *primary health care*).
2. Komitmen Pemerintah Daerah: Persentase yang tinggi dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui pemenuhan ketenagaan Puskesmas.
3. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): Persentase yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian UHC, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami hambatan akses.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dihitung melalui jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah puskesmas dikalikan 100 persen.

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Profil Kesehatan Indonesia, 2022, Kementerian Kesehatan

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/lindonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya

Institusi Penghasil: Kementerian Kesehatan

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (dokter spesialis obsetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah) & 3 dokter spesialis (dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik) lainnya sebagai rangka pemenuhan dan peningkatan ketersediaan serta mutu SDM sesuai standar pelayanan kesehatan.

Interpretasi

Persentase RS Pemerintah dengan tenaga medis sesuai standar yang tinggi mencerminkan:

1. Akses Pelayanan Kesehatan: menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik.
2. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah: Persentase yang tinggi dapat mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui pemenuhan ketenagaan RS.
3. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): Persentase yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian UHC, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami hambatan akses.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya dihitung melalui jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya dibagi dengan jumlah RSUD kabupaten/kota dikalikan 100 persen.

Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya =

$$\frac{\text{Jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar \& 3 dokter spesialis lainnya}}{\text{Jumlah RSUD kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Profil Kesehatan Indonesia, 2022, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.kemkes.go.id/id/lindonesia-health-profile-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase obat memenuhi syarat**

Institusi Penghasil: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Definisi

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal, (2) tidak kadaluwarsa, (3) tidak rusak, (4) memenuhi ketentuan label/penandaan, dan (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Interpretasi

capaian indikator yang tinggi mencerminkan obat yang diproduksi dan beredar di masyarakat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase obat memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Ukuran/Satuan

Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.pom.go.id/kinerja/lap>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase makanan memenuhi syarat**

Institusi Penghasil: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Definisi

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kadaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Interpretasi

Capaian indikator yang tinggi mencerminkan makanan yang diproduksi dan beredar di masyarakat memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

Persentase makanan memenuhi syarat =

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.pom.go.id/kinerjallap>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 4 : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas



SASARAN 1: Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas



Indikator :

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20 persen penduduk termiskin dengan APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20 persen penduduk terkaya di mana APK SMA/SMK/MA/Sederajat merupakan jumlah penduduk yang masih sekolah di jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Interpretasi

Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20 persen penduduk termiskin dengan APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20 persen penduduk terkaya menunjukkan seberapa jauh kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk termiskin dan terkaya. Nilai rasio yang diharapkan adalah nilai rasio yang mendekati angka 1, artinya kesenjangan antara kedua kelompok semakin sempit.

- Nilai rasio lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada penduduk termiskin lebih rendah dibanding penduduk terkaya.
- Nilai rasio lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada penduduk termiskin lebih tinggi dibanding penduduk terkaya.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{APK}_{\text{SMA/SMK/MA/Sederajat 20\% termiskin}}}{\text{APK}_{\text{SMA/SMK/MA/Sederajat 20\% terkaya}}}$$

dimana:

$$\text{APK}_{\text{SMA/SMK/MA/Sederajat}} = \frac{E_{\text{SMA/SMK/MA/Sederajat}}}{P_{16-18}} \times 100$$

Keterangan:

$E_{\text{SMA/SMK/MA/Sederajat}}$ = Jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat

P_{16-18} = Jumlah penduduk usia 16-18 tahun

Ukuran/Satuan: Persen (%)

Judul Publikasi/Sumber Data : Publikasi Statistik Pendidikan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/lid>.

Tahun Data Tersedia : 2015-2023

Level Estimasi : Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi dengan jumlah penduduk yang berusia 19 - 23 tahun. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20 persen penduduk termiskin dan terkaya.

Interpretasi

Semakin rasio APK mendekati nilai 1 maka kesenjangan terhadap akses layanan pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya semakin mengecil.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio APK} = \frac{APK_{Ri}}{APK_{Ti}}$$

Keterangan:

1. Rasio APK = Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai) Pendidikan Tinggi
2. APK_{Ri} = APK termiskin (kuintil terendah) di jenjang pendidikan i
3. APK_{Ti} = APK terkaya (kuintil tertinggi) di jenjang pendidikan i

Ukuran/Satuan: Rasio.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik.
2. Diolah oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1444/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-kelompok-pengeluaran.html>

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah asesmen global yang diselenggarakan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* untuk peserta didik berusia 15 tahun. Indikator proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: membaca adalah perbandingan jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang telah mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek membaca (level 2 ke atas) terhadap jumlah seluruh peserta didik Indonesia usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA.

Interpretasi

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca menunjukkan banyaknya peserta didik usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA yang telah mencapai kategori pencapaian level 2 ke atas pada aspek membaca.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi di atas batas kompetensi PISA membaca} = \frac{N_{lv2+}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- N_{lv2+} : Jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek membaca (level 2 ke atas)
- n : Jumlah peserta didik Indonesia berusia 15 tahun yang mengikuti tes PISA

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : OECD, PISA,

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia : 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga Tahun Sekali.
Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah asesmen global yang diselenggarakan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* untuk peserta didik berusia 15 tahun. Indikator proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: matematika adalah perbandingan jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang telah mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek matematika (level 2 ke atas) terhadap jumlah seluruh peserta didik Indonesia usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA.

Interpretasi

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika menunjukkan banyaknya peserta didik usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA yang telah mencapai kategori pencapaian level 2 ke atas pada aspek matematika.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi di atas batas kompetensi PISA matematika} = \frac{N_{lv2+}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- N_{lv2+} : Jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek matematika (level 2 ke atas)
- n : Jumlah peserta didik Indonesia berusia 15 tahun yang mengikuti tes PISA

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : OECD, PISA,

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/lide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia : 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga Tahun Sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains**

Institusi Penghasil: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Definisi

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah asesmen global yang diselenggarakan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* untuk peserta didik berusia 15 tahun. Indikator proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains adalah perbandingan jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang telah mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek sains (level 2 ke atas) terhadap jumlah seluruh peserta didik Indonesia usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA.

Interpretasi

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains menunjukkan banyaknya peserta didik usia 15 tahun yang mengikuti tes PISA yang telah mencapai kategori pencapaian level 2 ke atas pada aspek sains.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi di atas batas kompetensi PISA sains} = \frac{N_{lv2+}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

N_{lv2+} : Jumlah peserta didik berusia 15 tahun yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek sains (level 2 ke atas)

n : Jumlah peserta didik Indonesia berusia 15 tahun yang mengikuti tes PISA

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : OECD, PISA.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.oecd.org/pisa/publications/>
2. <https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/>

Tahun Data Tersedia : 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan : Tiga Tahun Sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi

Institusi Penghasil: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Asesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan mulai tahun 2021 berubah menjadi Asesmen Nasional yang terdiri dari AKM (literasi membaca dan numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk madrasah dan satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Kemampuan literasi adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks.

Interpretasi

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Asesmen Kompetensi: Literasi menunjukkan banyaknya peserta didik yang mencapai kategori minimal level cakap pada aspek literasi membaca.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Proporsi di atas batas kompetensi AK literasi} = \frac{N_{\text{lvcakap+}}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $N_{\text{lvcakap+}}$: Jumlah peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek literasi membaca
- n : Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Asesmen Nasional, Kemendikbudristek.

Tautan Publikasi/Sumber Data : -

Tahun Data Tersedia : 2021, 2022

Level Estimasi : Nasional

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



Indikator :

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi

Institusi Penghasil: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Asesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan disebut dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan mulai tahun 2021 berubah menjadi Asesmen Nasional yang terdiri dari AKM (literasi membaca dan numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk madrasah dan satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Kemampuan numerasi adalah kemampuan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik.

Interpretasi

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam Asesmen Kompetensi: Numerasi menunjukkan banyaknya peserta didik yang mencapai kategori minimal level cakap pada aspek numerasi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Proporsi di atas batas kompetensi AK numerasi} = \frac{N_{\text{lvcakap+}}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $N_{\text{lvcakap+}}$: Jumlah peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek numerasi
- n : Jumlah peserta didik yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Asesmen Nasional, Kemendikbudristek.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia : 2021, 2022.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



Indikator :

Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/ sederajat

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat pada umumnya. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat penyelesaian SD/MI/Sederajat adalah penduduk usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun). Usia yang digunakan dalam indikator tingkat penyelesaian adalah *school age*, yakni usia anak di saat awal tahun pembelajaran, bukan usia saat pencacahan.

Interpretasi

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TPP \text{ SD/MI/Sederajat} = \frac{N_{13-15 \text{ SD/MI/Sederajat}}}{N_{13-15}} \times 100$$

Keterangan:

$N_{13-15 \text{ SD/MI/Sederajat}}$ = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang menyelesaikan jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat

N_{13-15} = Jumlah penduduk usia 13-15 tahun

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Publikasi Statistik Pendidikan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.bps.go.id/lid>

Tahun Data Tersedia : 2015-2023.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/ sederajat**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat pada umumnya. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat penyelesaian SMP/MTs/Sederajat adalah penduduk usia 16 tahun (15 + 1 tahun) sampai dengan 18 tahun (15 + 3 tahun). Usia yang digunakan dalam indikator tingkat penyelesaian adalah *school age*, yakni usia anak di saat awal pembelajaran, bukan usia saat pencacahan.

Interpretasi

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TPP \text{ SMP/MTs/Sederajat} = \frac{N_{16-18 \text{ SMP/MTs/Sederajat}}}{N_{16-18}} \times 100$$

Keterangan:

$N_{16-18 \text{ SMP/MTs/Sederajat}}$ = Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikan

SMP/MTs/Sederajat

N_{16-18} = Jumlah penduduk usia 16-18 tahun

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Publikasi Statistik Pendidikan.

Tautan Publikasi/Sumber Data : <https://www.bps.go.id/lid>

Tahun Data Tersedia : 2015-2023.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Tingkat penyelesaian Pendidikan: SMA/SMK/MA/ sederajat****Institusi Penghasil:** Badan Pusat Statistik**Definisi**

Persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Sederajat yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat pada umumnya. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat adalah penduduk usia 19 tahun (18 + 1 tahun) sampai dengan 21 tahun (18 + 3 tahun). Usia yang digunakan dalam indikator tingkat penyelesaian adalah *school age*, yakni usia anak di saat awal tahun pembelajaran, bukan usia saat pencacahan.

Interpretasi

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TPP \text{ SMA/SMK/MA/Sederajat} = \frac{N_{19-21 \text{ SMA/SMK/MA/Sederajat}}}{N_{19-21}} \times 100\%$$

Keterangan:

$N_{19-21 \text{ SMA/SMK/MA/Sederajat}}$ = Jumlah penduduk usia 19-21 tahun yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/SMK//MA/Sederajat

N_{19-21} = Jumlah penduduk usia 19-21 tahun

Ukuran/Satuan : Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Publikasi Statistik Pendidikan.

Tautan Publikasi/Sumber Data : <https://www.bps.go.id/id>

Tahun Data Tersedia : 2015-2023.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat. Dalam hal ini, pendidikan prasekolah yang dimaksud meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), dan Raudatul Athfal (RA).

Interpretasi

Semakin tinggi Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/Sederajat yang Pernah PAUD maka semakin banyak anak yang memiliki kesiapan dasar memasuki jenjang pendidikan dasar.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Pernah PAUD} = \frac{N_{\text{Kelas 1 SD pernah TK/RA/BA}}}{N_{\text{Kelas 1 SD}}} \times 100$$

Keterangan:

$N_{\text{Kelas 1 SD pernah TK/RA/BA}}$ = Jumlah anak kelas 1 SD/MI/Sederajat yang pernah PAUD (TK/BA/RA)

$N_{\text{Kelas 1 SD}}$ = Jumlah anak kelas 1 SD/MI/Sederajat

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Diolah dari Data Susenas Maret oleh Kementerian PPN/Bappenas

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia : 2015-2023.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun

Interpretasi

Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$APK_{PT} = \frac{JM_{PT}}{JP(19-23)} \times 100\%$$

Keterangan:

- APK_{PT} : Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
- JM_{PT} : Jumlah murid pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3 pada periode tertentu
- JP(19-23) : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

SASARAN 1: Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha.



Indikator :

Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase perempuan dalam rentang umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau hidup bersama pertama sebelum berusia 18 tahun (perkawinan anak).

Interpretasi

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menggambarkan angka perkawinan anak di Indonesia. Semakin tinggi proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, maka perkawinan anak juga semakin tinggi, dan sebaliknya. Indikator ini juga sebagai perwujudan upaya menghapuskan perkawinan anak pada tahun 2030 di Indonesia. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia anak serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$PHB < 18 = \frac{JPBH < 18}{JP (20 - 24)} \times 100\%$$

Keterangan:

- PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JPBH<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor / Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.archive.bps.go.id/indicator/40/1361/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>

Tahun Data Tersedia : 2008-2022.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya

Institusi Penghasil: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Definisi

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya adalah prevalensi terjadinya minimal satu kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, baik kekerasan fisik, seksual atau emosional.

Interpretasi

Semakin tinggi angka prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya maka semakin banyak anak usia 13-17 tahun yang menjadi korban kekerasan. Sebaliknya, semakin rendah angka prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya maka semakin sedikit anak usia 13-17 tahun yang menjadi korban kekerasan

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$PKtAL = \frac{JALK}{JAL} \times 100\% \quad PKtAP = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$$

Keterangan:

PKtAL/PKtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki/perempuan

JALK/JAPK : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam sepanjang hidupnya

JAL/JAP : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3x8MTg3fHxLRUtFUKFTQU4=>

Tahun Data Tersedia : 2018 dan 202.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Interpretasi

Nilai IDG semakin tinggi menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang semakin baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan Keputusan.

Metode/Rumus Penghitungan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung dari rata-rata aritmatik tiga indikator yaitu, proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan, proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan, serta upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan.

Ukuran/Satuan: Nilai

Judul Publikasi/Sumber Data

Indeks Pemberdayaan Gender / Badan Pusat Statistik

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/INDY4IzI%253D/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Tahun Data Tersedia : 2010-2022.

Level Estimasi : Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan yang masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan besarnya tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap penduduk usia kerja perempuan di suatu negara/wilayah. TPAK perempuan yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam memberikan nilai tambah ke ekonomi.

Interpretasi

Semakin tinggi TPAK Perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja perempuan (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Metode/Rumus Penghitungan

$$TPAK_{perempuan} = \frac{PAK_{perempuan}}{P_{perempuan}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PAK_{perempuan}$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (juta orang)

$P_{perempuan}$ = Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan (juta orang)

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin / Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus (Sakernas) oleh BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

Tahun Data Tersedia : 2018-2022.

Level Estimasi : Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir**

Institusi Penghasil: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Definisi

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir adalah prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun yang dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan selama 12 bulan terakhir.

Interpretasi

Semakin tinggi angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir maka semakin banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun selama 12 bulan terakhir. Sebaliknya semakin rendah angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir maka semakin sedikit terjadi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun selama 12 bulan terakhir.

Metode/Rumus Penghitungan

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dihitung dengan jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik dan/atau seksual) yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah perempuan umur 15-64 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://siga.kemennppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOHx8UEVSRU1QVUFOfHwxODZ8fEtFS0VSQVNBtg==>

Tahun Data Tersedia : 2016, 2021.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir sebagai tolok ukur kepedulian pemuda terhadap lingkungan sosial.

Interpretasi

Indikator positif, semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas MSBP

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20KPAPO/Indeks_Pembangunan_Pemuda_2021.pdf

Tahun Data Tersedia : 2015, 2018, 2021.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir.

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir sebagai tolok ukur pemuda dalam berkontribusi kepada masyarakat dalam kegiatan organisasi.

Interpretasi

Indikator positif, semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas MSBP

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20KPAP0/Indeks_Pembangunan_Pemuda_2021.pdf

Tahun Data Tersedia : 2015, 2018, 2021.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.

Interpretasi

Indikator negatif, semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang berusaha dengan jenis jabatan white collar}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas MSBP

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20KPAPO/Indeks_Pembangunan_Pemuda_2021.pdf

Tahun Data Tersedia : 2015, 2018, 2021.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun.

Interpretasi

Indikator negatif, semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan keluhan tersebut mengganggu aktivitas sehari – hari}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Laporan Indeks Pembangunan Pemuda/Susenas MSBP.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20KPAP0/Indeks_Pembangunan_Pemuda_2021.pdf

Tahun Data Tersedia : 2015, 2018, 2021.

Level Estimasi : Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga Tahun Sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 6: Pengentasan Kemiskinan

SASARAN 1: Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan



Indikator :

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang dapat mengakses pendanaan usaha dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Interpretasi

- (1) Indikator ini mengukur seberapa banyak rumah tangga miskin dan rentan yang mendapatkan akses ke pendanaan usaha. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana rumah tangga tersebut dapat memanfaatkan sumber pendanaan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup.
- (2) Pendanaan usaha yang diakses oleh rumah tangga miskin dan rentan meliputi kredit mikro, bantuan pemerintah, program kemitraan, dan pendanaan alternatif lain.
- (3) Persentase tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan akses pendanaan kepada rumah tangga miskin dan rentan berhasil, yang membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan wirausaha. Ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Metode/Rumus Penghitungan

Rumah tangga miskin dan rentan yang dapat mengakses salah satu dari KUR, kredit bank, BPR, koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan *leasing*, KuBe, Bundes dan layanan keuangan lainnya.

Metode perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga di bawah 40\% yang dapat mengakses pendanaan aset}}{\text{Total rumah tangga 40\% terbawah}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tautan Publikasi/Sumber Data: Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tahun Data Tersedia: Tahunan.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah****Institusi Penghasil:**

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang dapat memperoleh akses kepemilikan lahan dalam meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah/lahan baik dari Program Reforma Agraria dan akses penggunaan lahan dari Perhutanan Sosial.

Ukuran/Satuan: Rumah Tangga.

Judul Publikasi/Sumber Data

-

Tautan Publikasi/Sumber Data

-

Tahun Data Tersedia : -

Level Estimasi : Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan spasial lokasi tanah.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



PROGRAM PRIORITAS 7: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

SASARAN 1: Meningkatkan produktivitas dan daya saing



Indikator :

Jumlah lulusan pelatihan vokasi

- Institusi Penghasil:**
1. Kementerian PPN/Bappenas
 2. Kementerian Keuangan
 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah lulusan pelatihan vokasi dalam satu tahun anggaran. Pelatihan vokasi adalah proses pembekalan angkatan kerja dengan keahlian (*skills*) umum dan teknis spesifik yang dibutuhkan di dunia kerja. Pelatihan vokasi dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal dengan durasi pendek melalui: (1) pembekalan angkatan kerja baru dengan keahlian/kompetensi kerja tertentu (*skilling*); (2) peningkatan keahlian/kompetensi kerja di jabatan atau profesi tertentu (*upskilling*); dan (3) pembekalan angkatan kerja dengan keahlian/kompetensi kerja yang berbeda/baru untuk beralih jabatan, profesi, atau wirausaha (*reskilling*). Pelaksanaan pelatihan yang dimaksud merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dibiayai menggunakan APBN.

Interpretasi

Indikator ini bertujuan untuk melihat jumlah calon tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi dari lembaga pelatihan yang dikelola oleh pemerintah menggunakan pembiayaan dari APBN. Indikator ini memberikan indikasi jumlah SDM yang mendapatkan pembekalan atau peningkatan kompetensi yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lulusan kegiatan pelatihan vokasi yang diselenggarakan atau dibina oleh Kementerian/Lembaga, termasuk peserta penerima Kartu Prakerja.

Ukuran/Satuan: Juta orang.

Judul Publikasi/Sumber Data

Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)

Aplikasi Elektronik Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian (e-Monev) PP 39 Tahun 2006

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia : 2023.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :**

Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan adalah jumlah lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir yang telah bekerja terhadap jumlah lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir. Jenjang pendidikan yang termasuk ke dalam kategori pendidikan vokasi adalah SMK, MAK, Diploma (D-I, D-II, D-III dan D-IV), dan S2 Terapan.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, maka semakin banyak lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir yang berhasil mendapatkan pekerjaan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Lulusan Vokasi Bekerja} = \frac{N \text{ lulusan vokasi 1 tahun bekerja}}{N \text{ lulusan vokasi 1 thn}} \times 100$$

Keterangan:

N lulusan vokasi 1thn bekerja = Jumlah lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir yang sudah mendapatkan pekerjaan

N lulusan vokasi 1thn = Jumlah lulusan pendidikan vokasi setahun terakhir

Ukuran/Satuan: Persen (%)

Judul Publikasi/Sumber Data

Diolah dari Data Sakernas Agustus oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia : 2017-2022.

Level Estimasi : Nasional, Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :**

Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah pada jenjang S1/S2/S3.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, maka semakin banyak lulusan perguruan tinggi setahun terakhir yang berhasil mendapatkan pekerjaan.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase LPTLB} = \frac{\sum LPTLB}{\sum LPT} \times 100\%$$

Keterangan:

- LPTLB : Jumlah lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) yang lulus setahun terakhir dan mulai bekerja pada setahun terakhir
- LPT : Jumlah lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) dalam setahun terakhir

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data : -

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia : -

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: -

**Indikator :****Jumlah prototipe dari perguruan tinggi**

Institusi Penghasil: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Prototipe R&D adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 s.d 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 s.d 6). Prototipe Industri adalah bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).

Interpretasi

Semakin banyak jumlah prototipe dari perguruan tinggi menunjukkan semakin produktif kinerja penelitian atau riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah kumulatif prototipe dari perguruan tinggi yang memenuhi kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Ukuran/Satuan: Prototipe.

Judul Publikasi/Sumber Data

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tautan Publikasi/Sumber Data

Pemantauan dan Evaluasi Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina****Institusi Penghasil:** Badan Riset dan Inovasi Nasional**Definisi**

Kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah program yang diberikan kepada *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula/*tenant* sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (perusahaan pemula berbasis riset/ PBBR) pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah produk inovasi yang dihasilkan semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh *tenant* PPBT yang dibina.

Ukuran/Satuan: Produk.

Judul Publikasi/Sumber Data

- Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Tautan Publikasi/Sumber Data
- Laporan Kinerja Tahunan BRIN

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha**

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Definisi

Produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha merupakan produk hasil inovasi lembaga pemerintah maupun swasta dan telah dimanfaatkan dalam proses produksi oleh industri atau badan usaha.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah menghitung jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau badan usaha.

Ukuran/Satuan: Inovasi.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: -

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik**

Institusi Penghasil: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Definisi

Indikator yang menyatakan jumlah permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan administrasi formalitas KI domestik.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan administrasi formalitas KI domestik pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik.

Ukuran/Satuan: Paten.

Judul Publikasi/Sumber Data : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan : Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Jumlah paten *granted* (domestik)

Institusi Penghasil: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Definisi

Indikator yang menyatakan jumlah paten yang disetujui/diberikan (*granted*) dalam cakupan domestik.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah paten yang disetujui/ diberikan dalam cakupan domestik pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah paten yang disetujui/diberikan (*granted*) dalam cakupan domestik, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah paten *granted*.

Ukuran/Satuan: Paten.

Judul Publikasi/Sumber Data : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Tahun Data Tersedia : 2024

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Badan Riset dan Inovasi

Definisi

Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi pendidikan S3.

Interpretasi

Semakin banyak jumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Indonesia yang berkualifikasi S3, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah sumber daya manusia iptek terkualifikasi S3 dibagi dengan jumlah sumber daya manusia iptek pada periode sama dikalikan 100 persen.

Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3

$$= \frac{\text{Jumlah sumber daya manusia iptek berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah sumber daya manusia iptek pada periode yang sama}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: Persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kemendikbudristek cq Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

Tautan Publikasi/Sumber Data

Laporan kinerja tahunan BRIN, Pemantauan dan Evaluasi Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan**

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang telah ditetapkan. Pusat Unggulan Iptek adalah instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang pemerintah (LPK dan LPNK), perguruan tinggi, atau badan usaha (swasta) menjadi lembaga litbang berkinerja tinggi dan bertaraf internasional di bidang spesifik dan menunjukkan relevansi, pendayagunaan, dan kemanfaatan produk litbang bagi pengguna.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah pusat unggulan iptek (pusat kolaborasi riset) yang ditetapkan pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang ditetapkan, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan.

Ukuran/Satuan: PUI.

Judul Publikasi/Sumber Data

Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

Laporan kinerja tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan**

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah kumulatif infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan.

Ukuran/Satuan: Infrastruktur.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan kinerja tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi****Institusi Penghasil:** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**Definisi**

Indikator ini menyatakan jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ada dan dikembangkan berbasis perguruan tinggi. STP merupakan tempat pengembangan riset dasar yang kemudian dibuat alih teknologi untuk diseminasikan ke masyarakat atau industri. Sedangkan *technopark* merupakan tempat prototipe teknologi diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau dikomersialisasi industri.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah STP berbasis perguruan tinggi yang dikembangkan pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah STP berbasis perguruan tinggi yang dikembangkan, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah STP yang ada dan dikembangkan berbasis perguruan tinggi.

Ukuran/Satuan: Unit.

Judul Publikasi/Sumber Data

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Tautan Publikasi/Sumber Data

Pemantauan dan Evaluasi Renja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :**

Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ada dan dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi. STP merupakan tempat pengembangan riset dasar yang kemudian dibuat alih teknologi diseminasi ke masyarakat atau industri. Sedangkan *technopark* merupakan tempat di mana prototipe teknologi diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau dikomersialisasi industri.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah STP nonperguruan tinggi yang dikembangkan pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah STP nonperguruan tinggi yang dikembangkan, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah STP yang ada dan dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi.

Ukuran/Satuan: Unit.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan kinerja tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah produk inovasi dan produk Riset Nasional yang dihasilkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional 2020-2024.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah produk inovasi dan produk riset prioritas nasional yang dihasilkan pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah produk inovasi dan riset nasional yang dihasilkan, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah produk inovasi dan produk riset prioritas riset nasional yang dihasilkan.

Ukuran/Satuan: Produk.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan kinerja tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah penerapan teknologi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah penerapan teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan untuk pemanfaatan sumber daya alam pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah penerapan teknologi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Ukuran/Satuan: Teknologi.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana

Institusi Penghasil: Badan Riset dan Inovasi Nasional

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah penerapan teknologi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.

Interpretasi

Nilai indikator menunjukkan jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana pada tahun tersebut. Semakin banyak jumlah penerapan teknologi yang dihasilkan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana, semakin baik kinerja capaian indikator pada tahun tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.

Ukuran/Satuan: Teknologi.

Judul Publikasi/Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Tahunan BRIN.

Tahun Data Tersedia : 2024.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games

Institusi Penghasil : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah medali emas yang diperoleh Tim Nasional Indonesia pada ajang Olympic Games Paris 2024

Interpretasi:

-

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah medali emas yang diperoleh Tim Nasional Indonesia pada ajang Olympic Games Paris 2024.

Ukuran/Satuan: Medali

Judul Publikasi/Sumber Data: Internasional Olympic Committee (IOC)

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://olympics.com/>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Internasional

Frekuensi Pengumpulan: Empat tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya



Indikator :

Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games

Institusi Penghasil : Kementerian Pemuda dan Olahraga

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah medali emas yang diperoleh Tim Nasional Indonesia pada ajang Paralympic Games Paris 2024.

Interpretasi:

-

Metode/Rumus Penghitungan:

Jumlah medali emas yang diperoleh Tim Nasional Indonesia pada ajang Paralympic Games Paris 2024.

Ukuran/Satuan: Medali.

Judul Publikasi/Sumber Data: Internasional Paralympic Committee (IPC).

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.paralympic.org/>

Tahun Data Tersedia: 2024.

Level Estimasi: Internasional.

Frekuensi Pengumpulan: Empat tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

JUMLAH
INDIKATOR PN

8

JUMLAH
INDIKATOR PP

19



PRIORITAS NASIONAL 4





**METADATA INDIKATOR
PEMBANGUNAN**

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



SASARAN 1: Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya



Indikator :

Indeks Capaian Revolusi Mental

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Definisi

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana revolusi mental telah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa. Indeks Capaian Revolusi Mental tersusun dari 31 indikator yang terbagi dalam 5 dimensi.

1. Dimensi Gerakan Indonesia Melayani
 - a) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele;
 - b) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas; dan
 - c) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat.
2. Dimensi Gerakan Indonesia Bersih
 - a) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pasar tradisional di wilayah tempat tinggalnya bersih;
 - b) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa terminal di wilayah tempat tinggalnya bersih;
 - c) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa rumah sakit/puskesmas di wilayah tempat tinggalnya bersih;
 - d) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa kantor pemerintah di wilayah tempat tinggalnya bersih; dan
 - e) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan (sekolah/kampus) di wilayah tempat tinggalnya bersih.
3. Dimensi Gerakan Indonesia Tertib
 - a) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa anggota masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah membuang sampah pada tempatnya;
 - b) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa trotoar di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk pejalan kaki;
 - c) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa jalan raya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk lalu lintas kendaraan saja;

- d) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa budaya antre sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; dan
 - e) Persentase penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan.
4. Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri
- a) Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/kecil/rumah tangga dan sejenisnya) di wilayah tempat tinggalnya dalam 6 bulan terakhir;
 - b) Persentase penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni;
 - c) Persentase penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya;
 - d) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional;
 - e) Persentase penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;
 - f) Persentase masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat;
 - g) Persentase penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan);
 - h) Persentase penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir; dan
 - i) Persentase penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non Lembaga Keuangan.
5. Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu
- a) Persentase penduduk 15+ yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir;
 - b) Persentase penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir;
 - c) Persentase penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi;
 - d) Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia;
 - e) Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya;
 - f) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
 - g) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
 - h) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama; dan
 - i) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.

Interpretasi

1. Jika ICRM berada di atas 50%, ini menunjukkan bahwa program Revolusi Mental telah mencapai setidaknya setengah dari tujuan dan pencapaian yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuannya.

2. Jika ICRM mendekati 100% atau mencapai 100%, ini mengindikasikan bahwa program Revolusi Mental telah berhasil mencapai sebagian besar, jika tidak semua, tujuan dan pencapaiannya sesuai dengan indikator yang diukur. Ini merupakan indikasi positif tentang keberhasilan program.

Metode/Rumus Penghitungan

$$ICRM = \left(\frac{\sum_{j=1}^5 \text{Indeks } D_j}{5} \right) \times 100$$

Keterangan:

ICRM = Indeks Capaian Resolusi Mental

D_j = Dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):

$$\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke-j

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi

n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Pengukuran ICRM dilakukan oleh BPS dari data SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP).

Tautan Publikasi/Sumber Data <https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018 dan 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila**

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila.

Interpretasi

Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila akan memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Indeks Aktualisasi Pancasila diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu: amat baik (91-100), baik (76-90), cukup (61-75), sedang (51-60), dan kurang (50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila adalah ukuran sikap dan perilaku konkret berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Ukuran ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan pendidikan dan pembangunan sikap dan perilaku serta implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah batasan ukuran 0-100 yang didapat dari pengelolaan hasil survei.

Ukuran/Satuan: skor.

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



SASARAN 2: Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan



Indikator :

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Institusi Penghasil: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya, (2) dimensi pendidikan, (3) dimensi ketahanan sosial budaya, (4) dimensi warisan budaya, (5) dimensi ekspresi budaya, (6) dimensi budaya literasi, dan (7) dimensi kesetaraan gender.

IPK terdiri dari 7 dimensi dan 31 indikator:

- 1) Dimensi ekonomi budaya;
 - a) Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan Dimensi pendidikan;
- 2) Dimensi Pendidikan
 - a) Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas
 - b) Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas
 - c) Angka Kesiapan Sekolah (AKS)
 - d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian
 - e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
 - f) Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah
- 3) Dimensi ketahanan sosial budaya;
 - a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
 - b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
 - c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama
 - d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda suku
 - e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir
 - f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong

- g) Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari
- h) Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga
- 4) Dimensi warisan budaya;
 - a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran
 - b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
 - c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
 - d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir
 - e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir
 - f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir
- 5) Dimensi ekspresi budaya;
 - a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
 - b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir
 - c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir
 - d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir.
- 6) Dimensi budaya literasi;
 - a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir
 - b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
 - c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir.
- 7) Dimensi kesetaraan gender;
 - a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki
 - b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat
 - c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki

Interpretasi

Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Semakin tinggi IPK menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pembangunan kebudayaan. Nilai IPK diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu di atas capaian nasional dan di bawah capaian nasional.

Metode/Rumus Penghitungan

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{indeks } D_j)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan

W_j = Bobot dimensi ke-j

D_j = Dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) :

$$\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke-j

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi

N_j = Jumlah indikator dimensi ke-j

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2018-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 3: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial



Indikator :

Indeks Pembangunan Masyarakat

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indeks komposit yang terdiri 3 dimensi dan 12 aspek.

1. Dimensi Kohesi Sosial: menggambarkan kekuatan kolektif anggota atau kelompok di dalam masyarakat untuk saling menerima, berbagi, dan berkontribusi yang dilandasi solidaritas di dalam organisasi sosial sehingga meneguhkan daya rekat masyarakat. Aspek yang diukur dalam dimensi kohesi sosial adalah:
 - a) Kerja Sama Sosial
Diukur melalui variabel partisipasi dalam kegiatan sosial yang memuat indikator persentase penduduk usia 18 tahun ke atas menurut keikutsertaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kematian (memandikan, mengubur, melayat jenazah)
 - b) Jejaring Sosial
Diukur melalui variabel partisipasi dalam kegiatan kelompok yang memuat indikator:
 - Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang menjadi anggota organisasi/kelompok/perkumpulan dan aktif di dalamnya
 - Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas menurut keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan (pengajian, perayaan keagamaan, ceramah agama, dsb.)
 - Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas menurut keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (keterampilan, olahraga, arisan, kesenian, dan lainnya)
 - c) Aksi Kolektif
Diukur melalui variabel:
 - 1) Partisipasi dalam kegiatan umum/publik
Memuat indikator:
Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas menurut keikutsertaan dalam kegiatan bersama untuk kepentingan warga (gotong royong-kerja bakti sosial) Persentase penduduk usia 18 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar (RT/RW/Dusun/Desa)

2) Sosial

Memuat indikator:

- Kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain (selain kerabat) di lingkungan sekitar tempat tinggal ketika sedang mengalami masalah keuangan.

d) Kepercayaan Sosial

Diukur melalui variabel sikap percaya terhadap lingkungan yang memuat indikator:

- Persentase rumah tangga menurut kepercayaan menitipkan rumah kepada tetangga
- Persentase rumah tangga menurut kepercayaan menitipkan anak kepada tetangga
- Persentase rumah tangga menurut kepercayaan terhadap tokoh masyarakat dalam membantu mengatasi masalah warga
- Persentase rumah tangga menurut kepercayaan terhadap polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Dimensi Inklusi Sosial: Pilihan dan kesempatan yang terbuka bagi setiap orang (individu) dan kelompok untuk terlibat, mengambil peran, dan menjadi bagian yang menyatu dalam suatu proses sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mendapatkan hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Aspek yang diukur dalam dimensi inklusi sosial adalah:

a) Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial

Diukur melalui variabel tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain, yang memuat indikator:

- Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal
- Persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal

b) Kesetaraan Gender

Diukur melalui variabel kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan, yang memuat indikator:

- Rasio Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Perempuan

c) Dukungan Sosial bagi Minoritas

Diukur melalui variabel dukungan terhadap penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang memuat indikator:

- Persentase balita tidak terlantar
- Persentase lansia tidak terlantar

3. Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil: Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya publik, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, bernegosiasi, persuasi dan proses memengaruhi, mengelola perselisihan dan konflik, dan memperkuat institusi publik yang akuntabel, untuk menopang dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang demokratis. Aspek yang diukur dalam dimensi kapasitas masyarakat sipil adalah:
- a) Kesadaran Hukum dan Politik
Diukur melalui variabel:
 - 1) Kepemilikan identitas dasar
Memuat indikator persentase anak usia 0-17 tahun yang mempunyai akta kelahiran
 - 2) Partisipasi dalam pemilu/pilkada
Memuat indikator persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu/Pilkada terakhir
 - 3) Partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan
Memuat indikator:
 - Persentase penduduk usia 18 tahun keatas yang memberikan saran/pendapat dalam kegiatan rapat
 - Persentase pengambilan keputusan di Lingkungan sekitar tempat tinggal selama 1 tahun terakhir melalui musyawarah
 - 4) Perilaku tertib masyarakat
Memuat indikator persentase penduduk yang memiliki persepsi positif terhadap penegakan aturan, ketertiban umum, dan disiplin anggota masyarakat di sekitarnya (membuang sampah, penggunaan trotoar dan jalan raya, serta budaya antre)
 - b) Organisasi Masyarakat Sipil
Diukur melalui variabel keanggotaan dalam organisasi sosial-politik, yang memuat indikator persentase penduduk yang menjadi anggota organisasi sosial-politik untuk belajar kepemimpinan dan menambah pengetahuan
 - c) Mitigasi Risiko Sosial
Diukur melalui variabel:
 - 1) Ketersediaan fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam, yang memuat indikator persentase desa/kelurahan yang memiliki fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam
 - 2) Partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam, yang memuat indikator persentase rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir
 - d) Penyelesaian kekerasan/perkelahian massa
Diukur melalui variabel:
 - 1) Keterlibatan aparat keamanan/pemerintah sebagai penengah dalam kekerasan massa, yang memuat indikator keterlibatan aparat keamanan/pemerintah sebagai penengah dalam kekerasan massa
 - 2) Keterlibatan tokoh masyarakat/agama sebagai penengah dalam kekerasan massa, yang memuat indikator persentase desa/kelurahan menurut keterlibatan tokoh masyarakat/agama sebagai penengah dalam perkelahian massa

- e) Akses terhadap informasi
 Diukur melalui variabel keaktifan masyarakat dalam mencari informasi, yang memuat indikator persentase penduduk yang aktif mengakses informasi melalui televisi, radio, surat kabar (cetak/elektronik), buku, dan internet.

Interpretasi

Nilai IPMas berkisar antara 0 – 100. IPMas menunjukkan capaian indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan yang memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil. Semakin tinggi angka IPMas, maka semakin baik pembangunan sosial kemasyarakatan ditinjau dari dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.

Metode/Rumus Penghitungan

$$IPMas = \sum_{j=1}^3 (W_j \times indeks D_j)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Masyarakat

W_j = Bobot dimensi ke-j

D_j = Dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) :

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n I_{ji}}{n_j} \right)$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke-j

I_{ji} = Nilai aspek i pada dimensi ke-j

n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (I_{ji}) :

$$Aspek I_{ji} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n R_{ki}}{n_i} \right)$$

Keterangan:

I_{ji} = Nilai aspek i pada dimensi ke-j

R_{ki} = Nilai variabel k pada aspek ke-i

n_j = Jumlah variabel pada aspek ke-i

Rumus menghitung indeks dimensi (R_{ki}) :

$$\text{Variabel } R_{ki} = \left(\frac{\sum_{l=1}^n V_{lk}}{n_k} \right)$$

Keterangan:

R_{ki} = Nilai variabel k pada aspek ke-i

V_{lk} = Nilai indikator l pada variabel ke-k yang telah dinormalisasi

n_k = Jumlah indikator pada variabel ke-k

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Diolah dari Data Susenas KOR Maret, Susenas MSBP, Susenas Modul Hansos, Sakernas Agustus, Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Potensi Desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik dengan kerjasama Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2015, 2018, 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



SASARAN 4: Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat



Indikator :

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Institusi Penghasil: Balitbangdiklat, Kementerian Agama

Definisi

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil di masing-masing provinsi sebanyak 400 responden sehingga jumlah keseluruhan sampel 13.600 responden.

Interpretasi

Semakin tinggi capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka semakin baik kehidupan antar umat beragama yang harmonis, toleran, inklusif, menghormati perbedaan keyakinan, dan terjaminnya kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu:

0,00 – 20,00 rukun sangat rendah;

20,01 – 40,00 rukun rendah;

40,01 – 60,00 rukun sedang;

60,01 – 80,00 rukun tinggi;

80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 \text{Indeks } D_j}{3}$$

Keterangan:

IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama

D_j = Dimensi ke- j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) :

$$\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right)$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke- j

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke- j

n_j = Jumlah indikator dimensi ke- j

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Publikasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Tautan Publikasi/Sumber Data https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

Tahun Data Tersedia: 2017-2023.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 5: Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa



Indikator :

Indeks Pembangunan Keluarga

Institusi Penghasil: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Definisi

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan (<40).

Interpretasi

Nilai iBangga menunjukkan tingkatan kualitas pembangunan keluarga di Indonesia. iBangga dengan nilai lebih dari 70 maka akan masuk dalam kategori tangguh, antara 40-70 akan masuk dalam kategori berkembang dan apabila kurang dari 40 akan masuk dalam kategori rentan.

Metode/Rumus Penghitungan

Terdiri dari 3 dimensi (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan), 11 Indikator dan 17 variabel.

1) Menghitung skor masing-masing dimensi:

$$\text{Skor } D = \sum_{i=1}^k X_i$$

Keterangan:

D: dimensi (ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan)

X: skor masing-masing variabel dalam setiap dimensi

i: variabel pada setiap dimensi

k: jumlah variabel pada setiap dimensi

2) Menghitung indeks masing-masing dimensi:

$$\text{Indeks Ketenteraman} = \frac{\text{skor total ketenteraman} - \text{min skor ketenteraman}}{\text{maks skor ketenteraman} - \text{min skor ketenteraman}} \times 100$$

$$\text{Indeks kemandirian} = \frac{\text{Skor total kemandirian} - \text{min skor kemandirian}}{\text{maks skor kemandirian} - \text{min skor kemandirian}} \times 100$$

$$\text{Indeks kebahagiaan} = \frac{\text{Skor total kebahagiaan} - \text{min skor kebahagiaan}}{\text{Maks skor kebahagiaan} - \text{min skor kebahagiaan}} \times 100$$

3) Menghitung iBangga:

$$iBangga = \frac{\text{Indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{Indeks kebahagiaan}}{3}$$

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2022 (Revisi).

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP%20BKKBN%20-%20TAHUN%202020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2020-2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Institusi Penghasil: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Definisi

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50 persen dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei.

Interpretasi

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) menunjukkan usia ideal dalam melakukan pernikahan. Semakin tinggi angka MUKP semakin baik, menunjukkan peningkatan usia perkawinan pertama perempuan mengurangi resiko perkawinan usia anak dan mencegah resiko kehamilan diusia muda.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai tengah (median) dari gugus data usia kawin pertama perempuan yang diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar.

- a. Menentukan batas usia termuda dari perempuan yaitu dengan menghitung distribusi persentase perempuan kawin usia 15-49 tahun.

- b. Menghitung persentase perempuan pernah kawin (kawin, cerai hidup, cerai mati) menurut usia kawin pertama:

$$Wpk (\text{umur } xi) = \frac{\text{Jumlah } wpk \text{ umur } xi}{\text{Jumlah } sw \text{ usia batas bawah} - 49 \text{ tahun}} \times 100$$

Keterangan:

Xi : usia menikah pertama kali.

Wpk usia xi : persentase wanita/perempuan pernah kawin pada usia xi

sw : semua wanita/perempuan (kawin dan sudah pernah kawin).

- c. Menghitung median usia kawin pertama yang tepat berada pada 50 persen kumulatif distribusi persentase.

Ukuran/Satuan: Tahun.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi 2020, BKKBN, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP%20BKKBN%20-%20TAHUN%202020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2019-2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 6: Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif



Indikator :

Nilai Budaya Literasi

Institusi Penghasil: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Definisi operasional dari Budaya Literasi yaitu aktivitas serta sarana/prasarana pendukung untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan.

Indikator penyusun dalam dimensi budaya literasi adalah:

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir;
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir; dan
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir

Interpretasi

Nilai Budaya Literasi memberikan gambaran tentang tingkat budaya literasi dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai budaya literasi, maka semakin baik pula upaya pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Nilai Budaya Literasi} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi budaya literasi yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi budaya literasi.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2018-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 1: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.

SASARAN 1: Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu



Indikator :

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Definisi

Dimensi Gerakan Indonesia Melayani merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Indeks ini berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Rumah Tangga sesuai dengan fungsi satuan kerjanya. Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT. Pelayanan kini didorong untuk bertransformasi menjadi *e-services*, terlebih di era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Aparatur Sipil Negara harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat. Sinergi dengan masyarakat antara lain dapat dijalin melalui penyediaan akses pengaduan mengenai pelayanan publik, dimana harus dapat ditangani secara cepat oleh unit kerja terkait. Indikator penyusun dimensi Gerakan Indonesia Melayani adalah:

- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele;
- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas; dan
- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat.

Interpretasi

Dimensi ini menyatakan besarnya penilaian masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan layanan publik. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Gerakan Indonesia Melayani} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi gerakan Indonesia melayani yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi gerakan Indonesia melayani.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Pengukuran ICRM dilakukan oleh BPS dari data SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP).

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Definisi

Dimensi Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).

Indeks ini berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik, deregulasi, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah, mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat dan peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Indikator penyusun dimensi Gerakan Indonesia Bersih adalah:

- a) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pasar tradisional di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- b) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa terminal di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- c) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa rumah sakit/puskesmas di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- d) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa kantor pemerintah di wilayah tempat tinggalnya bersih; dan
- e) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan (sekolah/kampus) di wilayah tempat tinggal bersih.

Interpretasi

Dimensi ini menyatakan persepsi masyarakat terhadap peran dan kesadaran masyarakat untuk menunjang perilaku hidup bersih dan sehat serta kebersihan lingkungan. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Gerakan Indonesia Bersih} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi gerakan Indonesia bersih yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi gerakan Indonesia melayani.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018 dan 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Definisi

Dimensi Gerakan Indonesia Tertib merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Indeks ini mendefinisikan perilaku tertib penggunaan ruang publik, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas, peningkatan perilaku antre, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku, peningkatan penegakan hukum perilaku tertib dan menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. Indikator penyusun dimensi Gerakan Indonesia Tertib adalah:

- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa anggota masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah membuang sampah pada tempatnya;
- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa trotoar di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk pejalan kaki;
- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa jalan raya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk lalu lintas kendaraan saja;
- Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa budaya antre sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; dan
- Persentase penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan.

Interpretasi

Dimensi ini menyatakan persentase rumah tangga yang sudah tertib dalam memanfaatkan penggunaan ruang publik, tertib administrasi kependudukan, tertib lalu lintas serta penegakan hukum di tingkat masyarakat yang sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Gerakan Indonesia Tertib} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi gerakan Indonesia tertib yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi gerakan Indonesia melayani.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Pengukuran ICRM dilakukan oleh BPS dari data SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP).

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018 dan 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri**

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Definisi

Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Indeks ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri, pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual, peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa, deregulasi dan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat. Indikator penyusun dimensi Gerakan Indonesia Mandiri adalah:

- a) Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/kecil/rumah tangga dan sejenisnya) di wilayah tempat tinggalnya dalam 6 bulan terakhir;
- b) Persentase penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni;
- c) Persentase penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya;
- d) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional;
- e) Persentase penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;
- f) Persentase masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat;
- g) Persentase penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan);
- h) Persentase penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir; dan
- i) Persentase penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di nonlembaga keuangan.

Interpretasi

Dimensi ini menyatakan besarnya kapasitas masyarakat yang mampu berdaya secara mandiri yang terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam UMKM, pendidikan, keterampilan dan tabungan. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Gerakan Indonesia Mandiri} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi gerakan Indonesia mandiri yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi gerakan Indonesia mandiri.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Pengukuran ICRM dilakukan oleh BPS dari data SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP).

Tautan Publikasi/Sumber Data <https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018 dan 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu

Institusi Penghasil: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Definisi

Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Indeks ini berkaitan dengan program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama, peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial, peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus. Indikator penyusun dimensi Gerakan Indonesia Bersatu adalah:

- a) Persentase penduduk 15+ yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir;
- b) Persentase penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir;

- c) Persentase penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi;
- d) Persentase rumah tangga yang mengibarkan/ memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia;
- e) Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya;
- f) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
- g) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal;
- h) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama; dan
- i) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.

Interpretasi

Dimensi ini berfokus pada perilaku masyarakat yang kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, kerukunan antar umat beragama, nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Gerakan Indonesia Bersatu} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi gerakan Indonesia bersatu yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi gerakan Indonesia bersatu.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Indeks Capaian Revolusi Mental, Kemenko PMK.

Pengukuran ICRM dilakukan oleh BPS dari data SUSENAS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (SUSENAS MSBP).

Tautan Publikasi/Sumber Data <https://kemenkopmk.go.id/index.php/node/4114>

Tahun Data Tersedia: 2018 dan 2021.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga tahun sekali.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila



Indikator :

Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dimensi pertama yang merujuk dari sila pertama Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka keimanan yang bersifat inklusif, toleran dan membuahakan kesalehan sosial.

Interpretasi

Nilai Dimensi Ketuhanan yang Maha Esa memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Sila Pertama Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Hasil dimensi adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. amat baik (skor 91-100).
2. baik (skor 76-90).
3. cukup (61-75).
4. sedang (51-60).
5. kurang (skor 50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

- D_j : Sila ke-j
 n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j
 X_i : Nilai indikator ke-i

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, dan 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan dimensi kedua yang merujuk dari sila kedua Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran untuk melindungi serta memenuhi Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Interpretasi

Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Sila Kedua Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Hasil dimensi adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. amat baik (skor 91-100).
2. baik (skor 76-90).
3. cukup (61-75).
4. sedang (51-60).
5. kurang (skor 50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

- D_j : Sila ke-j
 n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j
 X_i : Nilai indikator ke-i

Ukuran/Satuan (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, dan 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Nilai Dimensi Persatuan Indonesia**

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Dimensi Persatuan Indonesia merupakan dimensi ketiga yang merujuk dari sila ketiga Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka terbentuknya kewargaan nasionalistik yang merawat persatuan nasional di tengah kemajemukan bangsa.

Interpretasi

Nilai Dimensi Persatuan Indonesia memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Sila Ketiga Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Hasil dimensi adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Nilai Dimensi Persatuan Indonesia diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. amat baik (skor 91-100).
2. baik (skor 76- 90).
3. cukup (61-75).
4. sedang (51-60).
5. kurang (skor 50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

- D_j : Sila ke-j
 n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j
 X_i : Nilai indikator ke-i

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, dan 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan merupakan dimensi keempat yang merujuk dari sila keempat Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka demi terbentuknya etos demokratis, baik dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara.

Interpretasi

Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Hasil dimensi adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. amat baik (skor 91-100).
2. baik (skor 76-90).
3. cukup (61-75).
4. sedang (51-60).
5. kurang (skor 50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

- D_j : Sila ke-j
 n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j
 X_i : Nilai indikator ke-i

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, dan 2022

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



Indikator :

Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Institusi Penghasil: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Definisi

Dimensi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan dimensi kelima yang merujuk dari sila kelima Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila demi tersusunnya sistem ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial, serta demi terbentuknya etos kepedulian sosial di kalangan warga negara.

Interpretasi

Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai Sila Kelima Pancasila telah diaktualisasikan dalam masyarakat. Hasil dimensi adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. amat baik (skor 91-100).
2. baik (skor 76-90).
3. cukup (61-75).
4. sedang (51-60).
5. kurang (skor 50 ke bawah).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

- D_j : Sila ke-j
 n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j
 X_i : Nilai indikator ke-i

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Tidak dipublikasikan.

Tahun Data Tersedia: 2018, 2021, dan 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



SASARAN 3: Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter



Indikator :

Indeks Kerentanan Keluarga

Institusi Penghasil: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Definisi

Indeks Kerentanan Keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga yang memiliki kerentanan dalam aspek keharmonisan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar dan interaksi keluarga. Sebagai sebuah ukuran tingkat ketahanan keluarga, maka IKK menjadi indeks komposit mencakup multidimensi, multivariabel, dan multi indikator, perlu diukur dengan menggunakan skenario pembobotan dimensi, variabel, dan indikator tertentu yang dianggap cocok. Metode yang digunakan untuk penentuan besarnya bobot dimensi, variabel, dan indikator pada publikasi ini adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan pada saat ini diukur menggunakan berbagai data yang memiliki satuan ukur yang berbeda-beda dan telah diagregasi ke level provinsi.

Interpretasi

Indeks Kerentanan Keluarga berskala 0-100 dan memiliki arah analisis negatif sehingga untuk nilai indeks pemenuhan kebutuhan dasar, indeks keharmonisan keluarga, dan indeks interaksi keluarga semakin kecil nilainya dapat dikatakan semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat Ketahanan Keluarga diukur secara komposit yang mencakup berbagai indikator dari berbagai data hasil survei yang relevan.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: BKKBN, Pendataan Keluarga

<https://cis.bkkbn.go.id/lkspk/?wpdmpo=ikip-dithanlan-ta-2022>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Karakter Remaja**

Institusi Penghasil: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Definisi

Indeks Karakter Remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan karakter remaja. Karakter yang dimaksud mengacu pada perilaku yang baik dan tidak baik/ yang berdampak buruk pada diri remaja. Indeks Karakter Remaja ini bernilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya, berarti semakin baik pembangunan karakter remaja.

Interpretasi

Indeks Karakter Remaja bernilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya, berarti semakin baik pembangunan karakter remaja

Metode/Rumus Penghitungan

Indeks Karakter Remaja dibangun dari komposit 4 indikator terdiri dari:

- (1) tidak merokok;
- (2) tidak hamil di usia remaja;
- (3) tidak menikah di usia dini; dan
- (4) mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: BKKBN, Pendataan keluarga.

Tautan Publikasi/Sumber Data:

Laporan kinerja BKKBN

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 2: Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia



SASARAN 1: Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan



Indikator :

Nilai Dimensi Warisan Budaya

Institusi Penghasil: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Dimensi Warisan Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dimensi ini secara umum mengukur upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya dalam upaya pemajuan.

kebudayaan. Indikator penyusun dalam dimensi warisan budaya adalah:

- Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran.
- Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.
- Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir.
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir.
- Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir.

Interpretasi

Nilai Dimensi Warisan Budaya memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Semakin tinggi Nilai Dimensi Warisan Budaya IPK menunjukkan bahwa semakin baik kinerja seluruh pihak dalam upaya pelestarian OPK dan CB di tingkat Nasional/Provinsi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Warisan Budaya} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi warisan budaya yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi warisan budaya.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2018-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Dimensi Ekspresi Budaya

Institusi Penghasil: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Dimensi Ekspresi Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Definisi Operasional dari dimensi Ekspresi Budaya adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat. Indikator penyusun dalam dimensi ekspresi budaya adalah:

- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir.
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir.
- Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir.
- Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir.

Intepretasi

Nilai Dimensi Ekspresi Budaya akan memberikan gambaran tentang kebebasan ekspresi manusia dalam budaya termasuk menganut ekspresi budaya tanpa mendapat gangguan. Semakin tinggi Dimensi Ekspresi Budaya menunjukkan bahwa semakin kuat upaya dalam mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Ekspresi Budaya} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ekspresi budaya yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi ekspresi budaya.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Tahun Data Tersedia: 2018-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Nilai Dimensi Ekonomi Budaya

Institusi Penghasil: Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Definisi

Dimensi Ekonomi Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Definisi operasional Ekonomi Budaya: Aktivitas Ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Dimensi Ekonomi Budaya pada dasarnya mengukur aktivitas masyarakat di bidang kebudayaan yang memberikan nilai tambah ekonomi, dalam hal ini didekati dengan indikator banyaknya masyarakat yang menjadikan keterlibatan dalam aktivitas budayanya sebagai sumber penghasilan.

Interpretasi

Nilai Dimensi Ekonomi Budaya mengukur aktivitas masyarakat di bidang kebudayaan yang memberikan nilai tambah ekonomi, dalam hal ini didekati dengan indikator banyaknya masyarakat yang menjadikan keterlibatan dalam aktivitas budayanya sebagai sumber penghasilan. Semakin tinggi nilai Dimensi Ekonomi Budaya IPK, maka semakin baik tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjadikan aktivitas budaya sebagai sumber penghasilan yang memberikan nilai tambah ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Ekonomi Budaya} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ekonomi budaya yang sudah dinormalisasi.

n_j = Jumlah indikator dimensi ekonomi budaya.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Tahun Data Tersedia : 2018-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 3: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial

SASARAN 1: Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama



Indikator :

Nilai Dimensi Toleransi

Institusi Penghasil: Balitbangdiklat, Kementerian Agama

Definisi

Dimensi Toleransi merupakan salah satu dimensi dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima dan menghargai perbedaan. Indikator penyusun dimensi toleransi adalah:

- Hidup bertetangga dengan penganut agama lain;
- Penganut agama lain membangun tempat ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin Pemerintah setempat;
- Penganut agama lain melakukan perayaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda; dan
- Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai Dimensi Toleransi IKUB, maka semakin baik kondisi saling menerima, menghargai, dan menghormati pada perbedaan keyakinan antar umat beragama.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Toleransi} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi toleransi.

n_j = Jumlah indikator dimensi toleransi.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Balitbangdiklat, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi/Sumber Data https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

Tahun Data Tersedia: 2017-2023.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Nilai Dimensi Kesetaraan**

Institusi Penghasil: Balitbangdiklat, Kementerian Agama

Definisi

Dimensi Kesetaraan merupakan salah satu dimensi dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Dimensi kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Indikator penyusun dimensi kesetaraan adalah:

- a) Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya;
- c) Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya;
- d) Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya;
- e) Warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa);
- f) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi Presiden Republik Indonesia;
- g) Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai Dimensi Kesetaraan IKUB, maka semakin baik kondisi perlindungan terhadap hak dan kesempatan yang sama , serta perlakuan yang adil untuk pihak lain tanpa diskriminasi.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Kesetaraan} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi kesetaraan.

n_j = Jumlah indikator dimensi kesetaraan.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data Balitbangdiklat, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi/Sumber Data https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

Tahun Data Tersedia: 2017-2023.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Nilai Dimensi Kerja Sama**

Institusi Penghasil: Balitbangdiklat, Kementerian Agama

Definisi

Dimensi kerja sama merupakan salah satu dimensi dari Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Dimensi kerja sama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Indikator penyusun dimensi kerja sama adalah:

- a) Berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain);
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain;
- c) Membantu teman/tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah;
- d) Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama;
- e) Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/ kerabat/penjual berbeda agama; dan
- f) Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai Dimensi Kerjasama IKUB, maka semakin baik kondisi kerjasama, keterlibatan aktif, empati dan simpati dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan kelompok lainnya.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Dimensi Kerja sama} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi kerja sama.

n_j = Jumlah indikator dimensi kerja sama.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data Balitbangdiklat, Kementerian Agama

Tautan Publikasi/Sumber Data: https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

Tahun Data Tersedia: 2017-2023.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

PROGRAM PRIORITAS 4: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter



SASARAN 1: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif



Indikator :

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Institusi Penghasil: Perpustakaan Nasional

Definisi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu:

- a) Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1);
- b) Ketercukupan koleksi (UPLM 2);
- c) Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3);
- d) Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM 4);
- e) Jumlah perpustakaan ber-SNP (UPLM 5);
- f) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi (UPLM 6); dan
- g) Jumlah anggota perpustakaan (UPLM 7).

Sedangkan Aspek Masyarakat (AM) meliputi:

- a) Jumlah populasi penduduk;
- b) Jumlah populasi civitas sekolah;
- c) Jumlah populasi civitas akademika; dan
- d) Jumlah populasi penduduk bekerja.

Interpretasi

IPLM yang tinggi mencerminkan tingkat literasi yang tinggi dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mayoritas populasi memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang baik. Nilai IPLM berada pada selang 0-100. Kategori dalam IPLM yaitu:

Rentang Nilai	Kategori	Interpretasi
0,00 – 29,99	Sangat rendah	Butuh pembinaan berdasarkan kelemahan dan kekurangan pada komponen serta didasarkan pada dikotomi kewenangan ranah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota
30,00 – 49,99	Rendah	
50,00 – 79,99	Sedang	Memenuhi standar
80,00 – 89,99	Tinggi	Berkategori baik
90,00 – 100,00	Sangat Tinggi	Perpustakaan percontohan/model

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM} 100$$

Keterangan:

- UPLM_i : Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
- AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://katalog.data.go.id/dataset/indespembangunan-literasi-masyarakat-2021>

Tahun Data Tersedia: 2020-2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar**

**JUMLAH
INDIKATOR PN**

14

**JUMLAH
INDIKATOR PP**

37



PRIORITAS NASIONAL 5





METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar



SASARAN 1: Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar



Indikator :

Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Interpretasi

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Metode/Rumus Penghitungan

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$$

Keterangan:

PHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRTHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRT = Jumlah rumah tangga

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022, BPS, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: -

**Indikator :**

Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Rasio fatalitas kecelakaan jalan diartikan sebagai tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas yang dihitung per 10.000 kendaraan, guna nantinya digunakan untuk mengukur *Road Safety Index* (RSI). Penurunan didefinisikan sebagai perbandingan antara rasio fatalitas kendaraan terhadap angka dasar periode tahun tertentu (misal tahun 2020).

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah korban meninggal dari kecelakaan lalu lintas (bersumber dari Polri) dibagi jumlah kendaraan (bersumber dari BPS).

Ukuran/Satuan

persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: -

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: -

**Indikator :**

Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif)

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Persentase luas daerah irigasi yang mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi.

Interpretasi

Daerah irigasi yang selesai mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi TA. 2022 dibagi luas total daerah irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat.

Metode/Rumus Penghitungan

Total kapasitas air baku yang terbangun (kumulatif) dibagi dengan kebutuhan air baku (domestik dan industri)

Ukuran/Satuan: (kumulatif, persen (%)).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Peraturan PUPR Nomor 14 Tahun 2015;
2. Diolah dari data pelaksanaan modernisasi irigasi (Direktorat Irigasi dan Rawa);
3. Bahan informasi pertemuan BPK pada 9 November 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2022, 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.



Indikator :

Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Indikator ini didefinisikan sebagai proporsi pemenuhan kebutuhan air baku. Air Baku didefinisikan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Pemenuhan kebutuhan air terbagi atas 2 macam standar kebutuhan air, yaitu penyediaan air domestik dan non domestik. Perhitungan kebutuhan air dipengaruhi oleh jumlah penduduk saat ini, dan kenaikan penduduk di masa mendatang sehingga dapat mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan datang (domestik). Sedangkan penyediaan air non domestik ditentukan oleh banyaknya fasilitas, seperti perkantoran, kesehatan, industri, komersial, umum dan lainnya.

Interpretasi

Jika persentasenya mendekati 100%, ini menunjukkan bahwa kebutuhan air baku hampir terpenuhi sepenuhnya. Namun, jika persentasenya jauh di bawah 100%, ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pasokan air baku yang perlu diatasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut. Perhitungan dilakukan melalui perkembangan penduduk dengan metode aritmatika: Jumlah penduduk pada tahun proyeksi (jiwa) (P_n) = jumlah penduduk pada awal tahun dasar (jiwa) (P_0) + rata-rata pertumbuhan penduduk (jiwa/tahun) (a) x kurun waktu proyeksi (tahun) (n). Kemudian dihitung dengan kriteria perencanaan air bersih dan kebutuhan air domestik tiap kategori.

Ukuran/Satuan: (kumulatif, %).

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar



Indikator :

Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas, dan lain-lain.

Interpretasi:

Memantau rata-rata waktu tempuh pengguna jalan pada koridor-koridor utama. Semakin rendah waktu tempuh, menunjukkan kondisi jalan yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (rerata tertimbang).

Ukuran/Satuan: Jam/100 km.

Judul Publikasi/Sumber Data: Renstra PUPR 2020-2024

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5Bkunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Merupakan perbandingan antara jumlah trayek pelayaran angkutan peti kemas yang saling terhubung/membentuk *loop* dengan jumlah trayek pelayaran angkutan peti kemas tetap dan teratur (*linier*).

Interpretasi

Semakin tinggi presentase rute pelayaraan yang saling terhubung (*loop*) maka sistem logistik pelayaran semakin efektif.

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\sum \text{Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{Jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (linier)}} \times 100$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.936/DJPL/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210709005225.DOKUMEN_RENSTRADA_DITJEN_HUBLA_TAHUN_2020_-_2024.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2019-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index (TQI)* kategori 1 dan 2

Institusi Penghasil: Kementerian Perhubungan.

Definisi

Track Quality Index merupakan suatu ukuran nilai (*index*) yang digunakan untuk menyatakan tingkat kualitas keteraturan suatu rel berdasarkan beberapa parameter penyusunnya.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Parameter yang digunakan dalam menentukan nilai TQI untuk standar perkeretaapian Indonesia meliputi: lebar sepur, *profile* (angkatan), *alignment* (listringan), dan *crosslevel* (pertinggian). Nilai *Track Quality Index* adalah jumlah dari keempat parameter tersebut.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Buku Statistik Bidang Perkeretaapian, Ditjen Perkereetaapian, Kementerian Perhubungan.

Tahun Data Tersedia: 2021 **Tautan Publikasi/Sumber Data**

[https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_\(Semester_I\)_BAR_U.pdf](https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_(Semester_I)_BAR_U.pdf).

Level Estimasi: Nasional dan Wilayah.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase capaian *On Time Performance (OTP)* transportasi udara

Institusi Penghasil: Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Ketepatan waktu penerbangan (*On Time Performance/OTP*) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

-

Ukuran/Satuan: persen (%).**Judul Publikasi/Sumber Data:** -**Tautan Publikasi/Sumber Data:** -**Tahun Data Tersedia**

Persentase dihitung tiap tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Level Estimasi: Nasional.**Frekuensi Pengumpulan:** Tahunan.**Apakah indikator dapat diakses umum:** -**SASARAN 3: Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan****Indikator :**

Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan**Definisi**

Indikator ini mendefinisikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dalam Ukuran/Satuan kota.

Interpretasi

Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar pada kota yang dikembangkan. Sistem angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dengan prasyarat tertentu (LPM ITB, 1997). Banyak usulan jenis angkutan umum massal yang banyak dikembangkan di kota besar, seperti model oleh Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ), seperti dikutip Djoko Suwandono dari Undip yaitu (1) Mass Rapid Transit, (2) Heavy Rail Transit, (3) Light Rail Transit, (4) Metro, (5) Sistem Kereta Komuter, dan (6) Bus Rapid Transit. Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan dalam kota besar tertentu.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dalam Ukuran/Satuan kota.

Ukuran/Satuan: Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepEl/2020/SK_Renstra_Ditjen_Hubdat_2020_-_2024.pdf.

Level Estimasi: -

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahun Sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: -

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan.

Interpretasi

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Metode/Rumus Penghitungan

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$$

Keterangan:

PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau (khusus di daerah perkotaan)

JRTHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau (khusus di daerah perkotaan)

JRT : Jumlah rumah tangga (khusus di daerah perkotaan)

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022.

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5Bkunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: -

**SASARAN 4: Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan**

Indikator :

Rasio elektrifikasi

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

Interpretasi

Mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

$$RE = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT) Nasional}} \times 100\%$$

Keterangan:

RE : Rasio Elektrifikasi

Jumlah RT Berlistrik : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN dan non PLN

Jumlah RT Nasional : Jumlah rumah tangga

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf
3. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Definisi

Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita) adalah jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.

Interpretasi

Untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Metode/Rumus Penghitungan

$$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$

Keterangan:

- KLpk : Konsumsi listrik per kapita (Penjualan listrik + Pemakaian listrik sendiri)
- KLPLN : Total konsumsi listrik PLN (Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian listrik sendiri; Perusahaan IO = Pemakaian listrik sendiri)
- KLNonPLN : Total konsumsi listrik Non PLN
- P : Jumlah Penduduk

Ukuran/Satuan: kWh/kapita.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Sirusa BPS;
2. Laporan Kinerja Dirjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM 2021;
3. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;
4. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;
5. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3289&th=2020><https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3289&th=2020>;
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-202202252143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf
3. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-lapoan-kinerja-kesdm-2020.pdf>;
4. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-2021.pdf>;
5. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-tahun-2022.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Penurunan emisi GRK sektor energi

Institusi Penghasil:

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam sektor energi sesuai komitmen Presiden Indonesia tahun 2009 dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sesuai Perpres No. 61 tahun 2011.

Interpretasi

Mengetahui perkembangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi di Indonesia yang digunakan sebagai acuan/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan energi yang berwawasan lingkungan.

Metode/Rumus Penghitungan

Emisi = kapasitas pembangkit listrik atau kapasitas daya pembangkit energi (EC) + faktor emisi atas tipe teknologi tertentu (bahan bakar yang digunakan) untuk polutan jenis tertentu (EF).

Ukuran/Satuan: Juta ton.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Ditjen EBTKE Tahun 2022;

Laporan Kinerja KESDM Tahun 2020;

Laporan Kinerja KESDM Tahun 2021;

Laporan Kinerja KESDM Tahun 2022.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://drive.esdm.go.id/wl/?id=R0Gv1gFac4c5kCJoPOswES8EPq5Ubl3m;>
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf;
3. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf;
4. [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf;)

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**SASARAN 5: Meningkatnya layanan infrastruktur TIK****Indikator :**

Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)

Institusi Penghasil: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Definisi

Indikator ini berguna untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK. Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Interpretasi

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

Metode/Rumus Penghitungan

Penduduk terlayani *mobile broadband* (PPMB) = (Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (LPMB) + Jumlah total luas pemukiman Indonesia (LP)) x 100%.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. [https://djppi.kominfo.go.id/storage/file/file_publication/renstra/CETAK%20renstra%20kominfo%202020-2024%208%20november%20\(3\)%20\(1\).pdf](https://djppi.kominfo.go.id/storage/file/file_publication/renstra/CETAK%20renstra%20kominfo%202020-2024%208%20november%20(3)%20(1).pdf).
2. https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_kinerja.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**PROGRAM PRIORITAS 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar**

SASARAN 1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau



Indikator :

Rasio *outstanding* KPR terhadap PDB

Institusi Penghasil:

1. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

(KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Indikator ini membandingkan rasio KPR dengan Pendapatan Domestik Bruto Nasional untuk mengetahui kontribusi KPR terhadap pendapatan negara mengingat sektor KPR terkait dengan banyak sektor seperti perumahan, ekonomi, tenaga kerja, dsb. Indikator ini adalah jumlah KPR rumah tinggal saja (tanpa flat dan apartemen, ruko) yang disalurkan (Rp) dibagi dengan nilai PDB (Rp) pada tahun yang sama.

Interpretasi

Membandingkan rasio KPR dengan Pendapatan Domestik Bruto Nasional untuk mengetahui kontribusi KPR terhadap perekonomian.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai Kumulatif KPR dalam 1 tahun / Nilai PDB Total berdasarkan harga berlaku x 100%.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: SEKI Bank Indonesia dan BPS.

Tahun Data Tersedia: 2015-2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: *Housing Finance Information Network (hofinet.org)*.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*).

Interpretasi

Semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masyarakat.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah RT dengan luas lantai rumah bangunan tempat tinggal per kapita > 7,2 m² / Jumlah RT x 100%.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020.

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.

Level Estimasi: Provinsi dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah.

Interpretasi

Semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masyarakat (Positif).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah RT dengan bahan bangunan atap, lantai, dan dinding rumah terluas yang memenuhi kriteria hunian layak}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020.

Tahun Data Tersedia: 2015-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.

Level Estimasi: Provinsi dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Sertifikat Hak Milik (SHM) dan selain SHM seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS).

Interpretasi

Semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masyarakat (Positif).

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah RT yang memiliki bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020.

Tahun Data Tersedia: 2017-2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.

Level Estimasi: Provinsi dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan (susenas MKP atau susenas tahunan).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman



Indikator :

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Interpretasi

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

$$PAML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PAML : Proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum layak.

JRTAML : Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak.

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Susenas KOR BPS.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ1IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-layak.html>.
2. <https://www.nawasis.org>.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan (Susenas KOR).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman****Institusi Penghasil:**

1. Badan Pusat Statistik (Susenas KOR)
2. Kementerian Kesehatan.

Definisi

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum (Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan).

Interpretasi

Memantau proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang dikelola secara aman didasarkan pada asumsi bahwa sumber air tersebut dapat menyediakan kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat dan memenuhi syarat kualitas air minum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sementara, kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), air tersedia sepanjang tahun, dan memenuhi kualitas fisik air minum dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: SKAM-RT Kemenkes.

Tautan Publikasi/Sumber Data: Kemkes.go.id.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase rumah tangga yang sumber air utamanya diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Air Minum, PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), UPT (Unit Pelaksana Teknis)/UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Kelompok Masyarakat/KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum), atau BUKS (Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri).

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan terlayani akses air minum jaringan perpipaan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berasal dari jaringan perpipaan (air ledeng atau air keran pada kuesioner Susenas) dibagi dengan jumlah Rumah Tangga Seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Tautan Publikasi/Sumber Data: Susenas KOR BPS.

Judul Publikasi/Sumber Data: <https://www.nawasis.org>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan****Institusi Penghasil:** Badan Pusat Statistik**Definisi**

Persentase rumah tangga yang sumber air utamanya bukan berasal dari jaringan perpipaan, berupa sumur pompa, sumur gali terlindung, mata air terlindung, dan air hujan; tidak termasuk air minum dari penjual keliling, dijual dari tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan terlayani akses air minum bukan perpipaan.

Metode/Rumus Penghitungan

100% dikurangi dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%).

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Susenas KOR BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase PDAM dengan kinerja sehat**

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat (PDAM) adalah PDAM yang memenuhi aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia, dengan nilai keseluruhan dari keempat aspek tersebut adalah lebih dari 2,8.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator maka semakin banyak persentase PDAM yang memiliki kinerja sehat.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah PDAM yang berkinerja sehat dibagi dengan jumlah PDAM total dikali 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Buku Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM, Kementerian PUPR 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://data.pu.go.id/dataset/kinerja-pdam>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Level Estimasi

Wilayah I (Pulau Sumatera), Wilayah II (Pulau Jawa), Wilayah III (Pulau Kalimantan dan Sulawesi), Wilayah IV (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Formula SDGs dari Sanitasi Layak adalah Fasilitas BAB sendiri/bersama; Jenis kloset: leher angsa; Tempat pembuangan: septik tank/ SPAL. Penyempurnan kondef dengan menambahkan khusus di wilayah pedesaan tempat pembuangan boleh berupa lubang tanah. Untuk Sanitasi Aman, kepemilikan fasilitas BAB adalah sendiri dan terhubung dengan SPAL atau menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan terlayani akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.

Metode/Rumus Penghitungan

1. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dibagi dengan jumlah rumah tangga total dikali 100 persen.
2. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi dengan jumlah rumah tangga total dikali 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Jumlah rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dikali dengan 100 (seratus), dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Interpretasi

Semakin rendah nilai indikator maka semakin sedikit jumlah rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dikali dengan 100 (seratus), dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Sirusa BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://sirusa.bps.go.id/sirusal/index.php/dasar/view?kd=14&th=2019>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tiga Tahun Sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau
2. Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi jumlah RT yang telah menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik dalam perkotaan.

Interpretasi

Memantau capaian rumah tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah di perkotaan. Semakin besar nilai persentase menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang terlayani. Layanan pengelolaan sampah dicapai melalui kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di rumah tangga yang meliputi kegiatan-kegiatan didalamnya sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan yaitu jumlah RT yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dalam periode sama, dinyatakan dalam persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Kementerian PUPR dan/atau Susenas MKP BPSJUM.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://pu.go.id/assets/media/1237949023LAKIP-Kementerian-PUPR-tahun-anggaran-2021.PDF>.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Satu dan/atau Tiga Tahun Sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 3: Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi



Indikator :

Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan

Institusi Penghasil: Badan SAR Nasional

Definisi

Rata-rata waktu atau kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan diukur sebagai rata-rata dari total 4 indikator yang terdiri atas (1) rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pelayaran; (2) rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penerbangan; (3) rata-rata *response time* pada penanganan bencana; dan (4) rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia.

Interpretasi

Waktu tanggap (*response time*) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, waktu yang dihitung mulai dari waktu berita kecelakaan diterima sampai dengan waktu berangkat operasi pencarian dan pertolongan. Semakin rendah waktu pencarian dan pertolongan, menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebagai rata-rata dari 4 indikator yang dijelaskan dalam keterangan.

Ukuran/Satuan: Menit.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Basarnas 2021;
2. Laporan Kinerja Basarnas 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://basarnas.go.id/storage/files/shares/LAKIP%202021/1.%20Lapkin%202021%20Badan%20Nasional%20Pencarian%20dan%20Pertolongan.pdf>
2. <https://basarnas.go.id/storage/files/shares/LAKIP%202022/1.%20Laporan%20Kinerja%202022%20Basarnas.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 4: Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan



Indikator :

Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Jumlah kabupaten/kota dengan neraca penyediaan air baku lebih besar dari kebutuhan air baku.

Interpretasi

Jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan penyediaan kapasitas air baku pada TA. 2024.

Metode/Rumus Penghitungan

Kapasitas penyediaan air baku terbangun (kumulatif) dibandingkan dengan asumsi kebutuhan air baku di setiap kabupaten/kota.

Ukuran/Satuan: Kabupaten/kota.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana target 2024 berdasarkan pagu alokasi anggaran.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.



SASARAN 5: Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi



Indikator :

Volume tampungan air per kapita

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Nilai volume tampungan air terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Interpretasi

Hasil perhitungan ini akan memberikan nilai volume rata-rata air yang tersedia untuk setiap individu dalam populasi yang dianalisis.

Ukuran/Satuan: Kumulatif, m³/kapita.

Metode/Rumus Penghitungan

Total kapasitas tampungan air terbangun dibandingkan dengan jumlah penduduk

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Buku-buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 Terbit Maret 2023 BPS;
2. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2022;
3. Bahan Informasi Bendungan dan Danau tanggal 1 Oktober 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://public.tableau.com/app/profile/andri.septian/viz/NeracaSumberDayaAir/Home>.
2. <https://pu.go.id/pustaka/bibliol/informasi-statistik-infrastruktur-pupr-2022/427J9>.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase luas sawah beririgasi**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Persentase luas sawah beririgasi terhadap luas lahan sawah.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Luas Daerah Irigasi yang di OP + tambahan luas irigasi 2020-2023) dibagi total luas sawah.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Data LBS (Luas Baku Sawah) oleh BPS;
2. Capaian Renstra 2010-2019 pada buku Renstra Ditjen SDA 2020-2024;
2. Data capaian Renstra 2020-2022 berdasarkan data pemantauan Dit. SSPSDA;
3. Rencana capaian 2023 berdasarkan target pagu alokasi anggaran.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi**

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi merupakan indikator terbaru sesuai dengan KemenPUPR dalam buku kamus PU tentang peningkatan luas daerah yang diprioritaskan mendapatkan pengairan khusus.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Luas daerah irigasi yang selesai mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi TA. 2022 (DI. Mrican, Way Sekampung) dan TA. 2023 (DI Pamukkulu, DI Kedung Putri).

Ukuran/Satuan: Hektar.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Permen PUPR No. 14 Tahun 2015;
2. Diolah dari data pelaksanaan modernisasi irigasi (Dit. Irwa);
3. Bahan informasi pertemuan BPK pada 9 November 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.



PROGRAM PRIORITAS 2: Infrastruktur Ekonomi

SASARAN 1: Meningkatkan konektivitas wilayah



Indikator :

Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Jalan mantap adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan tidak mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Interpretasi

Menggambarkan kualitas dan kondisi jalan, semakin tinggi persentase mantap jalan maka semakin meningkat kualitas jalan.

Metode/Rumus Penghitungan

Acuan yang digunakan untuk mengukur kemantapan jalan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: Buku Kondisi Jalan Nasional 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://binamarga.pu.go.id/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Buku%20Kondisi/BUKU%20KONDISI%20JALAN%20NASIONAL%202020%20Semester%20II%20FINAL.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi**

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPJT.

Definisi

Indikator ini menyatakan panjang jalan tol baru yang dibangun dan/atau beroperasi selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).

Interpretasi

Menghitung panjang jalan tol yang terbangun dan/atau yang telah beroperasi. Semakin bertambah jumlah panjang jalan tol terbangun/ beroperasi, maka dapat meningkatkan aksesibilitas dalam rangka pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi dalam Ukuran/Satuan kilometer (km).

Ukuran/Satuan: Km.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Kementerian PUPR;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA 2020 Sekretariat /badan Pengatur Jalan Tol.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf
2. <https://bpjt.pu.go.id/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Renstra%20dan%20Lakip/LAKI P-SET-BPJT>.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Panjang jalan baru yang terbangun**

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Indikator yang menyatakan panjang jalan baru yang terbangun selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam Ukuran/Satuan kilometer (km).

Interpretasi

Menghitung panjang jalan baru yang terbangun. Semakin bertambah jumlah panjang jalan baru yang terbangun, maka dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung pengembangan kawasan dan akses simpul transportasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang jalan baru yang terbangun dalam Ukuran/Satuan kilometer (km).

Ukuran/Satuan: Km.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Tidak.

**Indikator :****Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)**

Institusi Penghasil: Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Definisi

Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) merupakan indikator peningkatan konektivitas wilayah DJKA, berupa panjang jalan/rel KA yang terbangun dari periode ke periode tertentu (misal 2015-2017).

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang rel KA yang terbangun ditotal dari periode ke periode terkini, dinyatakan dalam kilometer (kmsp).

Ukuran/Satuan: (Kumulatif) (km'sp).

Judul Publikasi/Sumber Data

Buku Statistik Bidang Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Tautan Publikasi/Sumber Data

[https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_\(Semester_I\)_BAR_U.pdf](https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_(Semester_I)_BAR_U.pdf).

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Semesteran.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar**

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar dinyatakan dalam jumlah lokasi pelabuhan yang memenuhi standar pelayanan berdasarkan kriteria.

Ukuran/Satuan: Lokasi.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210507104008.LKIP_DIRJEN_HUBLA_TAHUN_2020.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah rute subsidi tol laut**

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah rute pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang (tol laut) pada tahun perencanaan.

Interpretasi

Menunjukkan jumlah rute yang dilayani tol laut, semakin banyak rute menunjukkan semakin banyak daerah yang mendapat layanan angkutan tol laut.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rute tol laut yang mendapat subsidi dinyatakan dalam banyaknya rute pada periode tertentu.

Ukuran/Satuan: Rute.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210709005225.DOKUMEN_RENSTRADA_DITJEN_HUBLA_TAHUN_2020-_2024.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2019-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif)**

Unit Kerja Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah pelabuhan penyeberangan yang baru dibangun dalam periode suatu tahun dari pengembangan hingga selesai. Beberapa pelabuhan penyeberangan juga terdapat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti KSPN Danau Toba.

Interpretasi

Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun secara kumulatif pada tahun 2020-2024.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bandara yang dibangun (kumulatif) merupakan jumlah total bandara yang dibangun dalam periode tahun tertentu sampai tahun terkini, dinyatakan dalam jumlah lokasi.

Ukuran/Satuan: Kumulatif, lokasi.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210709005225.DOKUMEN_RENSTRA_DITJEN_HUBLA_TAHUN_2020_-_2024.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahun Sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)**

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Permenhub No. PM39 Tahun 2019). Sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas suatu daerah.

Interpretasi

Jumlah bandara yang terbangun secara kumulatif dari tahun 2020-2024 dengan evaluasi tiap tahun untuk melihat apakah sudah sesuai target pembangunan atau belum.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bandara yang dibangun (kumulatif) merupakan jumlah total bandara yang dibangun dalam periode tahun tertentu sampai tahun terkini, dinyatakan dalam jumlah lokasi.

Ukuran/Satuan: Kumulatif, lokasi.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://hubud.dephub.go.id/hubud/websitel/assets/file/renstra/Renstra_DJU_2020-2024.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahun Sekali (evaluasi capaian per tahun).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah rute jembatan udara**

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Definisi

Indikator ini menjelaskan tentang rute jembatan udara. Jembatan udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandara ke bandara lainnya dan/atau dari bandara ke bandara di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Pembukaan rute jembatan baru merupakan kerja sama Kemendag, Kemenhub, Pemda, dan operator angkutan udara, serta otoritas bandara.

Interpretasi

Menunjukkan jumlah rute yang dilayani jembatan udara, semakin banyak rute menunjukkan semakin banyak daerah yang mendapat layanan angkutan udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah rute jembatan udara yang dioperasikan dalam periode tahun tertentu, dinyatakan dalam jumlah rute.

Ukuran/Satuan: Rute.

Judul Publikasi/Sumber Data

- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024;
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: KP 272 Tahun 2019;
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: KP 244 Tahun 2020;
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: KP 254 Tahun 2021;
- Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor: PR 24 Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <http://hubud.dephub.go.id/website/RRenstra.php>.

Tahun Data Tersedia: 2020-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 3: Infrastruktur Perkotaan

SASARAN 1: Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan



Indikator :

Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover/underpass* (kumulatif) (kota)

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Indikator ini menyatakan jumlah kota yang dibangun *flyover/underpass* sebagai program untuk mengurangi kepadatan, penumpukan lalu lintas, dan menghindari kecelakaan di jalur rel kereta api.

Interpretasi

Menghitung jumlah pembangunan infrastruktur jalan perkotaan (perlintasan tidak sebidang KA/*flyover/underpass*) mengatasi kemacetan arus lalu lintas dalam kawasan perkotaan.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kota yang terdapat *flyover/underpass*, dinyatakan dalam jumlah kota.

Ukuran/Satuan: Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan

Institusi Penghasil: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar pada kota yang dikembangkan. Sistem angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dengan prasyarat tertentu (LPM ITB, 1997). Banyak usulan jenis angkutan umum massal yang banyak dikembangkan di kota besar, seperti model oleh Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ), seperti dikutip Djoko Suwandono dari Undip yaitu (1) *Mass Rapid Transit*, (2) *Heavy Rail Transit*, (3) *Light Rail Transit*, (4) *Metro*, (5) *Sistem Kereta Komuter*, dan (6) *Bus Rapid Transit*. Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan dalam kota besar tertentu.

Interpretasi

-

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kota besar yang terdapat sistem angkutan umum massal, dinyatakan dalam jumlah kota.

Ukuran/Satuan: Kota.

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepEl/2020/SK_Renstra_Ditjen_Hubdat_2020_-_2024.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahun Sekali.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota

Institusi Penghasil: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani pemerintah melalui peremajaan kota. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Peremajaan permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan MBR melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rumah, permukiman, dan lingkungan hunian di kawasan kumuh supaya lebih baik, mewujudkan subsidi silang antara pemerintah dan swasta dalam peremajaan kawasan kumuh, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditinggal di kawasan kumuh.

Interpretasi

Semakin besar nilai ini maka semakin banyak kawasan permukiman kumuh yang tertangani melalui peremajaan kota.

Metode/Rumus Penghitungan

Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan terakhir (per September 2021) dalam Kepmen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 167/KPTS/M/2020.

Ukuran/Satuan: Kawasan.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020-2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 4: Energi dan Ketenagalistrikan

SASARAN 1: Meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien



Indikator :

Jumlah produksi tenaga listrik

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Produksi tenaga listrik atau dalam narasi lain berupa penyediaan tenaga listrik dari PLN dalam periode tahun tertentu dalam Ukuran/Satuan *gigawatt per hour* (GWh).

Interpretasi

Mengetahui jumlah produksi tenaga listrik di wilayah perusahaan PT PLN (persero) yang digunakan untuk perencanaan rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan (*gigawatt*) setiap jamnya, dinyatakan dalam GWh.

Ukuran/Satuan: GWh.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;
2. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;
3. Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf.
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.
3. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Penurunan emisi CO₂ pembangkit**

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan penurunan emisi CO₂ yang bersumber dari pembangkit. Penurunan emisi CO₂ pembangkit sebagai salah satu perwujudan RAN-GRK, bertujuan mengetahui jumlah emisi CO₂ yang dapat diturunkan karena operasional pembangkit (seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

Interpretasi

Mengetahui perkembangan emisi CO₂ sub sektor pembangkitan di Indonesia yang digunakan sebagai acuan/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan energi yang berwawasan lingkungan khususnya untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), pengalihan bahan bakar dan pemanfaatan gas buang.

Metode/Rumus Penghitungan

Penurunan emisi oleh aksi mitigasi dalam periode y (ton CO₂) (PE_y) merupakan selisih antara Emisi *Baseline* (E_{By}) dengan Emisi Aksi Mitigasi (EP_y), dinyatakan dalam juta ton CO₂.

Ukuran/Satuan: Juta ton.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf
3. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah pengguna listrik**

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah pengguna listrik atau pelanggan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), secara kumulatif sampai dengan periode tahun terkini.

Interpretasi

Mengetahui jumlah pelanggan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengguna listrik (kumulatif) dinyatakan dalam jumlah pelanggan total PLN sampai dengan tahun periode terkini, dinyatakan dalam ribu Rumah Tangga (RT).

Ukuran/Satuan: Ribu rumah tangga-kumulatif.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021;

Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf
3. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf

Tahun Data Tersedia: 2020, 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota**

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga dengan satuan Sambungan Rumah (SR). Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Jaringan gas kota bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Interpretasi

Menggambarkan jumlah sambungan rumah jaringan distribusi gas bumi yang telah terpasang.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota atau untuk rumah tangga dihitung secara kumulatif, dengan pertambahan tiap tahun, dinyatakan dalam jumlah sambungan atas rumah tangga.

Ukuran/Satuan: (kumulatif, Sambungan Rumah).

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kesdm-2020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif**

Institusi Penghasil: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Definisi

Indikator ini menjelaskan jumlah kapasitas kilang minyak hingga periode tahun terkini di Indonesia. Kilang minyak atau dalam Bahasa Inggris disebut *oil refinery* adalah fasilitas industri atau pabrik yang mengolah minyak mentah hasil eksploitasi menjadi berbagai jenis produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lainnya berupa bahan baku bagi industri petrokimia.

Interpretasi

Menggambarkan jumlah kumulatif kapasitas produksi semua kilang minyak dalam negeri.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah kapasitas kilang minyak dihitung dengan secara kumulatif, dengan penambahan tiap tahun, dinyatakan dalam BPCD.

Ukuran/Satuan: *Barrel per Calendar Day/BPCD*.

Judul Publikasi/Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kesdm-2020.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 5: Transformasi Digital

SASARAN 1: Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi



Indikator :

Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata total nilai tambah yang dihasilkan sektor TIK per tahunnya melalui berbagai indikator TIK.

Interpretasi: -

Metode/Rumus Penghitungan

Pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi dihitung dari perbandingan antar periode (Q to Q dan Y on Y) PDB sektor informasi dan komunikasi atas dasar harga konstan.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: BPS.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html>.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase pengguna internet**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang menggunakan internet dalam kurun periode tertentu. Indikator ini merupakan bagian dari indikator sektor TIK.

Interpretasi: -

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase pengguna internet yaitu jumlah penduduk yang mengakses internet dibagi dengan jumlah total penduduk, dikalikan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019, BPS, 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>.

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam****Institusi Penghasil:** Badan Pusat Statistik**Definisi**

Telepon genggam/telepon seluler, termasuk *smartphone* adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

Interpretasi

Menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Metode/Rumus Penghitungan: -

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, BPS, 2020.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=1558&th=2020>.

Tahun Data Tersedia: -

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Triwulanan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim**

**JUMLAH
INDIKATOR PN**

5

**JUMLAH
INDIKATOR PP**

17





PRIORITAS NASIONAL 6



METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim



SASARAN 1: Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup



Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Interpretasi

Semakin tinggi nilai IKLH nasional/daerah, menunjukkan kualitas lingkungan hidup semakin baik. Capaian IKLH di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori:

- 1) Sangat Kurang: $0 \leq \text{IKLH} < 25$;
- 2) Kurang: $25 \leq \text{IKLH} < 50$;
- 3) Sedang: $50 \leq \text{IKLH} < 70$;
- 4) Baik: $70 \leq \text{IKLH} < 90$;
- 5) Sangat Baik: $90 \leq \text{IKLH} \leq 100$.

Metode/Rumus Penghitungan

IKLH Nasional

$$\text{IKLH} = (0.3400 \times \text{IKA}) + (0.4280 \times \text{IKU}) + (0.1040 \times \text{IKTL}) + (0.0209 \times \text{IKEG}) + (0.099 \times \text{IKAL})$$

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim



Indikator :

Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/ Bappenas
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB merupakan penjumlahan antara penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dengan penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. RPJMN 2020-2024;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024; dan
3. Buku Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3IK>;
2. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxmAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>;
3. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 3: Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*



Indikator :

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/ Bappenas.

Definisi

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan adalah nilai penurunan emisi GRK di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi di titik tahun tertentu yang terjadi dengan melakukan kegiatan pembangunan rendah karbon. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* untuk periode yang sama.

Indikator ini mengacu terhadap metadata indikator Prioritas Nasional 6 dengan nomenklatur (persentase penurunan emisi GRK).

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan emisi GRK baik tahunan maupun kumulatif menunjukkan capaian yang semakin baik sebagai indikasi komitmen dan keberhasilan dalam mengurangi jejak karbon yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Secara umum, penghitungan nilai persentase penurunan emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai emisi sendiri didapat dari Data Aktivitas dikalikan dengan Faktor Emisi.

$$E = DA \times FE$$

Keterangan:

- E : Emisi GRK (ton)
 DA : Data Aktivitas (T_i)
 FE : Faktor Emisi (ton/T_i)

Catatan:

- *Activity unit* (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya penanaman pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor Emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 13,99 ton C/ha.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Persentase penurunan intensitas emisi GRK

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/ Bappenas.

Definisi

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK adalah nilai capaian penurunan emisi GRK per satuan *output* ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan intensitas emisi GRK menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan nilai persentase penurunan intensitas emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan intensitas emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai intensitas penurunan emisi sendiri didapat dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi dengan nilai PDB sebagaimana ditampilkan pada formula berikut:

$$\begin{array}{c} \text{Intensitas Emisi} \\ \downarrow \\ \frac{\text{CO}_2}{\text{GDP}} = \frac{\text{Nilai Emisi Aktual}}{\text{GDP}} \end{array}$$

Catatan:

- Intensitas emisi/karbon adalah jumlah emisi GRK per satuan *output* ekonomi, yang biasanya diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) di tingkat nasional.
- Nilai emisi aktual adalah perhitungan capaian penurunan emisi pada tahun berjalan.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2019.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN 1: Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut



Indikator :

Indeks Kualitas Air (IKA)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Interpretasi

Semakin tinggi Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;

- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari P_{ij} sebagai berikut:
- i. $IKA = 100$, untuk $P_{ij} \leq 1$,
 - ii. $IKA = 80$, untuk $P_{ij} > 1$ dan $P_{ij} \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
 - iii. $IKA = 60$, untuk $P_{ij} > 4,67$ dan $P_{ij} \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas III terhadap kelas I)
 - iv. $IKA = 40$, untuk $P_{ij} > 6,32$ dan $P_{ij} \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai P_{ij} dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I)
 - v. $IKA = 30$ untuk $P_{ij} > 6,88$
- 4) Selanjutnya nilai IKA setiap provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam provinsi tersebut

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Definisi

Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas air laut dan memperbaiki kualitas air laut karena tercemar.

Interpretasi

Skor yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air laut yang lebih baik, sementara skor yang lebih rendah menunjukkan adanya masalah atau pencemaran.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan nilai IKAL mengacu pada *National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI)*.

Parameter:

TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat.

Rumus:

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Keterangan:

- Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i
- W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i
- n : Jumlah parameter kualitas air laut

Satuan : (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan pertama.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Interpretasi

Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Semen-tara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan IKU dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Hitung rata-rata masing masing parameter NO_2 dan SO_2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap)
- b. Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO_2 dan SO_2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO_2 dan SO_2 pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran)
- c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO_2 dan SO_2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota
- d. Menghitung indeks udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{EU} - 0.1)]$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref_{EU} dan NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO_2 Ref_{EU}
- Baku mutu udara ambien Ref_{EU} untuk SO_2 adalah $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO_2 adalah $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 38 provinsi.
- Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:
 - 1) Sangat Kurang: $0 \leq IKU < 30$;
 - 2) Kurang: $30 \leq IKU < 50$
 - 3) Cukup: $50 \leq IKU \leq 70$;
 - 4) Baik: $70 \leq IKU \leq 90$;
 - 5) Sangat Baik: $90 < IKU \leq 100$

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)

Institusi Penghasil: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Definisi

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut atau disebut juga dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot.

Kualitas ekosistem gambut diukur menggunakan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keberadaan kanal, areal yang terbakar, dan tutupan lahan.

Interpretasi

Semakin tinggi Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

dimana

LTL = luas Tutupan Lahan

LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Capaian IKL di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori:

1) Sangat Kurang: $0 \leq IKL < 25$;

2) Kurang: $25 \leq IKL < 50$

3) Sedang: $50 \leq IKL < 70$;

4) Baik: $70 \leq IKL < 90$;

5) Sangat Baik: $90 \leq IKL \leq 100$.

Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://ppkl.link/Buku-IKLH-2022>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan Pertama.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

SASARAN 1: Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat



Indikator :

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana

Institusi Penghasil: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia menunjukkan capaian yang semakin baik di bidang penanggulangan bencana.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB *existing* terhadap potensi kehilangan PDB terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB *existing* dikalikan 100 persen.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Rencana Strategis BNPB 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>
2. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=IsIC58zDNW9FxMAYyz/download?files=Renstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf&path=%252F&type=application/pdf>

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Lima Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim**

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas.

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka kehilangan PDB sektor yang terkena dampak oleh bahaya iklim di Indonesia.

Interpretasi

Semakin tinggi persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor yang terkena dampak oleh bahaya iklim di Indonesia menunjukkan capaian yang semakin baik dari upaya pembangunan berketahanan iklim.

Metode/Rumus Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bahaya iklim dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB sektor *existing* terhadap potensi kehilangan PDB sektor terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB sektor *existing* dikalikan 100 persen. Perhitungan penurunan potensi kehilangan PDB per sektor dan per kategori berbeda, lebih detail dapat melihat pada publikasi rujukan.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Buku Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Terbitan pertama (rencana akan diterbitkan tahunan).

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

Institusi Penghasil:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Definisi

Indikator ini menjelaskan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana kepada masyarakat. Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirene, keuntungan, dan lain sebagainya.

Interpretasi

Semakin cepat penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat menunjukkan capaian yang semakin baik dapat menyebarkan informasi penting guna meminimalkan risiko dan dampak bencana.

Metode/Rumus Penghitungan

Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dihitung berdasarkan waktu dalam satuan menit rata-rata melalui berbagai macam platform komunikasi, antara lain *Warning Receiver Systems (WRS)*, *web*, *SMS*, *Twitter*, dan media lainnya.

Ukuran/Satuan: Menit.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Rencana Strategis BMKG 2020-2024;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://cdn.bmkg.go.id/web/RENCANA-STRATEGIS-BMKG-TAHUN-2020-2024.pdf>;
2. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 3: Pembangunan Rendah Karbon

SASARAN 1: Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan



Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) khususnya pada sektor energi (termasuk subsektor transportasi dan subsektor energi di bidang industri) dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi menunjukkan capaian yang semakin baik di bidang pembangunan energi berkelanjutan.

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat emisi GRK yang tercantum dalam inventarisasi sektor energi dihitung menggunakan Tier 1 metode IPCC 2006 dengan nilai faktor emisi *default* dan data aktivitas dalam unit energi (SBM, setara barel minyak) yang dikumpulkan dari Tabel Kesetimbangan Energi (*Energy Balance Table*) pada *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI), yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Metodologi perhitungan sektor transportasi yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan pada aksi PRK transportasi darat khususnya untuk aksi pembangunan ITS, reformasi sistem transit-BRT dan penerapan pengendalian dampak lalu lintas (ATCS) sudah berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD GRK bidang energi yang diterbitkan Bappenas dan sejak tahun 2019 telah diintegrasikan ke dalam Sistem Pelaporan AKSARA. Faktor emisi atau serapan GRK menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi yang dikeluarkan oleh Pertamina (2006) berdasarkan kandungan karbon yang terdapat di dalam jenis bahan bakar.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>
2. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi

Level Estimasi 1: Nasional/sub-nasional;

Level Estimasi 2: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor kehutanan dan lahan dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pencegahan deforestasi dan pemulihan lahan terdegradasi.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah IPCC *Guidelines* 2006 (IPCC, 2006) dengan mengombinasikan faktor emisi *country/site specific* dan faktor emisi *default* IPCC.

Terdapat tiga metode perhitungan emisi untuk sektor kehutanan, yaitu: 1) pendugaan emisi/serapan dari perubahan stok karbon, 2) pendugaan emisi dari dekomposisi gambut, dan 3) pendugaan emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Peta tutupan lahan yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan data aktivitas untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Terdapat 2 metode untuk sektor pertanian, yaitu: 1) IPCC 2019 *Tier-2*, yang diratifikasi menjadi Metode/Rumus Penghitungan Mitigasi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian; dan 2) ISCC 205 *Greenhouse Gas Emissions Version 3.0*.

Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2022;
2. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories;
3. ISCC EU 205 – Greenhouse Gas Emissions.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumenligrk/lapigrkmrv2019.pdf>;
2. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumenligrk/LAP_igrk2020.pdf;
3. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html>;
4. https://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=619:metodologi-perhitungan-mitigasi-dan-serapan-gas-rumah-kaca-2020&id=1:buku&Itemid=449&start=20;
5. https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/05/ISCC_EU_205_Greenhouse-Gas-Emissions-v4.0.pdf;
6. Dokumen Bappenas sedang dalam tahap finalisasi.

Tahun Data Tersedia: 2021, 2023

Level Estimasi

Level Estimasi 1: nasional

Level Estimasi 2: nasional

Level Estimasi 3: internasional

Level Estimasi 4: nasional

Level Estimasi 5: internasional

Level Estimasi 6: nasional/sub-nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor limbah dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengelolaan limbah.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor limbah mengacu pada metode IPCC *Guidelines* 2006 yang mana tingkat emisi GRK di sektor limbah bergantung pada jumlah limbah yang diolah, karakteristik dan tipe pengolahannya. Emisi GRK yang dihitung juga bergantung pada Metode/Rumus Penghitungannya. Terdapat perbaikan untuk mengestimasi emisi GRK dari pengelolaan sampah di TPA yaitu dengan menggunakan metode FOD (*First Order Decay*) yang merupakan perbaikan dari metode *mass balance* yang digunakan pada pelaporan SNC. Selain itu nilai parameter lokal untuk komposisi sampah dan kandungan bahan kering (*dry matter content*) juga telah digunakan dalam estimasi penghitungan emisi menggunakan metode FOD. Perbaikan juga telah dilakukan untuk estimasi emisi GRK dari limbah cair industri, untuk beberapa jenis industri sudah menggunakan parameter yang didapatkan dari industri secara langsung seperti debit air limbah, COD dan tipe pengolahan limbah yang digunakan.

Satuan: nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>;
2. http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/admincms/downloads/publications/Pedoman_teknis_penghitungan_baseline_emisi_GRK_sektor_pengolahan_limbah.pdf.

Tahun Data Tersedia: 2021.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU

Institusi Penghasil:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV)
2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Lingkungan Hidup Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI))

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor IPPU dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengembangan industri hijau.

Metode/Rumus Penghitungan

Estimasi nilai emisi GRK untuk sektor proses industri dan penggunaan produk menggunakan metodologi yang tercantum pada pedoman IPCC 2006. *Tier 1* memerlukan data aktivitas berupa data agregat statistik produksi produk industri, jumlah penggunaan karbon, pelumas, lilin dan lain-lain secara aktual dalam skala nasional. Pengumpulan data berdasarkan pada jenis industri yang pada salah satu proses atau keseluruhan proses pembuatan produk mengemisikan atau berpotensi mengemisikan GRK. Pengembangan menuju *Tier 2* sudah dilakukan untuk industri semen, amonia, dan aluminium. Ketiga industri tersebut sudah mengembangkan faktor emisi lokal spesifik untuk industri mesin melalui penelitian dan proyek *Clean Mechanism Development* (CDM). Adanya pengembangan nilai faktor emisi ini akan mengakibatkan kualitas perhitungan emisi semakin baik, di samping menurunkan nilai *uncertainty*.

Satuan: nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Karbon;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>.

2. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2021, 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan

Institusi Penghasil:

1. Kementerian PPN/Bappenas
2. Direktorat Lingkungan Hidup
3. Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI)

Definisi

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor pesisir dan kelautan dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Interpretasi

Semakin tinggi penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan menunjukkan capaian yang semakin baik dalam pengelolaan pesisir dan kelautan.

Metode/Rumus Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor pesisir dan laut dalam hal ini *mangrove* menggunakan pendekatan model *invest* dan metode *stock difference* dalam IPCC 2014 *supplement to IPCC 2006 IPCC Guidelines for National Green Houses Gas: Wetland*.

Satuan: Nilai.

Judul Publikasi/Sumber Data

Estimating Carbon Emission and Baseline for Blue Carbon Ecosystems in Indonesia.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/530/1/012030/pdf>
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/530/1/012030/pdf>

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah indikator dapat diakses umum: Ya.

**Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik**

**JUMLAH
INDIKATOR PN**

6

**JUMLAH
INDIKATOR PP**

15



PRIORITAS NASIONAL 7





**METADATA INDIKATOR
PEMBANGUNAN**

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Metadata Indikator Prioritas Nasional 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik



SASARAN 1: Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal



Indikator :

Indeks Demokrasi Indonesia

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Pusat dan provinsi.

Interpretasi

Indeks bernilai pada rentang 1 – 100 dan dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), kurang (indeks < 60). Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru diawali dengan penentuan bobot dari masing-masing aspek dan indikator. Proses tersebut menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Analytical Hierarchy Process* merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas. Metode ini mampu menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sepenuhnya mengandalkan penilaian ahli dengan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli yang paham persis tentang subjek/substansi penelitian. Pada proses AHP dilaksanakan oleh 20 orang ahli yang memiliki *teoretical* dan *empirical background* yang bervariasi. Adapun metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Metode pengambilan data pada IDI dilakukan melalui (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, dan diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) memperoleh informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. FGD dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Sedangkan peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, akademisi, pers, tokoh masyarakat, serta OMS organisasi masyarakat sipil (ormas).

Ukuran/Satuan: Skor.

Judul Publikasi/Sumber Data

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), BPS, 2022.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MSMyI-metode-baru--indeksdemokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional, Pusat, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Institusi Penghasil

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Definisi

Merupakan alat ukur kepercayaan terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Interpretasi

Hasil survei adalah angka dengan nilai 0-100 persen, di mana nilai 0 persen menginterpretasikan tingkat kepercayaan yang rendah, dan nilai 100 persen menginterpretasikan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode perhitungan dilakukan melalui survei. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diterima. Survei dibagi ke dalam 3 aspek: akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat. Terdapat beberapa isu prioritas yang dijadikan objek survei (Tahun 2020: Pilkada, COVID-19, *Stunting*, PEN, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Digital, dan Gerakan Indonesia Bersih). Isu tersebut merupakan konten yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat melalui sejumlah media. Masyarakat yang menjadi responden adalah yang terpapar dengan informasi pemerintah, dengan kriteria:

- Rentang usia 17-55 tahun;
- Laki-laki/perempuan;
- Rutin membaca berita *online* dan tradisional (minimal 2x dalam seminggu);
- Memiliki dan aktif di media sosial;
- Tidak bekerja atau memiliki kerabat yang bekerja di perusahaan riset, media massa, dan institusi pemerintahan.

Survei dilaksanakan selama 6 minggu, dimulai dari bulan Oktober/November

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data

Survei Akses dan Kualitas Informasi Prioritas, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://djikp.kominfo.go.id/kategorilaporan-tahunan>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 2: Optimalnya Kebijakan Luar Negeri



Indikator :

Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Institusi Penghasil: Kementerian Luar Negeri

Definisi

Indeks yang mengukur pengaruh terhadap pengambilan kebijakan isu-isu di tingkat regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional dan multilateral.

Interpretasi

Pencapaian indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional menunjukkan:

4,01-5: Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang tinggi (*high*).

3,01-4: Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup tinggi (*medium-high*).

2,01-3: Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup rendah (*medium-low*).

1–2: Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang rendah (*low*).

Metode/Rumus Penghitungan

Indeks ini terdiri dari 2 sub indeks yaitu:

1. Sub indeks 1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral (bobot 70%);
2. Sub indeks 2: Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Asean dan Multilateral (bobot 30%).

Rumus:

$(70\% \times \text{realisasi sub indeks 1}) + (30\% \times \text{realisasi sub indeks 2})$

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Kepmenlu No. 27/B/RO/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2023, Kementerian Luar Negeri.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemlu.go.id/download/>

L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tIbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5IZ2VyaS9UYWwh1biUyMDIwMjlvS2VwbWVubHUIIMjBQZXRhJTlwU3RyYXRIZ2kIMjBkYW4IMjB NYW51YWwIMjBJS1UIMjBLZW1Ibmx1JTlwVEEIMjAyMDlyX0ZpbmFsLnBkZg== .

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**SASARAN 3: Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap****Indikator :**

Indeks Pembangunan Hukum

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Nilai yang dihasilkan dari pengukuran pilar, variabel, dan indikator pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum nasional.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai IPH semakin baik perwujudan sistem hukum nasional yang telah dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Metode/Rumus Penghitungan

Pengumpulan data IPH 2020 terdiri dari tiga sumber yaitu data administratif K/L, survei masyarakat, dan survei pakar. Hal ini merupakan pengembangan dari penghitungan IPH tahun 2015-2019 yang baru menggunakan data administratif K/L.

*IPH Tahun 2020 masih dalam proses perhitungan.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bappenas.go.id/files/lampid/Lampiran%20Pidato%20Presiden%202021.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi : Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik****Indikator :****Indeks Pelayanan Publik Nasional**

Institusi Penghasil: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Definisi

Indeks Pelayanan Publik menggambarkan kemampuan/kualitas pelayanan publik instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga fokus pada pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat.

Interpretasi

- **4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima**

Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.

- **4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik**

Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.

- **3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik**

Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

- **3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (Dengan Catatan)**

Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

- **2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup**

Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.

- **2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (Dengan Catatan)**

Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.

- **1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk**

Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

- **1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk**

Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

- **0 - 1,00: Kategori F/Gagal**

Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Metode/Rumus Penghitungan

Pengukuran IPP mengacu pada Permen-PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Instrumen PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) formulir penilaian, F-01 (diisi oleh unit lokus), F-02 (diisi oleh evaluator) bobot 75% dan F-03 (diisi oleh pengguna layanan) bobot 25%. Selanjutnya, nilai indeks pelayanan publik dihitung dengan

rumus: $75\% \text{ nilai indeks formulir-02} + 25\% \text{ nilai indeks formulir-03}$.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Laporan Kinerja, Kementerian PAN RB Tahun 2022.
2. Laporan Kinerja Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Tahun 2022
3. Permen-PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
4. Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen2/akuntabilitaskinerjallaporan-kinerja/file/6782-laporan-kinerja-lakip-2022>
2. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6813-lakip-deputi-bidang-pelayananpublik-tahun-2022>
3. jdih.menpan.go.id.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



SASARAN 5: Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator :

Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya

Institusi Penghasil: Kementerian Pertahanan – TNI

Definisi

Indikator ini menjelaskan tentang proporsi luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya dibagi luas wilayah NKRI.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data: -

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



PROGRAM PRIORITAS 1: Konsolidasi Demokrasi

SASARAN 1: Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif



Indikator :

IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (6) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik pada Kader Partai Politik.

Interpretasi

Indeks bernilai pada rentang 1 – 100 dan dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), kurang (indeks < 60). Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan skor IDI pada aspek kapasitas lembaga demokrasi didasarkan pada 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) memperoleh informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Ukuran/Satuan: Skor.

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2MiMyI-metode-baru--aspekindeksdemokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional, Pusat, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****IDI Aspek Kebebasan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; dan (7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Interpretasi

Indeks bernilai pada rentang 1 – 100 dan dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), kurang (indeks < 60). Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan skor IDI pada aspek kebebasan didasarkan pada 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita Online); (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I; dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) memperoleh informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Satuan: Skor.

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2IMjE2MiMyI-metode-baru--aspekindex-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional, Pusat, dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****IDI Aspek Kesetaraan**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kesetaraan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kesetaraan gender, (2) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, (3) anti monopoli sumber daya ekonomi, (4) akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, (5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, (6) akses masyarakat terhadap informasi publik, dan (7) kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Interpretasi

Indeks bernilai pada rentang 1 – 100 dan dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), kurang (indeks < 60). Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan skor IDI pada aspek kebebasan didasarkan pada 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) memperoleh informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Ukuran/Satuan: Skor.

Judul Publikasi/Sumber Data: Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/idi/statistics-table/2/MjE2MiMjYl-metode-baru--aspek-indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional--pusat--dan-provinsi.html>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional, Pusat dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :**

Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik

Institusi Penghasil:

1. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo
2. Komisi Informasi Pusat

Definisi

Jumlah dokumen menggambarkan kebutuhan jumlah kebijakan/regulasi pada tahun berjalan Indikator ini menjelaskan tentang jumlah regulasi/kebijakan yang terintegrasi sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik. Asas keterbukaan informasi publik terdiri atas (1) terbuka dan dapat diakses siapapun; (2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (3) cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana; dan (4) dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.

Interpretasi

Jumlah dokumen yang dihasilkan disesuaikan dengan asas keterbukaan informasi publik. Kuantitas dokumen tiap tahunnya, bukan menjadi gambaran atas baik atau buruknya tata kelola informasi dan komunikasi publik. Namun, merupakan pedoman yang harus digunakan oleh kementerian/lembaga/daerah.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah dokumen yang sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik, dinyatakan dalam jumlah dokumen.

Catatan:

Output indikator ini merupakan turunan dari aturan/regulasi yang ada. *Output* dari indikator tersebut merupakan turunan dari aturan yang sudah ada (UU 14/2008 tentang KIP dan Inpres 9/2015), baik dalam bentuk regulasi/kebijakan/kajian, contoh:

1. Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo;
2. Permenkominfo No. 14 Tahun 2019 tentang Juknis Jabfung Bidang Kominfo;
2. Kajian Kerangka Komunikasi Publik Nasional.

Satuan: Dokumen.

Judul Publikasi/Sumber Data

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 2008;
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik: 2015.

Tautan Publikasi/Sumber Data: -

Tahun Data Tersedia: 2008.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

SASARAN 1: Meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional



Indikator :

Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral

Institusi Penghasil: Kementerian PPN/Bappenas

Definisi

Indeks menjelaskan peran kepemimpinan Indonesia yang dihitung berdasarkan jumlah forum regional dan multilateral yang dipimpin oleh Indonesia pada tahun berjalan, termasuk keberhasilan pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI).

Interpretasi

Indikator diolah berdasarkan data jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia dan jumlah pencalonan yang berhasil sehingga selanjutnya dihasilkan data jumlah forum strategis yang memengaruhi pencapaian kepemimpinan Indonesia pada tingkat regional dan global. Semakin banyak jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia menunjukkan peran yang semakin besar di dunia internasional.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pertemuan strategis yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan strategis yang berhasil pada tahun berjalan.

Ukuran/Satuan: Forum.

Judul Publikasi/Sumber Data

Kepmenlu No. 27/B/RO/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2023, Kementerian Luar Negeri, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tIbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWw1biUyMDIwMjlvS2VwbWVubHUIIMjBQZXRhJTJwU3RyYXRIZ2kIMjBkYW4IMjBjBNYwS1YWwIMjBJS1UIMjBLZW1lbnx1JTlwVEEIMjAyMDIyX0ZpbmFsLnBkZg==>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.



Indikator :

Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Institusi Penghasil: Kementerian Luar Negeri

Definisi

Indeks yang mengukur kesan ataupun pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional. Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu *tourism & socio-culture, economy, dan governance and rule of law*.

Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (<https://citraindonesia.kemlu.go.id>). Kuesioner disebar oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja Negara Akreditasi/wilayah kerja tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah RI.

Interpretasi

Keterangan capaian Indeks:

4,21 – 5,00: Sangat Baik

3,41 – 4,20: Baik

2,61 – 3,40: Cukup

1,81 – 2,60: Kurang

1,00 – 1,80: Tidak Baik

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Indeks Citra Indonesia} = \frac{\text{Total Indeks Rata} - \text{Rata Seluruh Responden}}{\text{Jumlah Total Responden}}$$

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Kepmenlu No. 27/B/RO/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2023, Kementerian Luar Negeri, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tIbWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjlvS2VwbWVubHUIIMjBQZXRhJTlwU3RyYXRlZ2kIMjBkYW4IMjBjBNYw51YWwIMjBjS1UIMjBjBLZW1lbnmx1JTlwVEEIMjAyMDIyX0ZpbmFsLnBkZg==>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri**

Institusi Penghasil: Kementerian Luar Negeri

Definisi

Indeks untuk mengukur segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum negara setempat, serta kebiasaan dan hukum internasional

Interpretasi

Tujuan indeks untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan dan pelindungan WNI yang telah diselenggarakan. Pembobotan sub indeks didasarkan pada parameter kompleksitas penyelesaian/penanganan, tingkat urgensi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sub indeks.

Metode/Rumus Penghitungan

Capaian Indeks diperoleh melalui pelaksanaan 4 Sub IKU, yaitu:

- Sub indeks 1: Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan (bobot 40 %).
- Sub indeks 2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri (bobot 15 %)
- Sub indeks 3: Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (bobot 25 %)
- Sub indeks 4: Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri (bobot 20%)

Rumus:

$(40\% \times \text{realisasi sub indeks 1}) + (15\% \times \text{realisasi sub indeks 2}) + (25\% \times \text{realisasi sub indeks 3}) + (20\% \times \text{realisasi sub indeks 4})$.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Laporan Kinerja 2022, Direktorat Pelindungan WNI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, 2023.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0RpcmVrdG9yYXQIMjBkZW5kZXJhbCUyMFBYb3Rva29sJTlwZGFuJTlwS29uc3VsZXIvMjAyMi9MYXBvcmluZS2luZlZlYSUyMChMS2opJTlwRGl0LiUyMFBibGluZHVuZ2FuJTlwV05JlWVEEIMjAyMDIyLnBkZg==>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 3: Penegakan Hukum Nasional

SASARAN 1: Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan



Indikator :

Indeks Perilaku Anti Korupsi

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan *Explanatory Factor Analysis* (EFA). Rentang indeks 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Interpretasi

Semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Metode/Rumus Penghitungan

IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data Indeks Perilaku Anti Korupsi, BPS, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

<https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah



Indikator :

Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga

Institusi Penghasil: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Definisi

Berdasarkan PermenPAN RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Secara umum, terdapat 6 (enam) aspek pengukuran yang digunakan antara lain 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan serta 6) Inovasi.

Interpretasi

- **4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima**
Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.
- **4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
- **3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup**
Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
- **2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.

- **1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
- **1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
- **0 - 1,00: Kategori F/Gagal**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode pengukuran dalam PEKPP menggunakan pengukuran kuantitatif untuk mengukur penyelenggaraan layanan dan persepsi masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan analisis pada bukti dukung yang telah disampaikan dan persepsi dari pengguna layanan.

Metode pengumpulan data evaluasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara daring maupun luring dengan analisis objektif dari Evaluator terhadap bukti dukung yang disampaikan
2. Wawancara secara langsung pada unit lokus; dan
3. Gabungan metode pengumpulan data secara pemeriksaan maupun wawancara.

Disamping itu, dilakukan verifikasi data melalui observasi lapangan atau verifikasi secara daring. Adapun pembobotan setiap aspek penilaian Indeks Pelayanan Publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 24%)
2. Profesionalisme SDM (Bobot 25%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 10%); dan
6. Inovasi (Bobot 12%)

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data

4. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/lakuntabilitaskinerjallaporan-kinerja/file/6782-laporan-kinerja-lakip-2022>
5. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6813-lakip-deputi-bidangpelayananpublik-tahun-2022>
6. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/lq0Xu5krrHMxEbtK>.

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Kementerian/Lembaga.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Pelayanan Publik Provinsi

Institusi Penghasil: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Definisi

Berdasarkan PermenPAN RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Secara umum, terdapat 6 (enam) aspek pengukuran yang digunakan antara lain 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan serta 6) Inovasi.

Interpretasi

- **4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima**
Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.
- **4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
- **3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup**
Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
- **2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
- **1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
- **1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

- **0 - 1,00: Kategori F/Gagal**

Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode pengukuran dalam PEKPP menggunakan pengukuran kuantitatif untuk mengukur penyelenggaraan layanan dan persepsi masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan analisis pada bukti dukung yang telah disampaikan dan persepsi dari pengguna layanan.

Metode pengumpulan data evaluasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara daring maupun luring dengan analisis objektif dari Evaluator terhadap bukti dukung yang disampaikan;
2. Wawancara secara langsung pada unit lokus; dan
3. Gabungan metode pengumpulan data secara pemeriksaan maupun wawancara.

Disamping itu, dilakukan verifikasi data melalui observasi lapangan atau verifikasi secara daring. Adapun pembobotan setiap aspek penilaian Indeks Pelayanan Publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 24%)
2. Profesionalisme SDM (Bobot 25%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 10%); dan
6. Inovasi (Bobot 12%)

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/lakuntabilitaskinerja/laporan-kinerja/file/6782-laporan-kinerja-lakip-2022>
2. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6813-lakip-deputi-bidangpelayananpublik-tahun-2022>
3. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/q0Xu5krrHMXEbtK>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota

Institusi Penghasil: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Definisi

Berdasarkan PermenPAN RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Secara umum, terdapat 6 (enam) aspek pengukuran yang digunakan antara lain 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan serta 6) Inovasi.

Interpretasi

- **4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima**
Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.
- **4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
- **3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik**
Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
- **2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup**
Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
- **2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (Dengan Catatan)**
Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
- **1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
- **1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk**
Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

- **0 - 1,00: Kategori F/Gagal**

Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Metode/Rumus Penghitungan

Metode pengukuran dalam PEKPP menggunakan pengukuran kuantitatif untuk mengukur penyelenggaraan layanan dan persepsi masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan analisis pada bukti dukung yang telah disampaikan dan persepsi dari pengguna layanan.

Metode pengumpulan data evaluasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara daring maupun luring dengan analisis objektif dari Evaluator terhadap bukti dukung yang disampaikan
2. Wawancara secara langsung pada unit lokus; dan
3. Gabungan metode pengumpulan data secara pemeriksaan maupun wawancara.

Disamping itu, dilakukan verifikasi data melalui observasi lapangan atau verifikasi secara daring. Adapun pembobotan setiap aspek penilaian Indeks Pelayanan Publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 24%)
2. Profesionalisme SDM (Bobot 25%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 10%); dan
6. Inovasi (Bobot 12%)

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitaskinerjallaporan-kinerja/file/6782-laporan-kinerja-lakip-2022>
2. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6813-lakip-deputi-bidangpelayananpublik-tahun-2022>
3. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/q0Xu5krrHMxEbtK>

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Kabupaten/Kota.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



PROGRAM PRIORITAS 5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

SASARAN 1: Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan



Indikator :

Indeks Kekuatan Militer

Institusi Penghasil: The Global Firepower

Definisi

Indeks ini digunakan untuk mengetahui kekuatan militer dari Indonesia berdasarkan aspek alutsista yang dimiliki.

Interpretasi

Menurut GFP, skor sempurna, yakni 0,0000 sehingga, semakin kecil skor PwrIndx suatu negara, maka semakin baik pula kualitas kekuatan militer negara tersebut.

Metode/Rumus Penghitungan

Indeks ini digunakan untuk mengetahui kekuatan militer dari Indonesia berdasarkan aspek alutsista yang dimiliki dan juga sumber daya.

Ukuran/Satuan: tanpa satuan.

Judul Publikasi/Sumber Data

Global Firepower Countries Index, The Global Firepower, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data: <https://www.globalfirepower.com/countries.php>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Indeks Terorisme Global**

Institusi Penghasil: The Institute for Economics and Peace (IEP)

Definisi

Global Terrorism Index (GTI) merupakan studi analisis yang komprehensif terhadap dampak terorisme di 163 negara di dunia atau 99,7 persen dari populasi dunia. Laporan GTI dibuat oleh Institute for Economics & Peace (IEP) menggunakan data dari Terrorism Tracker dan sumber lainnya. GTI menghasilkan skor komposit untuk memberikan peringkat ordinal negara-negara yang terkena dampak terorisme.

Interpretasi

Skor GTI setiap negara dalam skala dari 0 hingga 10, di mana 0 mewakili tidak ada dampak dari terorisme dan 10 mewakili dampak terorisme tertinggi yang terukur.

Metode/Rumus Penghitungan

Melihat rilis hasil pengukuran *Global Terrorism Index (GTI)* yang dikeluarkan oleh The Institute for Economics and Peace (IEP).

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/Sumber Data

Global Terrorism Index 2020, The Institute for Economics and Peace (IEP), 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

1. <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/>;
2. <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-2.pdf>.

Tahun Data Tersedia: 2023.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.

**Indikator :****Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya**

Institusi Penghasil: Badan Pusat Statistik

Definisi

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dan sebagainya) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dan sebagainya) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Interpretasi: Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik.

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100 persen.

Ukuran/Satuan: persen (%).

Judul Publikasi/Sumber Data:

Statistik Kriminal, BPS, 2021.

Tautan Publikasi/Sumber Data

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1312/sdgs_16/1.

Tahun Data Tersedia: 2020.

Level Estimasi: Nasional dan Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya.



Indikator :

Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Institusi Penghasil: Kepolisian Republik Indonesia

Definisi

Indikator ini mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Interpretasi

Keterangan Indeks:

1-1,9: Perlu pembenahan besar

2-2,9: Perlu pembenahan

3-3,9: Memadai

4-4,9: Baik

5: Istimewa

Metode/Rumus Penghitungan

Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dua dimensi utama pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu: Indeks Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan bobot 56%; dan Indeks Gakkum (penegakan hukum) dengan bobot 44%.

Ukuran/Satuan: (tanpa satuan).

Judul Publikasi/ Sumber Data: Polri. -

Tahun Data Tersedia: 2022.

Level Estimasi: Nasional.

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan.

Apakah Indikator dapat diakses umum: Tidak.





PENUTUP



**METADATA INDIKATOR
PEMBANGUNAN**

RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2024

Penutup

PENUTUP

Semoga buku ini menjadi sumber pengetahuan serta referensi yang berguna bagi pembaca dalam memahami dokumen perencanaan pembangunan. Terima kasih kepada unit kerja sektor di lingkup Kementerian PPN/Bappenas yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga dalam proses penulisan hingga penerbitan buku “Metadata Indikator Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024” ini.

Sebagai penutup, mari terus menggali potensi metadata indikator untuk menciptakan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan. Keberlanjutan dan inovasi dalam manajemen metadata akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan data yang semakin kompleks di masa mendatang. Semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga menjadi pijakan awal bagi pengembangan lebih lanjut di bidang pembangunan.

Seperti pepatah yang mengatakan bahwa setiap buku adalah jendela dunia. Semoga buku ini menjadi jendela yang membuka cakrawala baru bagi pembaca. Kami berharap pembaca tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga dapat meraih wawasan yang lebih luas. Keseluruhannya itu diharapkan dapat merangsang diskusi yang berarti dan menginspirasi perubahan positif untuk pembangunan nasional.



Kementerian PPN/
Bappenas

METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2024